



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA



2025

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Mina Bahari III
Jl. Medan Merdeka Timur
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tim Penyusun

Dr.Lilly Aprilia Pregiwati,S.Pi,MSi	Pengarah
Dessi Arisandi, S.Pi, M.SE	Ketua
Redi Wibowo, A.Md	Anggota
Moh. Ismail Adiyaksa N, S.Si	Anggota
Sarli Assajdah, A.Md	Anggota
Fitra Aditama, S.St.Pi	Anggota
Latisa Alifa Maura	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 Pusat Pelatihan KP dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Pusat Pelatihan KP selama tahun 2025.

Selama tahun 2025, Pusat Pelatihan KP telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Desember tahun 2025 yang terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2025, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Pusat Pelatihan KP.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pada bidang pelatihan kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya selama tahun 2025.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 Pusat Pelatihan KP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Pusat Pelatihan KP, dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Pusat Pelatihan KP,



Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan KP tahun 2025-2029, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran

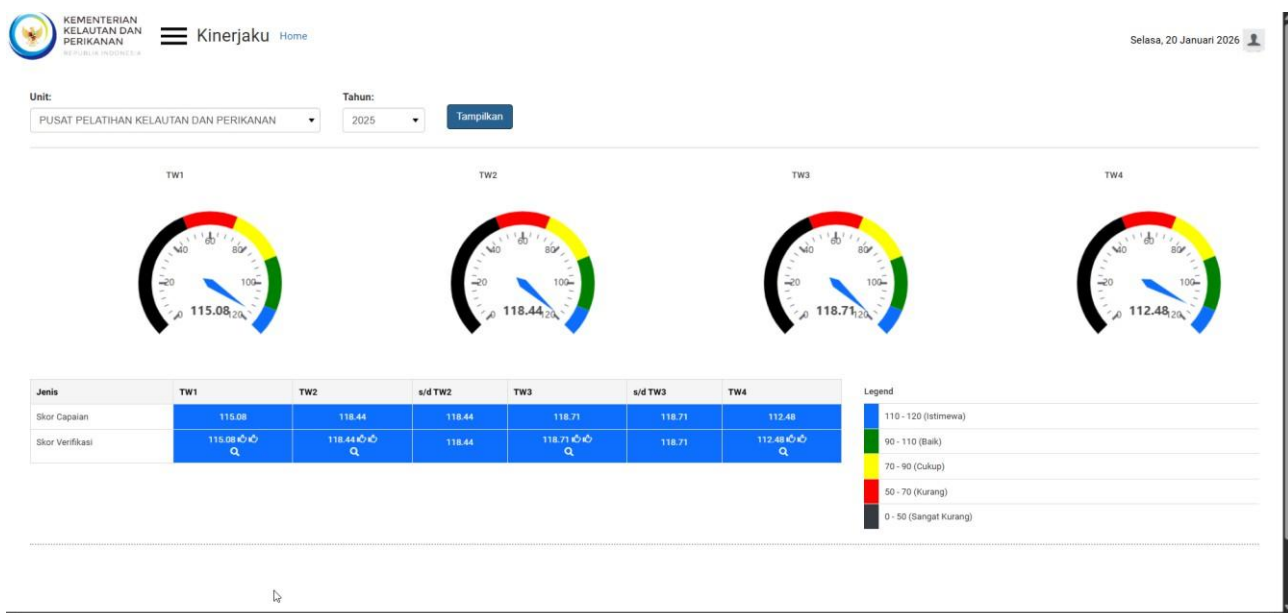
Perjanjian Kinerja ini mencakup tiga sasaran strategis dengan sejumlah indikator kinerja yang terukur. Sasaran pertama adalah **Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan**, yang memiliki 13 indikator utama. Beberapa di antaranya meliputi: persentase lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang kompeten dan terserap di Dunia Usaha, Industri, dan Kerja (DUDIKA) ditargetkan sebesar 75%; persentase SDM kelautan dan perikanan tersertifikasi yang terserap di DUDIKA sebanyak 70%; jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih mencapai 14.800 orang; penerimaan negara bukan pajak (PNBP) satuan kerja di lingkungan Pusat Pelatihan KP sebesar Rp 15,59 miliar; serta jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi sebanyak 2.900 orang. Selain itu, terdapat target fasilitasi satu Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang menerapkan IPTEK KP, penyusunan satu paket materi pelatihan berbasis Kaji Widya, tiga NSPK pelatihan masyarakat, 12 dokumen jejaring/kerja sama, tujuh sertifikasi kelembagaan pelatihan, 75% usulan sertifikasi program diklat masyarakat yang disahkan, serta peningkatan kapasitas dua unit sarana dan dua unit prasarana pelatihan.

Sasaran kedua adalah **Aparatur yang Dididik dan Dilatih**, dengan empat indikator kinerja. Target yang ditetapkan antara lain: melatih 4.360 aparatur kelautan dan perikanan; memastikan tersedia lima tenaga pelatihan yang kompeten; menyusun sembilan usulan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan

bidang keahlian untuk mendukung implementasi *corpu*; serta enam lembaga/instansi yang memanfaatkan layanan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) kelautan dan perikanan.

Sasaran ketiga adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan**. Terdapat tujuh indikator kinerja pada sasaran ini, yaitu: tercapainya 100% layanan dukungan manajemen internal; satu satuan kerja diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); indeks profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP sebesar 83; pemanfaatan 85% rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja; nilai penilaian mandiri SAKIP sebesar 81; tingkat kepatuhan pengelolaan barang milik negara (BMN) sebesar 80%; serta 80% rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam sistem SIRUP.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja organisasi Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2025 adalah **112,48% - ISTIMEWA** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini:



Gambar 1. Screenshot Nilai NKO Aplikasi Kinerjaku Pusat Pelatihan KP Tahun 2025

Capaian Penetapan Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan tersedianya

lulusan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan. Capaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2025 ini adalah:

1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di DUDIKA dengan target 75% dan capaian 81,67%.
2. Persentase SDM Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap DUDIKA dengan target 70% dan capaian 70,03%.
3. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih dengan target 14.800 orang dan capaian 19.045 orang.
4. Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP dengan target 15,59 miliar rupiah dan capaian 27,36 miliar rupiah.
5. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi dengan target 2.900 orang dan capaian 3.723 orang.
6. Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (SFV) yang menerapkan IPTEK KP dengan target 1 desa dan capaian 1 desa.
7. Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya dengan target 1 paket dan capaian 1 paket.
8. Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK) dengan target 3 NSPK dan capaian 5 NSPK.
9. Jejaring dan/atau Kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dengan target 12 dokumen dan capaian 15 dokumen.
10. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar dengan target 7 sertifikat dan capaian 8 sertifikat.
11. Persentase Usulan Sertifikasi Program yang Disahkan dengan target 75% dan capaian 100%.
12. Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 2 unit dan capaian 2 unit.
13. Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 2 unit dan capaian 2 unit.
14. Aparatur KP yang Dilatih dengan target 4.360 orang dan capaian 5.432 orang.
15. Tenaga Pelatihan yang Kompeten dengan target 5 orang dan capaian 23 orang.
16. Jumlah Usulan Pengembangan Kompetensi untuk CORPU dengan target 9 usulan dan capaian 10 usulan.
17. Lembaga yang Memanfaatkan Layanan Peningkatan Kompetensi ASN dengan target 6 lembaga dan capaian 7 lembaga.

18. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target 100% dan capaian 100%.
19. Unit Kerja yang Dibangun untuk Diusulkan menuju WBK dengan target 1 satker dan capaian 1 satker.
20. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP dengan target 83 indeks dan capaian 89,73 indeks.
21. Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan target 85% dan capaian 100%.
22. Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP dengan target 81 dan capaian 85,30.
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP dengan target 80% dan capaian 80%.
24. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP dengan target 80% dan capaian 100%.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Desember 2025, Total Anggaran Pusat Pelatihan KP dan UPT Lingkup Puslat KP Tahun 2025 sebesar Rp. 122.944.290.000, dengan Pusat Pelatihan KP sendiri memiliki pagu sebesar Rp. 12.383.060.000, berdasarkan data, sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi keuangan Pusat Pelatihan KP Rp. 12.277.481.000 atau sebesar 99,15% dari Pagu Aktif.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 capaian kinerja *Output* program sudah semuanya tercapai, namun demikian untuk menghasilkan kualitas hasil kinerja yang optimal dimasa-masa mendatang dalam penyelenggaraan program perlu supervisi dalam bentuk koordinasi rutin antara pusat dan balai untuk membahas progres kegiatan dan tantangan yang dihadapi dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi prioritas KKP dan Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I - PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Keragaan SDM	4
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	12
2.2 Dukungan KKP terhadap Misi Presiden dan Perumusan Misi BPPSDMKP	13
2.3 Tujuan Strategis BPPSDMKP 2025-2029	14
2.4 Sasaran Program	16
2.5 Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	16
2.6 Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025	27
2.7 Rumus Pengukuran Kinerja	32
2.8 Metode Pengukuran kinerja	33
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Prestasi Kinerja Pusat Pelatihan KP	36
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	36
Sasaran Program SK.01 - Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan.....	40
Indikator Kinerja IKS.01.01 - Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	40
Indikator Kinerja IKS.01.02 - Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%).....	43
Indikator Kinerja IKS.01.03 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (Orang)	46
Indikator Kinerja IKS.01.04 - Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar).....	52
Indikator Kinerja IKS.01.05 - Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang).....	56
Indikator Kinerja IKS.01.06 - Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa).....	60
Indikator Kinerja IKS.01.07 - Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis Kaji Widya (paket)	62
Indikator Kinerja IKS.01.08 - Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	67
Indikator Kinerja IKS.01.09 - Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen).....	71
Indikator Kinerja IKS.01.10 - Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	79

Indikator Kinerja IKSK.01.11 - Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%).....	82
Indikator Kinerja IKSK.01.12 - Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit).....	85
Indikator Kinerja IKSK.01.13 - Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit).....	91
Sasaran Program SK.02 - Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	97
Indikator Kinerja IKSK.02.14 - Aparatur KP yang dilatih (orang).....	97
Indikator Kinerja IKSK.02.15 - Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang).....	102
Indikator Kinerja IKSK.02.16 - Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan).....	105
Indikator Kinerja IKSK.02.17 - Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	107
Sasaran Program SK.03 - Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	110
Indikator Kinerja IKSK.03.18 - Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	110
Indikator Kinerja IKSK.03.19 - Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker).....	113
Indikator Kinerja IKSK.03.20 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (Indeks)	117
Indikator Kinerja IKSK.03.21 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%).....	122
Indikator Kinerja IKSK.03.22 – Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	124
Indikator Kinerja IKSK.03.23 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	129
Indikator Kinerja IKSK.03.24 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	134
3.3 Akuntabilitas Keuangan	136
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pelatihan KP	142
BAB IV - PENUTUP.....	149
4.1 Capaian Kinerja Utama.....	149
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025	5
Tabel 2. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Golongan/Ruang tahun 2025	5
Tabel 3. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Pendidikan Terakhir tahun 2025.....	5
Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Kelompok Jabatan III tahun 2025.....	5
Tabel 5. Distribusi JF Tertentu Pegawai Pusat Pelatihan KP Per Desember Tahun 2025.....	5
Tabel 6. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP	7
Tabel 7. Tujuan Strategis BPPSDMKP 2025-2029.....	14
Tabel 8. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029.....	16
Tabel 9. Indikator Kinerja BPPSDM Tahun 2025-2029.....	17
Tabel 10. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPPSDMKP Tahun 2025-2029.....	17
Tabel 11. Indikator Kinerja Program BPPSDMKP.....	18
Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	19
Tabel 13. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Renstra BPPSDMKP 2025-2029	22
Tabel 14. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025	29
Tabel 15. Indeks Capaian IKU.....	34
Tabel 16. Capaian Kinerja tahun 2025 pada Pusat Pelatihan KP	37
Tabel 17. Capaian IKU 1 Tahun 2025.....	40
Tabel 18. Capaian IKU 1 Per Balai.....	41
Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 1 dengan satker sejenis.....	42
Tabel 20. Capaian IKU 2 Tahun 2025.....	44
Tabel 21. Capaian IKU 2 Per Balai.....	44
Tabel 22. Capaian IKU 3 Tahun 2025.....	46
Tabel 23. Rekap IKU 3 menurut Satker.....	47
Tabel 24. Rekap IKU 3 Menurut Bidang Pelatihan.....	47
Tabel 25. Distribusi IKU 3 by Gender	48
Tabel 26. Distribusi Jenis Pelatihan IKU 3 by Gender	48
Tabel 27. Perbandingan Capaian IKU 3 dengan satker sejenis.....	50
Tabel 28. Capaian IKU 4 Tahun 2025.....	52
Tabel 29. Rekap IKU Nilai PNBK Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP	54
Tabel 30. Perbandingan Capaian IKU 4 dengan satker sejenis.....	54
Tabel 31. Capaian IKU 5 Tahun 2025.....	56
Tabel 32. Rekap Sertifikasi Kompetensi per Satker.....	58
Tabel 33. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi perbidang usaha	58
Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU 5 dengan satker sejenis.....	58
Tabel 35. Capaian IKU 6 Tahun 2025.....	60
Tabel 36. Capaian IKU 7 Tahun 2025.....	64
Tabel 37. Rekap Judul Kajian dan Modul yang dihasilkan Tahun 2025.....	65
Tabel 38. Perbandingan Capaian IKU 9 dengan satker sejenis.....	65
Tabel 39. Capaian IKU 8 Tahun 2025.....	67
Tabel 40. Rekap IKU 8 2025	68
Tabel 41. Perbandingan Capaian IKU 8 dengan satker sejenis.....	69
Tabel 42. Capaian IKU 9 Tahun 2025.....	71
Tabel 43. Rekap Perjanjian Kerjasama Tahun 2025.....	73
Tabel 44. Perbandingan Capaian IKU 9 dengan satker sejenis.....	78
Tabel 45. Capaian IKU 10 Tahun 2025.....	80
Tabel 46. Capaian IKU 11 Tahun 2025.....	83
Tabel 47. Rekap Capaian IKU Persentase Usulan Sertifikasi Tahun 2025.....	83
Tabel 48. Capaian IKU 12 Tahun 2025.....	85
Tabel 49. Rekap Sarana Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya tahun 2025.....	88
Tabel 50. Perbandingan Capaian IKU 12 dengan satker sejenis.....	90
Tabel 51. Capaian IKU 13 Tahun 2025.....	91
Tabel 52. Rekap Prasarana Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya tahun 2025.....	94
Tabel 53. Perbandingan Capaian IKU 12 dengan satker sejenis.....	96

Tabel 54. Capaian IKU 14 Tahun 2025.....	97
Tabel 55. Rekap Capaian IKU Pelatihan Aparatur Tahun 2025.....	98
Tabel 56. Rekap IKU 14 Berdasarkan Jenis Pelatihan dan Gender	99
Tabel 57. Rekap Capaian IKU 14 Berdasarkan Judul Pelatihan	100
Tabel 58. Perbandingan Capaian IKU 14 dengan satker sejenis.....	101
Tabel 59. Capaian IKU 15 Tahun 2025.....	103
Tabel 60. Rekap Capaian IKU Tenaga Pelatihan yang Kompeten Tahun 2025.....	103
Tabel 61. Capaian IKU 16 Tahun 2025.....	106
Tabel 62. Rekap Usulan Corpu Tahun 2025.....	106
Tabel 63. Capaian IKU 17 Tahun 2025.....	108
Tabel 64. Rekap Capaian Lembaga/Instansi yang Menggunakan Fasilitas Peningkatan Kompetensi Tahun 2025.....	108
Tabel 65. Capaian IKU 18 Tahun 2025.....	110
Tabel 66. Rekap Dokumen Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan KP Tahun 2025	111
Tabel 67. Perbandingan Capaian IKU 18 dengan satker sejenis.....	112
Tabel 68. Capaian IKU 19 Tahun 2025.....	115
Tabel 69. Perbandingan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 2025 Lingkup BPPSDMKP	116
Tabel 70. Bobot Komponen Kualifikasi Perhitungan IP ASN	118
Tabel 71. Bobot Komponen Kompetensi Perhitungan IP ASN.....	118
Tabel 72. Bobot Komponen Kinerja Perhitungan IP ASN	119
Tabel 73. Bobot Komponen Disiplin Perhitungan IP ASN	119
Tabel 74. Perhitungan IP ASN.....	119
Tabel 75. Kategori Nilai IP ASN.....	119
Tabel 76. Capaian IKU 20 Tahun 2025.....	120
Tabel 77. Perbandingan Capaian IP ASN Lingkup BPPSDM KP Tahun 2025	121
Tabel 78. Capaian IKU 21 Tahun 2025.....	122
Tabel 79. Perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi dengan satker lain.....	123
Tabel 80. Capaian IKU 22 Tahun 2025	125
Tabel 81. Hasil Evaluasi Mandiri Implementasi SAKIP Pusat Pelatihan KP TA. 2025	126
Tabel 82. BA Catatan Atas Verifikasi PM SAKIP Pusat Pelatihan KP Tahun 2025.....	127
Tabel 83. Perbandingan Capaian IKU PM SAKIP dengan satker lain	128
Tabel 84. Capaian IKU 23 Tahun 2025.....	130
Tabel 85. LKE IKU Kepatuhan BMN Pusat Pelatihan KP Tahun 2025	130
Tabel 86. Perbandingan Capaian IKU Kepatuhan BMN Pusat KP dengan Satker sejenis	133
Tabel 87. Capaian IKU 24 Tahun 2025.....	135
Tabel 88. Perbedaan Capaian IKU SIRUP PBJ dengan satker sejenis	135
Tabel 89. Realisasi Keuangan Lingkup Pusat Pelatihan KP.....	137
Tabel 90. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Tahun 2025	138
Tabel 91. Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Pelatihan KP TA 2025.....	145
Tabel 92. Link Data Dukung Capaian IKU	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Nilai NKO Aplikasi Kinerjaku Pusat Pelatihan KP Tahun 2025	iii
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Pelatihan KP berdasarkan PermenKP No. 5 Tahun 2024	4
Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Pelatihan	8
Gambar 4. Tampilan Kinerjaku	36
Gambar 5. Grafik Capaian Lulusan Pelatihan KP yang Terserap DUDIKA Tahun 2020-2025	41
Gambar 6. Grafik Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih Tahun 2020-2025	46
Gambar 7. Nilai PNBK Lingkup Pusat Pelatihan KP 2022-2025	53
Gambar 8. Grafik Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi Tahun 2020-2024	57
Gambar 9. Kegiatan Fasilitasi SFV di Desa Ngablak	61
Gambar 10. Grafik Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya Tahun 2020-2025	65
Gambar 11. Grafik Capaian NSPK Tahun 2020-2025	67
Gambar 12. Grafik Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti Tahun 2020-2025	71
Gambar 13. Grafik Capaian IKU Sertifikasi Kelembagaan 2020-2025	80
Gambar 14. Grafik Capaian Saran Pelatihan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2020-2025	86
Gambar 15. Grafik Capaian Prasarana Pelatihan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2020-2025	92
Gambar 16. Grafik Capaian IKU Aparatur KP yang Dilatih 2020-2025	98
Gambar 17. Grafik Capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP 2021-2025 ...	111
Gambar 18. Grafik Capaian IKU IP ASN Pusat Pelatihan Tahun 2020-2025	120
Gambar 19. Grafik Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun 2021-2025	123
Gambar 20. Grafik Capaian IKU PM SAKIP 2023-2025	125
Gambar 21. Formula Perhitungan RU PBJ	134
Gambar 22. Tampilan Dashboard Kinerjaku (Sumber: Kinerjaku.kkp.go.id)	149



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



pendahuluan

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai Pusat Pelatihan KP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan KP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Adapun dasar hukum dari pembuatan laporan kinerja ini antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 91 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Pusat Pelatihan KP kepada Kepala BPPSDM KP selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2025;
2. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Pelatihan KP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala BPPSDM KP selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Pelatihan KP;
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Pelatihan KP.

1.3 Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024, BPPSDM merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPPSDM didukung oleh unit kerja eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDM, Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan. **Pusat Pelatihan KP mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.**

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

- 5) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi profesi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 7) Pelaksanaan pengembangan kemitraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 8) Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- 9) Pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 10) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
- 11) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Pelatihan KP berdasarkan PermenKP No. 5 Tahun 2024

1.4 Keragaan SDM

Adapun komposisi pegawai Pusat Pelatihan KP di Tahun 2025 yakni :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025

CPNS & PNS		Jumlah	%		PPPK		Jumlah	TOTAL
L	P		L	P	L	P		
28	15	43	59	41	10	7	17	60

Tabel 2. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Golongan/Ruang tahun 2025

Golongan/ Ruang				Jumlah	PPPK	TOTAL
I	II	III	IV			
	3	25	15	43	17	60

Tabel 3. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Pendidikan Terakhir tahun 2025

Pendidikan									Jumlah
SD	SLTP	SLTA	DI/D2	D3	D4	S1	S2	S3	
		7		4	1	27	17	1	60

Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Kelompok Jabatan III tahun 2025

Jabatan										Jumlah
eselon I.a	eselon II.a	eselon II.b	Es III.a	Es III.b	Es IV.a	Es IV.b	V	JF Tertentu	JF Umum	
	1				1			27	31	60

Tabel 5. Distribusi JF Tertentu Pegawai Pusat Pelatihan KP Per Desember Tahun 2025

Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
Arsiparis	2
Pranata Komputer	2
Analisis Kebijakan	4
Analisis Hukum	1
Perencana	9
Pranata SDM Aparatur	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	2
Widyaiswara	1
Pengembang Teknologi Pembelajaran	1
Total	27

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Pusat Pelatihan KP dibantu oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, yaitu Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan-Sumatera Utara, BPPP Tegal-Jawa Tengah, BPPP Banyuwangi-Jawa Timur, BPPP Bitung-Sulawesi Utara,

dan BPPP Ambon-Maluku.

Kebijakan Kepala Pusat Pelatihan KP berkaitan dengan strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan adalah:

- 1) Untuk pelatihan bagi Aparatur, mengutamakan diklat mandatory, yaitu diklat prajabatan dan diklat bagi calon tenaga fungsional;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai KKP untuk mendapatkan diklat;
- 3) Mendorong adanya pengembangan jenis dan metode pelatihan;
- 4) Mengupayakan perencanaan pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan;
- 5) Membuat kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring;
- 6) Mendorong pencapaian sasaran dengan memanfaatkan anggaran diluar Pusat Pelatihan KP melalui kerjasama program pelatihan;
- 7) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana standar pelatihan secara bertahap;
- 8) Memberikan informasi pelatihan secara cepat, terkini dan akurat kepada *stakeholders*;
- 9) Mendorong tersedianya kurikulum dan media belajar bagi pelatihan teknis dan fungsional;
- 10) Memacu standarisasi pelatih dan tenaga pengelola pelatihan;
- 11) Memberikan kesempatan bagi setiap pelatih dan tenaga pengelola pelatihan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan kompetensi jabatan atau kompetensi kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan didukung oleh SDM yang profesional di bidang kepelautan, konservasi, penangkapan ikan, kampung nelayan maju, budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta manajemen. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga kepelatihan terus dilakukan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik.

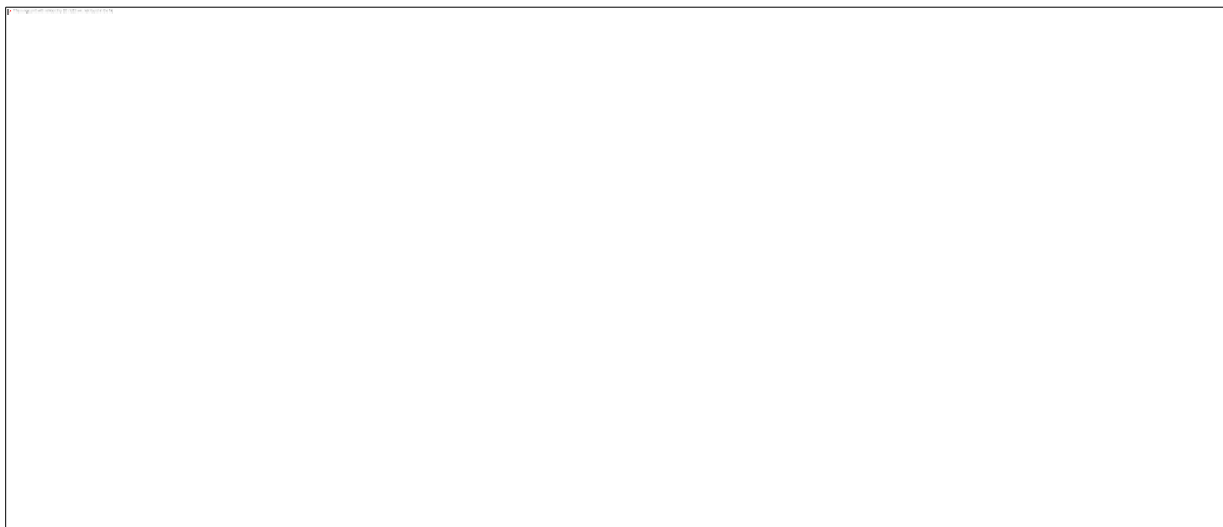
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan penjamin mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan (KP), Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Indonesia. Melalui jejaring balai pelatihan yang tersebar di berbagai daerah, lembaga ini berperan dalam

memastikan pemerataan akses pelatihan bagi masyarakat pesisir, pembudidaya ikan, nelayan, pelaku usaha perikanan, serta aparatur pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat KP, baik di wilayah barat, tengah, maupun timur Indonesia, dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan spesifik daerah, sehingga program yang dijalankan lebih relevan, adaptif, dan berdampak nyata terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tabel 6. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP

No.	Satuan Kerja	Wilayah Pelatihan (Provinsi)	Keterangan
1.	BPPP Medan	Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumsel	9 Provinsi, 127 Kabupaten/Kota
2.	BPPP Tegal	Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng	8 Provinsi, 98 Kabupaten/Kota
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalsel	5 Provinsi, 64 Kabupaten/Kota
4.	BPPP Bitung	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalut	7 Provinsi, 79 Kabupaten/Kota
5.	BPPP Ambon	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sultra	5 Provinsi, 57 Kabupaten/Kota
6.	BDA Sukamandi	Seluruh Indonesia	34 Provinsi

WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN



Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tertentu, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan dapat mendatangkan Pelatih dari luar instansi guna memberikan mata pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kondisi aktual di lapangan.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Masalah dan tantangan tentunya dihadapi oleh Pusat Pelatihan KP dalam kiprahnya dalam mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam khususnya di bidang pelatihan diantaranya:

- A. Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:
 - a) Rendahnya realisasi pelatihan yang mendukung program kampung nelayan maju.
 - b) Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
 - c) Sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP, mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;

- d) Sebaran dan jangkauan pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP;
 - e) Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan yang terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
 - f) Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
 - g) Rendahnya kompetensi masyarakat KP dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;
 - h) Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;
 - i) Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
 - j) Standarisasi kompetensi masih terbatas jumlahnya;
 - k) Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;
 - l) Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- B. Aspek Pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan perikanan diantaranya:
- a) Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;
 - b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;
 - c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
 - d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.
- C. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah; Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala sampai dengan tahun 2025.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM di Pusat Pelatihan KP.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan KP tahun 2025-2029, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2025, serta metode Pengukuran Kinerja.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan
- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.
- 6) **LAMPIRAN**, berisi lampiran PK awal dan PK Revisi Pusat Pelatihan KP Tahun 2025.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



perencanaan kinerja

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Visi Nasional dan Kementerian

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang satu abad kemerdekaan, dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama.

Sebagai bagian dari pemerintahan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung visi nasional tersebut. Visi KKP untuk 2025–2029 adalah *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Visi BPPSDMKP

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifiknya:

“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.”

Visi ini menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia untuk menjawab tantangan sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus pada:

1. **SDM yang Inovatif:** Mendorong kreativitas dan adaptasi terhadap perubahan.
2. **SDM yang Kompeten:** Memastikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
3. **SDM yang Berdaya Saing:** Memperkokoh posisi Indonesia di arena global.

Landasan Hukum

Landasan hukum visi BPPSDMKP tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025. Fungsi strategis BPPSDMKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan serta pengembangan SDM.
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM KP.
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Pelaksanaan administrasi badan.
5. Fungsi lain sesuai penugasan Menteri.

Fungsi ini menjadi instrumen untuk mengintegrasikan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi ke dalam sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada kualitas SDM.

Peran BPPSDMKP dalam Mendukung Ekonomi Biru

Peran BPPSDMKP dalam mendukung kebijakan **Blue Economy** difokuskan pada penyiapan SDM kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdaya saing, baik sebagai calon tenaga kerja maupun pelaku usaha. Peran ini diwujudkan melalui:

1. **Penyuluhan:** Memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, menumbuhkembangkan kelompok usaha (seperti koperasi dan Gapoktan), serta meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan sumber daya.
2. **Pendidikan Vokasi:** Menjadi jalur strategis untuk:
Regenerasi pelaku usaha/wirausaha muda KP (pelaku usaha milenial) yang inovatif dan kompeten dan menyiapkan lulusan siap kerja yang selaras dengan kebutuhan industri.
3. **Pelatihan:** Memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan sosial-kultural bagi pelaku utama/usaha, calon tenaga kerja, dan aparatur.
4. **Standardisasi dan Sertifikasi:** Memastikan pengakuan kompetensi di tingkat nasional dan internasional

2.2 Dukungan KKP terhadap Misi Presiden dan Perumusan Misi BPPSDMKP

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus khusus pada Misi Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8. Misi KKP dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(Melaksanakan Asta Cita ke-2 dan ke-8)
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

(Melaksanakan Asta Cita ke-2, ke-3, ke-5, dan ke-6)

3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

(Melaksanakan Asta Cita ke-4)

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas

(Melaksanakan Asta Cita ke-7)

Misi BPPSDMKP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi KKP ke-3 ("Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan"), BPPSDMKP menetapkan misinya sebagai:

"Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional."

2.3 Tujuan Strategis BPPSDMKP 2025-2029

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu *"Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing"* dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan strategis BPPSDMKP 2025–2029 dapat dirinci ke dalam empat pilar utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.:

Tabel 7. Tujuan Strategis BPPSDMKP 2025-2029

Bidang	Tujuan Strategis	Arah yang Dicapai
1. Penyuluhan KP	1.1. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna oleh pelaku usaha mikro dan kecil sektor, serta pelaku pendukung sektor KP	Peningkatan kapasitas usaha dan aksesibilitas kepada berbagai
	1.2. Memperluas akses pelaku usaha mikro kecil KP pelaku pendukung sektor KP terhadap lembaga permodalan, pasar, serta perizinan berusaha.	kelembagaan serta usaha yang dilakukan dapat

Bidang	Tujuan Strategis	Arah yang Dicapai
	1.3. Mendorong kepedulian pelaku usaha terhadap keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan pesisir.	dipastikan mendukung keberlanjutan lingkungan
	1.4. Memperkuat posisi tawar pelaku usaha KP melalui penguatan kelembagaan.	
2. Pendidikan KP	2.1. Mengembangkan serta memperkuat sistem kelembagaan pendidikan vokasi KP yang relevan terhadap kebutuhan industri.	Lulusan vokasi KP yang unggul, adaptif menjadi pelaku usaha baru (pelaku usaha milenial) serta diserap oleh DUDIKA
	2.2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis keunggulan wilayah maritim.	
	2.3. Memperkuat kompetensi dosen, guru, serta peserta didik agar selaras dengan dinamika teknologi dan kebutuhan DUDIKA.	
	2.4. Menyiapkan calon wirausaha muda yang berpendidikan sebagai generasi penerus usaha KP	
	2.5. Menyediakan rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan di satuan pendidikan KP sebagai bahan peningkatan kapasitas pelaku usaha/utama	
	2.6. Untuk melakukan diseminasi teknologi yang dihasilkan dari penelitian kepada masyarakat di desa bekerjasama dengan penyuluh	
3. Pelatihan KP	3.1. Meningkatkan kapasitas SDM KP melalui sistem pembelajaran terintegrasi berbasis kebutuhan DUDIKA dan masyarakat.	SDM KP calon pelaku usaha dan calon tenaga kerja yang kompeten, adaptif terhadap teknologi serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan global, dan aparatur KKP integritas
	3.2. Mengoptimalkan pelaksanaan <i>Corporate University (Corpu)</i> untuk aparatur KKP.	
	3.3. Memperluas pemanfaatan teknologi pembelajaran digital dan inovasi pelatihan.	
	3.4. Memanfaatkan sistem digital dan kemitraan strategis guna memperkuat literasi digital, kapasitas pemasaran, serta keberlanjutan kerja lulusan KP.	

Bidang	Tujuan Strategis	Arah yang Dicapai
4. Standardisasi & Sertifikasi SDM KP	4.1 Menyediakan standar kompetensi kerja yang selaras dengan kebutuhan DUDIKA domestic maupun internasional.	SDM KP yang tersertifikasi, diakui secara nasional dan internasional, serta mampu bersaing di pasar kerja global.
	4.2 Memperluas akses penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja bagi masyarakat kelautan dan perikanan.	
	4.3 Memperkuat pembinaan serta koordinasi lembaga pelaksana sertifikasi profesi sektor KP.	

2.4 Sasaran Program

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi BPPSDMKP dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dan SS5 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPSDMKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan tahun 2025-2029, BPPSDMKP menetapkan sasaran program dan indikator sebagaimana tabel:

Tabel 8. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target 2025	Target 2029
SS-4: Meningkatnya Kualitas SDM KP	SP-1: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP	Persentase lulusan pendidikan/pelatihan KP yang kompeten/tersertifikasi dan terserap di DUDIKA	75%	79%
		Persentase peningkatan omzet kelompok pelaku utama yang ditingkatkan kelasnya	50%	58%
SS-5: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	SP-2: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDM	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDM (Indeks)	86	88

2.5 Target Kinerja Tahun 2025-2029

Target kinerja KKP tahun 2025-2029 (termasuk sasaran dan indikator kinerja) dengan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound

(SMART) yang meliputi indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 9. Indikator Kinerja BPPSDM Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025-2029				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	72	74	76	78

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP, BPPSDMKP berperan mengawal Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”. Peran ini diwujudkan melalui penguatan fungsi penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di seluruh unit kerja BPPSDMKP agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara terintegrasi dan berorientasi hasil. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja utama beserta target capaian yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian kinerja pada periode tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 10. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPPSDMKP Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2025-2029				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	70	72	74	76	78

Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I. Indikator sasaran program BPPSDM KP mengacu pada Indikator Sasaran Strategis KKP tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

Tabel 11. Indikator Kinerja Program BPPSDMKP

No	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	SP 1. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP Kompeten dan/atau Tersertifikasi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	76	77	78	79
			Persentase kelompok yang meningkat omzet (%)	50	52	54	56	58
2	Dukungan Manajemen	SP 2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPSDM KP	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDM KP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (output) yang dibiayai oleh anggaran (input). Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara *specific, measurable, achievable, reliable, and timebond* (SMART). Indikator Kinerja Kegiatan

dalam Struktur Manajemen Kinerja di BPPSDM KP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BPPSDM KP dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	76	77	78	79
2	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	85	86	87	88	89
3	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Persentase SDM KP yang tersertifikasi yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	70	80	81	82	83
4	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Persentase kelompok yang ditingkatkan kelasnya (%)	6	12	14	17	19

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, agile dan akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP(%)	85	86	87	88	89
			Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK- RI atas LK BPPSDM KP (%)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
			Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP (Level)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
			Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP (Nilai)	88	88,2	88,4	88,6	88,8
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	81,5	81,75	82	82,25	82,5
			Nilai Pembangunan Integritas	76	77	78	79	80

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
			BPPSDM KP (Nilai)					
			Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP (Indeks)	81	81,5	82	82,5	83
			Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP (%)	65	85	85	85	85
			Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP (%)	100	100	100	100	100
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	80	81	82	83	84
			Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP (%)	80	81	82	83	84
			Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP (Nilai)	77	78	79	80	81
6	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih	Jumlah Aparatur KKP yang	167	168	169	170	171

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Kelautan dan Perikanan		Diberikan Beasiswa (orang)					
			Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (orang)	68	69	70	71	72
			Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur (orang)	4525	4620	4870	5770	6470

Adapun rincian kerangka pendanaan berdasarkan renstra BPPSDM ini jika diturunkan ke Pusat Pelatihan KP adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Renstra BPPSDMKP 2025-2029

DIPOLDAKRI 2020-2029							
Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasar an Program/Sasar an Kegiatan	Indikator Strategis/Indika tor Program/Indikat or Kegiatan	Target/Anggaran (Rp.Juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan			39.418, 97	116.873, 50	124.143, 50	140.013, 50	155.918, 50
	01- Terselenggarany a Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	01-Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Persen)	75	76	77	78	79
	AAH-Peraturan Lainnya						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target/Anggaran (Rp.Juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	111- Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun	01-Jumlah Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Disusun (Rancangan Peraturan)	-	5	6	7	8
	121-Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kajian)	1	5	7	10	12
ADF-Sertifikasi Lembaga							
	141-Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai Standard Lembaga Pelatihan	01-Jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai Standard Lembaga Pelatihan (Lembaga)	10	7	8	8	8
		02-Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang	-	75	76	77	78

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target/Anggaran (Rp.Juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Berlaku (Persen)					
	AEA-Koordinasi						
	151-Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Koordinasi Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kegiatan)	-	2	4	5	6
	AEE-Kemitraan						
	152-Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kesepakatan)	-	18	20	22	25
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
	161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	3	10	15	17	20
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan						
	711-Peralatan dan Mesin Pelatihan	01-Jumlah Peralatan dan Mesin Pelatihan	5	10	10	10	10

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Strategis/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Target/Anggaran (Rp.Juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan (Unit)					
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan						
	721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	01-Jumlah Gedung, Bangunan, dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	10	10	10	10
	SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan						
	831-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih (Orang)	25.354	35.992	38.236	39.691	42.319
		02-Jumlah Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	17.804	26.994	28.677	29.768	31.739

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan Output dan Outcome BPPSDM. Oleh karena itu, Pusat Pelatihan Kelautan dan

Perikanan memiliki Sasaran Kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2025, dengan mengacu pada sasaran program BPPSDM yaitu;

Sasaran Kegiatan (SK-1) “Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) target 2025 sebanyak 75%.
2. Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) target 2025 sebanyak 70%.
3. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih dengan target pada Tahun 2025 sebanyak 14.800 orang.
4. Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP dengan Tahun 2025 sebesar 15,59 Milyar Rupiah.
5. SDM KP yang bersertifikat kompetensi dengan target pada Tahun 2025 sebanyak 2.900 orang.
6. Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa) sebanyak 1 Desa.
7. Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya dengan target di tahun 2025 sebesar 1 Paket.
8. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang disusun dengan target pada tahun 2025 sebanyak 3 NSPK.
9. Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target pada tahun 2025 sebesar 12 Dokumen.
10. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan dengan target tahun 2025 sebanyak 7 Sertifikat.
11. Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan target tahun 2025 sebesar 75%.
12. Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target tahun 2025 sebesar 2 unit.
13. Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target tahun 2025 sebesar 2 unit.

Sasaran Kegiatan (SK-2) “Aparatur Yang Dididik dan Dilatih” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 sebagai berikut:

14. Aparatur KP yang dilatih dengan target tahun 2025 sebanyak 4.360 orang.
15. Tenaga Pelatihan yang kompeten dengan target tahun 2025 sebanyak 5 Orang.
16. Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu dengan target tahun 2025 sebanyak 9 usulan.
17. Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan dengan target 6 lembaga.

Sasaran Kegiatan (SK-3) “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 sebagai berikut:

18. Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP target setiap tahun nya adalah 100%.
19. Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan target tahun 2025 sebesar 1 satker.
20. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP dengan target tahun 2025 sebesar 83.
21. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP, dengan target tahun 2025 sebesar 85%.
22. Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP dengan target tahun 2025 sebanyak 81.
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP dengan target tahun 2025 sebesar 80%.
24. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP dengan target tahun 2025 sebesar 80%

2.6 Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2025 diatas, Pusat Pelatihan KP menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berbasis Logical framework.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dann hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*Output*) dan hasil (*Outcomes*),

menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.

Target tersebut ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja utama untuk tingkat kegiatan (*input, Output, dan Outcome*). Sebagai catatan, terjadi dua kali perubahan Perjanjian Kinerja di bulan Agustus 2025 dan desember. Perubahan Target Indikator Kinerja: Beberapa indikator mengalami perubahan atau penyesuaian angka target pada PK Desember dibandingkan target awal. Beberapa perubahan ini yakni:

1. Penambahan Indikator Baru: IKU nomor 2 ("Persentase SDM tersertifikasi yang terserap di DUDIKA") sebelum nya belum ada di PK Januari/Agustus, namun pada PK Desember memiliki target sebesar 70%, dan iKU 6 Laporan kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) Lingkup Pusat Pelatihan KP yang menerapkan IPTEK KP (Laporan) yang baru muncul di Revisi agustus dan berubah di revisi desember menjadi Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa).
2. Perubahan Target: Beberapa target disesuaikan karena dinamika organisasi, seperti:
 - a. IKU 1 Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) yang pada PK Januari dan Revisi Agustus masih dalam satuan orang, di PK Desember berubah menjadi persentase yang diambil dari jumlah masyarakat dilatih yang menggunakan rupiah murni (RM).
 - b. IKU 3 Masyarakat yang Dilatih dari 25.324, 29.944 orang menjadi 14.800 orang
 - c. IKU 4 PNBP dari 10,85 Milyar, 17,34 Milyar menjadi 15,59 Milyar.
 - d. IKU 5 SDM yang Bersertifikat Kompetensi yang signifikan dari 740, 1.510 orang menjadi 2.900 orang.
 - e. IKU 10 Sertifikasi Kelembagaan pada PK Januari masih berupa satuan Lembaga dan berubah di Agustus menjadi Sertifikat dan targetnya berubah di Desember menjadi 7 dari 10.
 - f. IKU 12 Sarana mengalami perubahan dari target 5 di Januari, 6 di Agustus dan turun jadi 2 di Desember.
 - g. IKU 13 Prasarana mengalami perubahan dari target 2 di Januari, 3 di Agustus, dan 2 di Desember.

- h. IKU 14. Aparatur KP yang dilatih mengalami perubahan target di revisi Desember dari target 4.525 menjadi 4.360 Orang.

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target (PK Januari)	Target (PK Agustus)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (PK DESEMBER)	Target (PK Desember)
1	Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang	17.804	17.804	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75
2	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	Belum ada di PK Januari	Belum ada di PK Agustus	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	70
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	25.324	29.944	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	14.800
4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	10,85	17,34	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	15,59
5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang)	740	1.510	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	2.900
6	Laporan kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) Lingkup Pusat Pelatihan KP yang menerapkan IPTEK KP (Laporan)	Belum ada di PK Januari	1	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1
7	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis Kaji Widya (paket)	1	1	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	1
8	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan	3	3	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan	3

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target (PK Januari)	Target (PK Agustus)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (PK DESEMBER)	Target (PK Desember)
	Masyarakat yang Disusun (NSPK)			Masyarakat yang Disusun (NSPK)	
9	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12	12	Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
10	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	10	10	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	7
11	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75	75	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75
12	Sarana pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	5	6	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2
13	Prasarana pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	2	3	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2
14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.525	4525	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.360
15	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5	5	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5
16	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan	9	9	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan	9

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target (PK Januari)	Target (PK Agustus)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (PK DESEMBER)	Target (PK Desember)
	bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)			bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	
17	Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6	6	Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6
18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100	100	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100
19	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
20	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83	83	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83
21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)	85	85	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)	85
22	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81	81	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80	80	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80
24	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80	80	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80

Sumber: Dokumen PK Pusat Pelatihan KP Januari 2025, PK Agustus 2025, dan PK Desember 2025

2.7 Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang Dila Kukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Selama ini pemanfaatan **Logical Framework Analysis** masih terbatas bertujuan untuk melakukan proses perencanaan proyek yang bersifat partisipatoris dan berorientasi tujuan. Teknik ini memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam suatu rencana/ program untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi. Padahal *LFA* merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (*Output*) dan dampak program (*Outcome*) akan dimonitor dan dievaluasi dan penyajian ringkasan program dalam suatu format standard.

LFA digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajagan dalam penyusunan proposal, menyiapkan disain proyek/ program dalam suatu sistematis dan kaitan yang masuk akal, penilaian disain proyek/ program, memutuskan persetujuan untuk pelaksanaan proyek/ program, monitoring dan evaluasi kemajuan (progress) dan kinerja (performance) program.

LFA juga dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan program, atau tepatnya kemampuan teknis, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan teknis dalam menyelenggarakan suatu program. Logical Framework sebagai kemampuan teknis program karena dapat digunakan sebagai alat untuk Perencanaan,

Penilaian, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat.

Kerangka logika sebagai teknis dalam mengkombinasikan Logika Vertikal maupun Logika Horisontal. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus.

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matrix atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu: Hubungan antara *Goals*, *Objectives*, *Outputs* dan *Activities* Logika Vertikal dan Logika Horisontal Indikator Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program *Goals* dalam kerangka logis (*logframe*) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi diluar control program. *Objectives* atau sasaran program merupakan Rincian/ Bagian dari *Goal*, namun objectives atau sasaran ini selalunya diluar kontrol program. *Goal* dan *Objectives* diluar kontrol program karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang lainnya. Sedangkan *Outputs* itu sendiri adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program berakhir dan *Activities* adalah Kegiatan-kegiatan apa yang harus disusun untuk memperoleh *Outputs*.

Dalam matriks logframe kita juga dapatkan istilah *Objectively Verifiable Indicators* atau disingkat OVI yaitu atau dalam bahasa Indonesia disebut indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan *SMART* (*Specific, Measurable, Attainable, Realibility and Timely*).

2.8 Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan III Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;

3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Indeks Capaian IKU

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 100 – 120
Baik	Nilai 90 - <100
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat kurang	Nilai <50

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan nomor B.553/BPPSDM.5/KP.440/IV/2024 Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 Pusat.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

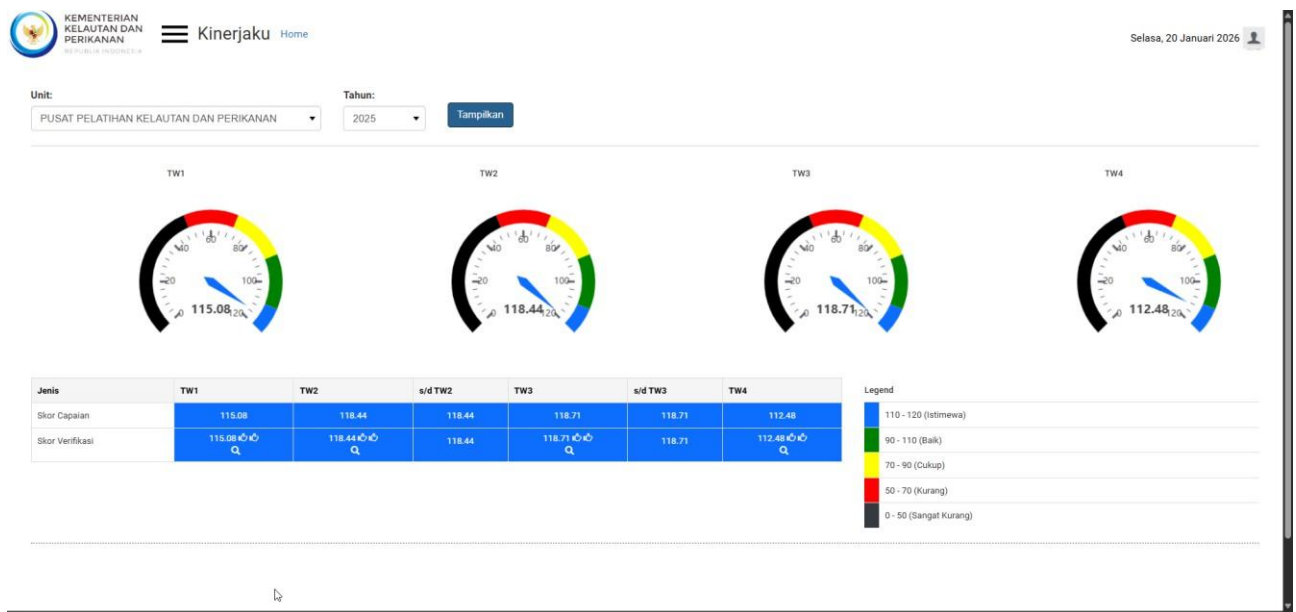


akuntabilitas kinerja

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja Pusat Pelatihan KP

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2025 adalah **112,48% - ISTIMEWA** seperti pada tampilan menu dibawah ini :



Gambar 4. Tampilan Kinerjaku

Capaian keberhasilan untuk Tahun 2025 adalah **istimewa**, dengan capaiannya dalam beberapa IKU Utama sudah melebihi target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 16. Capaian Kinerja tahun 2025 pada Pusat Pelatihan KP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2025	Capaian 2025	%
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	81,67	108,89
		2	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	70	70,03	100,04
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	14.800	19.045,00	120,00
		4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	15,59	27,36	120,00
		5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	2.900	3.723,00	120,00
		6	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1	1,00	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2025	Capaian 2025	%
		7	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	1	2,00	120,00
		8	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	3	5,00	120,00
		9	Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12	15,00	120,00
		10	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	7	8	114,29
		11	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75	100,00	120,00
		12	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2,00	100,00
		13	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2,00	100,00
2	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.360	5.432,00	120,00
		15	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5	23,00	120,00
		16	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	9	10,00	111,11
		17	Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6	7,00	116,67
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100	100,00	100,00
		19	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju	1	1,00	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2025	Capaian 2025	%
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)			
		20	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83	89,73	108,11
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)	85	100,00	117,65
		22	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81	85,30	105,31
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80	80,00	100,00
		24	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80	100,00	120,00

Sumber: Capaian Kinerja pada aplikasi Kinerjaku

Sasaran Program SK.01 - Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.01.01 - Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

Secara definisi, Dunia usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB), Dunia industri adalah ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir, Dunia kerja adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi. Lulusan Pelatihan KP Kompeten adalah Purnawidya yang telah menyelesaikan pelatihan yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni di Balai Pelatihan KP yang memiliki kompetensi, keterampilan teknis dan non-teknis sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Misalnya sertifikasi keahlian.

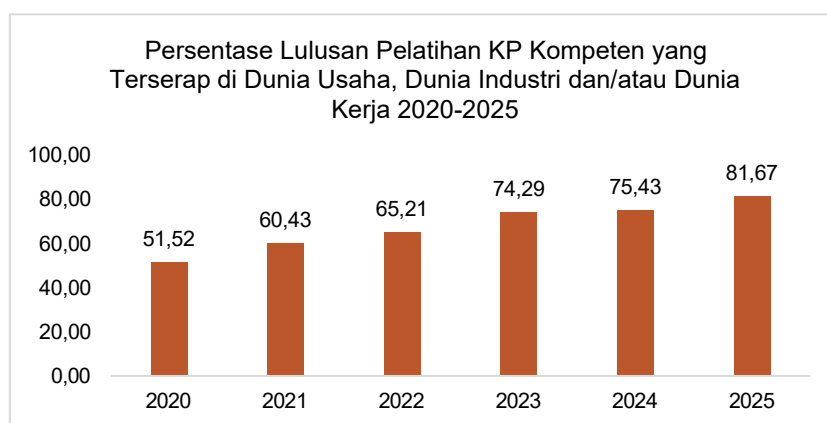
Persentase lulusan Pelatihan KP kompeten yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pelatihan KP (bersumber dari anggaran Rupiah Murni) mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelaku Utama/Usaha dari pejabat yang berwenang di Instansi terkait/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok.

Data dukung capaian IKU ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Pelatihan Nomor 25/BPPSDM.4/RC.610/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (DUDIKA) tahun 2025.

Tabel 17. Capaian IKU 1 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
51,52	60,43	65,21	74,29	75,43	75,00	81,67	108,89%	8,27%	79,00	103,38

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 5. Grafik Capaian Lulusan Pelatihan KP yang Terserap DUDIKA Tahun 2020-2025

Realisasi penyerapan lulusan pelatihan kompeten di DUDIKA menunjukkan tren pertumbuhan positif yang sangat stabil secara konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2020 dengan angka 51,52%, realisasi terus meningkat menjadi 60,43% di tahun 2021, dan 65,21% di tahun 2022. Kenaikan signifikan terus berlanjut hingga tahun 2023 mencapai 74,29% dan menyentuh angka 75,43% pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan kualitas serta relevansi pelatihan terhadap kebutuhan pasar kerja setiap tahunnya.

Pada tahun berjalan 2025, performa indikator ini mencatatkan hasil yang sangat memuaskan melampaui ekspektasi awal. Dari target yang ditetapkan sebesar 75,00%, institusi berhasil mencapai realisasi sebesar 81,67%, atau setara dengan tingkat capaian sebesar 108,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat kenaikan pertumbuhan sebesar 8,27%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi penempatan lulusan pada tahun 2025 berjalan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika ditinjau dari perspektif jangka panjang dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, capaian saat ini menunjukkan posisi yang sangat kuat. Target akhir pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 79,00%, namun secara mengejutkan realisasi tahun 2025 yang sebesar 81,67% telah melampaui angka tersebut. Hal ini menghasilkan persentase capaian terhadap target 2029 sebesar 103,38%, yang berarti organisasi telah berhasil memenuhi target lima tahunan lebih awal dari jadwal yang direncanakan.

Tabel 18. Capaian IKU 1 Per Balai

No	Satker	Capaian RM	Target DUDIKA (orang)	Total	Total (%)	Capaian (%)
1	BPPP Ambon	715	536	537	75,10%	100,14%
2	BPPP Medan	456	342	350	76,75%	102,34%
3	BPPP Bitung	475	356	357	75,16%	100,21%
4	BPPP Tegal	522	392	500	95,79%	127,71%
5	BPPP Banyuwangi	1.770	1.328	1.472	83,16%	110,84%
Total		3.938	2.954	3.216	81,67%	108,89%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di DUDIKA, Pusat Pelatihan KP secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari total 3.938 masyarakat yang dilatih menggunakan dana APBN (rupiah murni), target penyerapan di DUDIKA adalah sebesar 75% atau setara dengan 2.954 orang. Realisasi yang dicapai mencapai 3.216 orang, atau 108.87% dari target, yang menunjukkan kinerja yang sangat positif dan melebihi ekspektasi.

Pada level satuan kerja (Satker), seluruh balai pelatihan berhasil memenuhi atau bahkan melampaui target 75%: Balai Tegal menjadi satker dengan capaian tertinggi (127.71%), diikuti oleh Balai Banyuwangi (110.84%), Balai Medan (102.34%), Balai Bitung (100.21%), dan Balai Ambon (100.14%). Balai Banyuwangi mencatatkan kontribusi terbesar dalam jumlah absolut penyerapan, yaitu 1.472 orang dari 1.770 masyarakat yang dilatih.

Sebagai perbandingan, capaian IKU Masyarakat dilatih yang terserap DUDIKA ini jika dibandingkan dengan K/L lain (Badan P2SM LHK Tahun 2024 untuk IKU DUDIKA ini menggunakan pembanding capaian salah satu komponen “SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya” yakni “Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha”) adalah sebagai berikut;

Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 1 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	Puslat – BPPSDM KKP (2025)	2.954 (75% RM)	3.216 (81,67% RM)	108,89%
2	Badan P2SM LHK (2024)		7.871	101.30%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP & LKJ BP2SM LHK 2024

Tabel ini menunjukkan data serapan DUDIKA (untuk P2SM LHK disebut “Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha”) target Tahun 2025 untuk Puslat dan 2024 untuk Badan P2SM.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 14.800 Orang dan capaian 19.045 Orang yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Badan P2SM LHK dengan capaian “Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha” 7.871 Orang.

Adapun faktor penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini yakni:

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Materi pelatihan diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);

2. Kemitraan Strategis: Adanya kerja sama dengan perusahaan sektor kelautandan perikanan melalui MoU dan PKS;
3. Pemanfaatan Teknologi: Pelatihan secara daring memperluas akses danmeningkatkan keterampilan teknis peserta;
4. Sertifikasi Lembaga Diklat: Adanya fasilitasi uji kompetensi oleh Balai Pelatihanyang terakreditasi memperkuat daya saing lulusan;

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapaiannya IKU ini yakni:

1. Pelatihan Berbasis Job Matching: Mengintegrasikan pelatihan dengan kebutuhan spesifik perusahaan.
2. Monitoring Pasca-Pelatihan: Melakukan pendataan alumni secara berkala untuk memetakan serapan dan kebutuhan lanjutan.
3. Upgrade Sarana dan Prasarana Pelatihan: Modernisasi fasilitas pelatihan termasuk alat tangkap, hatchery, dan dapur pengolahan.

Indikator Kinerja IKS.01.02 -Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

Secara definisi, Dunia usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB), Dunia industri adalah ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir, Dunia kerja adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi. SDM KP yang Tersertifikasi adalah Purnawidya yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian yang mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

Persentase SDM KP tersertifikasi kompetensi yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja Adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana SDM KP yang lulus uji kompetensi (bukan peserta pendidikan) mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industry, dan dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berlayar/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja dari Perusahaan atau kepala Balai Pelatihan/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/Suket dari Penyalur tenaga Kerja/ KTP dengan jenis pekerjaan bidang KP (mis: Nelayan) /Surat Keterangan Kecakapan (SKK).

Data dukung capaian IKU ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Pelatihan Nomor 39/BPPSDM.4/RC.610/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Persentase SDM KP tersertifikasi kompetensi DUDIKA Tahun 2025.

Tabel 20. Capaian IKU 2 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					70,00	70,03	100,04%	-	87,00	80,49

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan data yang disajikan, indikator mengenai penyerapan SDM Kelautan dan Perikanan yang tersertifikasi kompetensi ini merupakan indikator kinerja baru. Hal ini terlihat dari kekosongan data realisasi pada periode tahun 2020 hingga 2024. Sebagai langkah awal dalam memantau efektivitas sertifikasi kompetensi terhadap daya serap tenaga kerja, tahun 2025 menjadi titik dasar (*baseline*) pertama untuk melihat sejauh mana lulusan tersertifikasi dapat diterima oleh sektor DUDIKA.

Pada tahun berjalan 2025, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang sangat presisi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar **70,00%**, realisasi yang berhasil dicapai juga berada tepat pada angka **70,03%**, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar **100,04%**. Karena statusnya sebagai indikator baru, kolom persentase kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 belum memiliki nilai perbandingan, namun capaian awal ini menunjukkan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan program sertifikasi ke depannya.

Melihat proyeksi jangka panjang dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, target penyerapan SDM tersertifikasi diharapkan terus meningkat hingga mencapai **87,00%** pada tahun 2029. Realisasi saat ini yang sebesar 70,00% mencerminkan bahwa institusi telah mengamankan **80,49%** dari target akhir lima tahunan tersebut. Untuk mencapai sisa target sekitar 17% menuju tahun 2029, diperlukan konsistensi dalam penyelarasan kurikulum sertifikasi dengan kebutuhan industri yang dinamis

Tabel 21. Capaian IKU 2 Per Balai

No	Satker	Capaian	Target DUDIKA (orang)	Realisasi (bidang)	Total (%)	Persentase (%)
				Penangkapan Ikan		
1	BPPP Tegal	2.539	1.778	1.778	70,03%	100,03%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Secara Keseluruhan (Total) Dari 2.539 SDM KP yang tersertifikasi kompetensi (di luar peserta didik), target penyerapan di DUDIKA ditetapkan sebesar 70% atau 1.778 orang. Target ini tercapai 100,04%, dengan realisasi penyerapan sebanyak 1.778 orang.

Analisis per Satker: Balai Tegal menjadi satu-satunya kontributor capaian. Satker ini berhasil menyerap 100% dari targetnya, yaitu 1.778 orang dari 2.539 yang tersertifikasi. Balai Ambon, Medan, Bitung, dan Banyuwangi belum memiliki capaian dalam indikator ini karena adanya blokir anggaran sehingga kegiatan sertifikasi hanya dilakukan oleh BPPP Tegal.

Adapun faktor penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini yakni:

1. Pusat pelatihan KP melalui Balai telah memiliki LSP dibidang KP, Akuakultur serta Konservasi dan Jasa Kelautan dan telah tersertifikasi dan terpercaya;
2. Penerapan regulasi tentang sertifikasi awak kapal;
3. Pelatihan disusun berdasarkan SKKNI dan standar industri yang relevan.
4. Tenaga pengajar bersertifikat dari industri dan lembaga pelatihan meningkatkan mutu pelatihan.
5. Kemudahan dalam memperoleh informasi dan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan;
6. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pusat Pelatihan KP dengan UPT lingkup BPPSDM KP, UPT DJPT, serta lembaga mitra (LMTC) dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
7. Dukungan sistem digital melalui aplikasi Akapi dan E-LAUT yang mempermudah proses perencanaan, pendaftaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pelatihan. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi layanan, akurasi data, serta akuntabilitas kinerja Tim Kerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapaiannya IKU ini yakni:

1. Kerjasama dengan BNSP dalam kegiatan uji sertifikasi, Memperpanjang akreditasi balai pelatihan sebagai tempat TUK;
2. Telah terimplementasinya penerbitan sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan yang sesuai SOP oleh Pusat Pelatihan KP;
3. Melakukan pendampingan proses approval Program Diklat Awak Kapal Perikanan khususnya di Balai Pelatihan KKP.
4. Implementasi kerja sama dengan lembaga mitra pemerintah (JK, AP2HI, WWF, DFW, dan lembaga mitra lainnya dalam hal program capacity bulding peningkatan kualitas SDM KP

5. Implementasi dan optimalisasi aplikasi E-LAUT, yang mencakup digitalisasi siklus pelatihan, penerbitan e-sertifikat, database instruktur dan modul, serta sistem monitoring dan evaluasi.
6. Sosialisasi penggunaan E-LAUT kepada unit pelaksana.

Indikator Kinerja IKS.01.03 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (Orang)

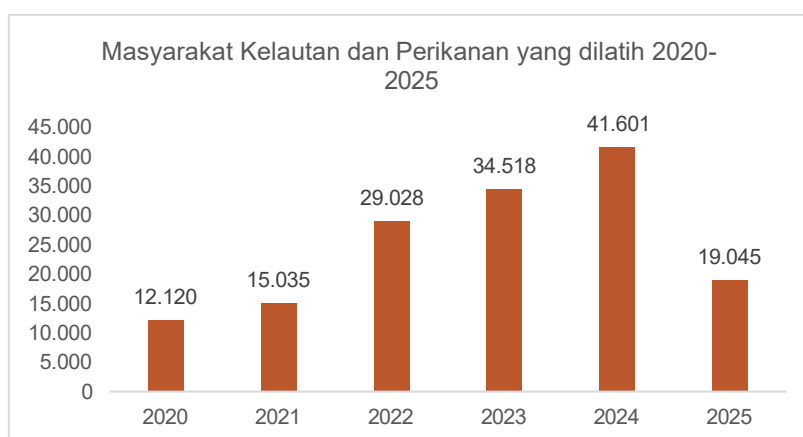
IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Definisi Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (Non-ASN dan ASN), Peserta pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pelatihan, serta untuk peserta ASN pelatihan yang diikuti merupakan pelatihan yang tidak diselenggarakan oleh Balai Diklat Aparatur.

Data dukung capaian IKU ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Pelatihan Nomor 40/BPPSDM.4/RC.610/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Masyarakat KP yang dilatih tahun 2025.

Tabel 22. Capaian IKU 3 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	2025	% Capaian	% Kenaikan 2024- 2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
12.120	15.035	29.028	34.518	41.601	14.800	19.045	128,68%	-54,22%	42.319	45,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 6. Grafik Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih Tahun 2020-2025

Berdasarkan tabel 21, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat dan konsisten selama lima tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2020 dengan 12.120 orang, angka ini terus tumbuh secara signifikan melewati 29.028 orang pada tahun 2022, hingga mencapai puncaknya di tahun

2024 dengan total 41.601 orang. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini mencerminkan perluasan jangkauan program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan secara masif dari tahun ke tahun.

Pada tahun berjalan 2025, performa realisasi menunjukkan keberhasilan dalam melampaui target tahunan yang ditetapkan. Dengan target sebesar 14.800 orang, institusi berhasil merealisasikan pelatihan bagi 19.045 orang, atau setara dengan tingkat capaian sebesar 128,68%. Meskipun target tahunan tercapai dengan baik, jika dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2024 yang mencapai 41.601 orang, terdapat penurunan sebesar -54,22%. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian skala prioritas atau volume kegiatan pelatihan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari perspektif rencana strategis jangka panjang (Renstra BPPSDMKP 2025-2029), target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak 42.319 orang. Realisasi tahun 2025 yang saat ini berjumlah 19.045 orang menunjukkan bahwa persentase capaian terhadap target 2029 baru mencapai 45,00%. Mengingat realisasi tahun 2024 pernah hampir menyentuh target akhir 2029, institusi memiliki potensi besar untuk mencapai sasaran strategis tersebut jauh lebih cepat jika intensitas pelatihan ditingkatkan kembali pada tahun-tahun mendatang. Lebih detailnya, sebaran Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih Tahun 2025 per satker pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rekap IKU 3 menurut Satker

No	Satker	Target 2025	Realisasi	Persentase (%)
1	BPPP Ambon	400	715	178,75%
2	BPPP Medan	430	456	106,05%
3	BPPP Bitung	400	475	118,75%
4	BPPP Tegal	12.540	15629	124,63%
5	BPPP Banyuwangi	1.030	1770	171,84%
Total		14.800	19045	128,68%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Tabel 24. Rekap IKU 3 Menurut Bidang Pelatihan

No	Satker	Mesin Perikanan	Budidaya	Penangkapan	Pengolahan & Pemasaran	Konservasi	Sumber daya KP	Kepelautan	Manajemen
1	BPPP Ambon	110	124	225	256				
2	BPPP Medan	100	138	100	118				
3	BPPP Bitung		100		75			300	
4	BPPP Tegal	60	397	14615	445	90	22		

N o	Satker	Mesin Perikanan	Budidaya	Penangka pan	Pengolahan & Pemasaran	Konserv asi	Sumber daya KP	Kepela utan	Manajeme n
5	BPPP Banyuwangi		480	283	768	186			53
Total		270	1239	15223	1662	276	22	300	53

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Tabel diatas menyajikan data operasional dari lima Satuan Kerja (Satker) BPPP, yaitu Ambon, Medan, Bitung, Tegal, dan Banyuwangi, dengan total capaian kumulatif mencapai 19.045 orang. Dari total tersebut, BPPP Tegal tampil sebagai kontributor paling dominan dengan sumbangan sebesar 82,06% atau sebanyak 15.629 orang, yang didorong secara masif oleh tingginya angka di sektor Penangkapan. Di posisi kedua, BPPP Banyuwangi berkontribusi sebesar 9,29% (1.770 orang) dengan sebaran bidang yang cukup merata. Sementara itu, tiga Satker lainnya memberikan kontribusi di bawah 5%, yaitu BPPP Ambon sebesar 3,75% (715 orang), BPPP Bitung sebesar 2,49% (475 orang), dan BPPP Medan dengan kontribusi terkecil sebesar 2,39% (456 orang).

Jika ditinjau berdasarkan kategori bidangnya, sektor Penangkapan merupakan pilar utama dengan total 15.223 orang, yang mencakup 79,93% dari seluruh total kegiatan. Dominasi ini hampir sepenuhnya berpusat di BPPP Tegal yang mencatatkan angka 14.615 orang. Sektor lain yang memiliki pengaruh cukup signifikan adalah Pengolahan & Pemasaran dengan total 1.662 orang (8,73%), di mana BPPP Banyuwangi menjadi penggerak utama di bidang ini dengan angka 768 orang. Selanjutnya, bidang Budidaya menyumbang 6,51% (1.239 orang) dengan distribusi peserta yang relatif tersebar di seluruh Satuan Kerja.

Berikut adalah data IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di Tahun 2025 berdasarkan Gender

Tabel 25. Distribusi IKU 3 by Gender

No.	Satker	Target 2025	Realisasi 2025	%	Laki-laki	Perempuan	%L	%P
1	Balai Ambon	400	715	178,75%	438	277	61,26%	38,74%
2	Balai Medan	430	456	106,05%	331	125	72,59%	27,41%
3	Balai Bitung	400	475	118,75%	411	64	86,53%	13,47%
4	Balai Tegal	12.540	15.629	124,63%	14931	698	95,53%	4,47%
5	Balai Banyuwangi	1.030	1.770	171,84%	1023	747	57,80%	42,20%
Total		14.800	19.045	128,68%	17.134	1.911	89,97%	10,03%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Tabel 26. Distribusi Jenis Pelatihan IKU 3 by Gender

No	Bidang Pelatihan	Laki-laki	Perempuan	Total	%L	%P
1	Budidaya Ikan	1.047	192	1.239	84,50%	15,50%
2	Kepelautan	298	2	300	99,33%	0,67%

No	Bidang Pelatihan	Laki-laki	Perempuan	Total	%L	%P
3	Konservasi	82	8	90	91,11%	8,89%
4	Mesin Perikanan	265	5	270	98,15%	1,85%
5	Penangkapan Ikan	14.947	276	15.223	98,19%	1,81%
6	Pengolahan & Pemasaran	400	1.262	1.662	24,07%	75,93%
7	Garam	55	101	156	35,26%	64,74%
8	Pengelolaan Sampah	20	10	30	66,67%	33,33%
9	Pengelolaan Sumberdaya KP	16	6	22	72,73%	27,27%
10	Managerial	4	49	53	7,55%	92,45%
	Total	17.134	1.911	19.045	89,97%	10,03%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pelatihan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan pada Tahun 2025, dari sisi partisipasi berdasarkan gender, peserta laki-laki mendominasi dengan jumlah 17.134 orang (89,97%), sementara peserta perempuan berjumlah 1.911 orang (10,03%). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelatihan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan gender.

Berikut capaian per satuan kerja (satker):

1. Balai Ambon mencapai 178,8% dengan peserta laki-laki 61,26% dan perempuan 38,74%.
2. Balai Medan mencapai 106,0%, peserta laki-laki 72,59%, perempuan 27,41%.
3. Balai Bitung mencapai 118,8%, peserta laki-laki 86,53%, perempuan 13,47%.
4. Balai Tegal mencapai 124,6%, peserta laki-laki 95,53%, perempuan 4,47%.
5. Balai Banyuwangi mencapai 171,8%, peserta laki-laki 57,80%, perempuan 42,20%.

Dari data tersebut, Balai Banyuwangi mencatat komposisi gender yang paling berimbang, sementara Balai Tegal memiliki persentase peserta perempuan terendah. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis pelatihan, terdapat variasi signifikan dalam partisipasi gender yakni Bidang Penangkapan Ikan dan Kepelautan didominasi laki-laki dengan persentase di atas 98%. Sebaliknya, pada bidang Pengolahan & Pemasaran dan Managerial, peserta perempuan lebih dominan dengan persentase masing-masing 75,93% dan 92,45%. Pelatihan Garam juga menunjukkan partisipasi perempuan yang cukup tinggi (64,74%).

Ketimpangan gender tersebut berakar pada segmentasi jenis pelatihan yang masih sangat kental dengan peran tradisional. Bidang-bidang teknis dan operasional lapangan seperti Penangkapan Ikan, Kepelautan, dan Mesin Perikanan hampir seluruhnya (lebih dari 98%) diisi oleh laki-laki. Di sisi lain, peran perempuan justru mendominasi pada

sektor-sektor hilir dan manajerial, seperti pada bidang Managerial yang mencapai 92,45% serta Pengolahan dan Pemasaran yang mencapai 75,93%. Secara keseluruhan, meskipun program ini sukses melampaui target target fisik, data ini merefleksikan adanya spesialisasi kerja berbasis gender yang masih sangat tegas di sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai perbandingan, capaian IKU Masyarakat dilatih ini jika dibandingkan dengan K/L lain (Badan P2SM LHK Tahun 2024) adalah sebagai berikut;

Tabel 27. Perbandingan Capaian IKU 3 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	Puslat – BPPSDM KKP (2025)	14.800	19.045	120%
2	Badan P2SM LHK (2024)	15.536	15.738	101.30%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP & LKJ BP2SM LHK 2024

Tabel ini menunjukkan data capaian masyarakat dilatih (untuk P2SM LHK disebut “masyarakat yang meningkat kompetensinya”) target Tahun 2025 untuk Puslat dan 2024 untuk Badan P2SM.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 14.800 Orang dan capaian 19.045 Orang yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Badan P2SM LHK dengan target 15.536 Orang dan capaian 15.738 Orang, yang berarti persentase capaian sebesar 101.30%

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan persentase capaian yang signifikan.

Adapun faktor penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini yakni:

1. Tingginya tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat KP dalam mengikuti kegiatan pelatihan, yang menunjukkan relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan.
2. Terjalannya kerja sama dan sinergi yang efektif dengan instansi daerah, pihak swasta, serta unsur masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan KP, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau sasaran yang lebih luas.
3. Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan, yang disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan riil masyarakat KP, sehingga materi pelatihan dapat diaplikasikan secara langsung dalam kegiatan usaha dan pekerjaan peserta.

4. Implementasi sistem pelatihan dengan metode blended learning, yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, serta didukung oleh peran aktif Penyuluh Perikanan di lapangan dalam mendampingi peserta selama proses pelatihan.
5. Ketersediaan Instruktur dan Widyaiswara yang kompeten dan berpengalaman, sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan pelatihan masyarakat, sehingga kualitas penyampaian materi dan proses pembelajaran dapat terjaga dengan baik.
6. Telah diperolehnya persetujuan (approval) program diklat awak kapal perikanan oleh lembaga yang berwenang bagi Balai Pelatihan di lingkup Pusat Pelatihan KP, yang memberikan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap mutu penyelenggaraan pelatihan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai dan mendukung, baik dari aspek fasilitas pembelajaran, peralatan praktik, maupun infrastruktur penunjang lainnya, sehingga pelaksanaan pelatihan masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
8. BLU BPPP Tegal secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan, serta berbagai lembaga swasta lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas sasaran peserta pelatihan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Masyarakat KP yang Dilatih sebagai berikut:

1. Pelatihan Ankapin dan Atkapin, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi awak kapal perikanan sesuai dengan standar internasional keselamatan, navigasi, dan operasional kapal.
2. Pelatihan BST-F dan Rating Awak Kapal, sebagai upaya penyiapan sumber daya manusia yang memenuhi standar keselamatan pelayaran dan operasional kapal sesuai dengan ketentuan regulasi maritim nasional.
3. Pelatihan Konservasi Sumber Daya Kelautan, yang memberikan edukasi dan peningkatan kapasitas terkait pelestarian ekosistem laut, termasuk rehabilitasi terumbu karang serta pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
4. dPelatihan SKN (Sertifikasi Kompetensi Nasional), yang diarahkan untuk memfasilitasi peserta dalam memperoleh sertifikasi kompetensi resmi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

5. Pelatihan SOPI (Sertifikasi Operator Pengolahan Ikan), yang bertujuan meningkatkan keterampilan pengolahan hasil perikanan pascapanen sesuai dengan standar mutu dan keamanan industri pangan berbasis hasil laut.
6. Pelatihan tematik berbasis potensi wilayah, yang disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan daerah, seperti pelatihan pengolahan rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pelatihan budidaya udang vaname di Provinsi Lampung.
7. Pelatihan digital (daring), yang diselenggarakan untuk memperluas akses pembelajaran melalui pemanfaatan platform digital dengan penyediaan materi interaktif dan tutorial berbasis video.
8. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi secara intensif, guna meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap program pelatihan yang akan dilaksanakan, sekaligus memastikan keterjangkauan informasi kepada calon peserta.
9. Penguatan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), melalui pelaksanaan pelatihan secara langsung di lokasi industri, sehingga peserta memperoleh pengalaman praktik kerja nyata dan pemahaman langsung terhadap standar kerja serta kebutuhan industri

Indikator Kinerja IKSK.01.04 - Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. PNBP yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan KP adalah dengan kegiatan Pelatihan, dan Sarana Prasarana Gedung dan Worskhop.

Data dukung capaian IKU ini berdasarkan Nota Dinas Kepala BPPSDM Nomor 178/BPPSDM.1/KU.340/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang capaian kinerja PNBP Satuan Kerja BPPSDM Tahun 2025.

Tabel 28. Capaian IKU 4 Tahun 2025

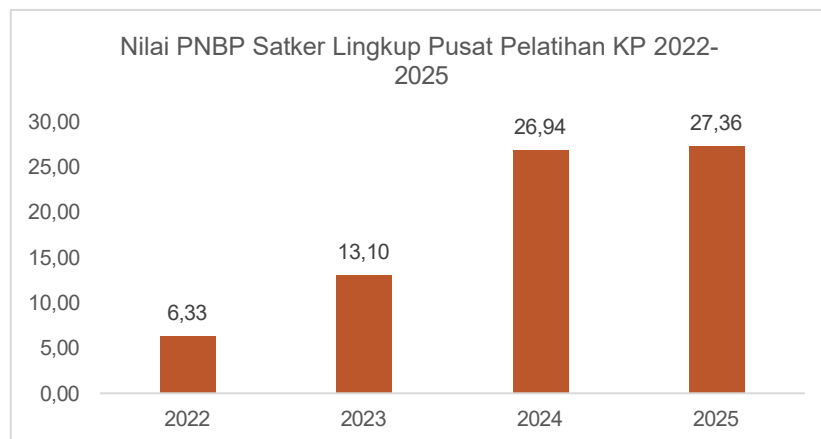
Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029

		6,33	13,10	26,94	15,59	27,36	175,50%	1,56%	15,59	175,50
--	--	------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	--------

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat progresif sejak tahun 2022. Tercatat pada tahun 2022 nilai PNBP berada di angka 6,33 miliar rupiah, kemudian melonjak signifikan menjadi 13,10 miliar rupiah pada tahun 2023, dan terus meningkat tajam hingga mencapai 26,94 miliar rupiah pada akhir tahun 2024. Lompatan nilai yang lebih dari empat kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun ini mengindikasikan optimalisasi layanan dan sarana prasarana yang semakin efektif dalam menghasilkan pendapatan negara.

Pada tahun berjalan 2025, performa realisasi PNBP melampaui ekspektasi dengan margin yang sangat lebar. Dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 15,59 miliar rupiah, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai 27,36 miliar rupiah, atau setara dengan tingkat capaian sebesar 175,47%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat kenaikan tipis sebesar 1,56%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan dipasang cukup moderat, organisasi mampu mempertahankan dan sedikit meningkatkan performa pendapatan tertingginya dibandingkan tahun lalu.



Gambar 7. Nilai PNBP Lingkup Pusat Pelatihan KP 2022-2025

Ditinjau berdasarkan satuan kerja, BPPP Tegal memberikan kontribusi realisasi terbesar dengan capaian sebesar Rp25.847.561.796 atau 181,23% dari target, sekaligus menjadi penopang utama pencapaian PNBP secara keseluruhan. Selanjutnya, BPPP Banyuwangi merealisasikan PNBP sebesar Rp402.849.385 atau 126,23%, BPPP Bitung sebesar Rp233.678.011 atau 123,90%, BPPP Ambon sebesar Rp778.364.570 atau 105,87%, dan BDA Sukamandi sebesar Rp41.111.780 atau 125,44%, yang seluruhnya melampaui target tahunan. Sementara itu, BPPP Medan merealisasikan PNBP sebesar

Rp57.172.492 atau 103,85%, yang tetap menunjukkan capaian di atas target meskipun relatif lebih moderat dibandingkan satuan kerja lainnya. Lebih detailnya, capaian PNBP tahun 2025 per balai adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rekap IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP

No.	SATKER	TARGET 2025 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BPPP Medan	55.052.000	57.172.492	103,85%
2	BPPP Tegal	14.262.371.000	25.847.561.796	181,23%
3	BPPP Banyuwangi	319.141.000	402.849.385	126,23%
4	BPPP Bitung	188.600.000	233.678.011	123,90%
5	BPPP Ambon	735.185.000	778.364.570	105,87%
6	BDA Sukamandi	32.775.000	41.111.780	125,44%
Total		15.593.124.000	27.360.738.034	175,47%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan pelatihan dan layanan pendukung yang menghasilkan PNBP di lingkungan Pusat Pelatihan KP berjalan efektif dan melebihi ekspektasi hingga 2025.

IKU PNBP diturunkan dari level 1 BPPSDMKP kepada satker dibawahnya, sebagai perbandingan, capaian beberapa satker lingkup BPPSDMKP di Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 30. Perbandingan Capaian IKU 4 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1	Pusluh - BPPSDMKP	1,37	1,66	120%
2	Puslat - BPPSDMKP	15,59	27,36	120%

Tabel ini menunjukkan data capaian target Tahun 2025 dari tiga satuan kerja di bawah BPPSDMKP.

1. Satuan kerja Pusluh - BPPSDMKP dengan target 1,37 dan capaian 1,66 Rupiah Milyar yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 15,59 dan capaian 27,36 Rupiah Milyar, yang berarti persentase capaian sebesar 120%.

Tabel ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 dengan persentase capaian yang signifikan. Adapun faktor penyebab keberhasilan PNBP pada Tahun 2025 disebabkan oleh:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada BPPP dan BDA, sehingga meningkatkan daya tarik dan kepercayaan pengguna jasa dalam memanfaatkan layanan sebagai sumber PNBP.

2. Tersedianya program pelatihan dan pendidikan yang relevan dan berbasis kebutuhan, baik bagi masyarakat maupun aparat, sehingga layanan yang diberikan memiliki nilai tambah dan tingkat permintaan yang tinggi.
3. Komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong optimalisasi PNBPN melalui penguatan kebijakan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan layanan.
4. Penerapan standar biaya dan tarif PNBPN yang jelas dan sesuai ketentuan, sehingga memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi pengguna jasa.
5. Ketersediaan instruktur yang profesional dan terakreditasi, yang menjamin mutu pelatihan dan meningkatkan minat peserta untuk mengikuti layanan berbayar.
6. Penerapan sistem tata kelola pelatihan yang transparan dan akuntabel, didukung oleh mekanisme pemesanan, pembiayaan, dan pelaksanaan berbasis digital.
7. Integrasi program pelatihan dengan regulasi sertifikasi, seperti Ankapin dan BST-F yang bersifat wajib bagi calon awak kapal, sehingga secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap layanan pelatihan.

Kegiatan pendukung capaian Indikator PNBPN lingkup Pusat Pelatihan KP adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerja sama strategis dengan perusahaan penangkapan ikan, sekolah perikanan, serta lembaga non-pemerintah (NGO) dalam rangka perekrutan peserta pelatihan, sehingga turut mendorong peningkatan penerimaan PNBPN.
2. Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PNBPN lainnya pada balai dan satuan kerja BLU, guna memperluas basis penerimaan negara.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada balai pelatihan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pengguna jasa.
4. Penguatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelatihan beserta fasilitas pendukungnya pada BPPP dan BDA, guna mendukung penyelenggaraan layanan yang efektif dan berdaya saing.
5. Penyelenggaraan pelatihan berbayar secara rutin, seperti Ankapin, Atkapin, BST-F, dan Rating Awak Kapal, dengan pengelolaan kapasitas kelas yang optimal.
6. Penerapan digitalisasi layanan PNBPN, melalui sistem reservasi dan pembayaran daring, guna meningkatkan kemudahan akses serta transparansi layanan pelatihan dan pemanfaatan fasilitas.
7. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi secara berkelanjutan melalui berbagai media elektronik, untuk meningkatkan jangkauan dan pemanfaatan layanan.

Indikator Kinerja IKSK.01.05 - Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Sebagai upaya pengakuan dan perlindungan atas kompetensi yang dimiliki oleh SDM KP, khususnya tenaga kerja sektor KP, maka Pusat Pelatihan KP melalui Balai Diklat pada tahun 2025 telah menetapkan target untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi SDM KP sebanyak 2.900 orang (PK Agustus).

BPPSDM sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP, sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab atas pencapaian IKU tersebut, dengan indikator yang hendak dicapai adalah jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberi kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi dibawah dan dibentuk oleh BNSP dan lembaga diklat yang merupakan approval untuk melakukan diklat kepelautan internasional dengan mengacu pada standar SKKNI, SK3, dan IMO Course.

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui kegiatan sertifikat kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai tugas/jabatan yang dimiliki sesuai standar kompetensi yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sertifikasi kompetensi ini juga memberikan manfaat kepada perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan remunerasi sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki.

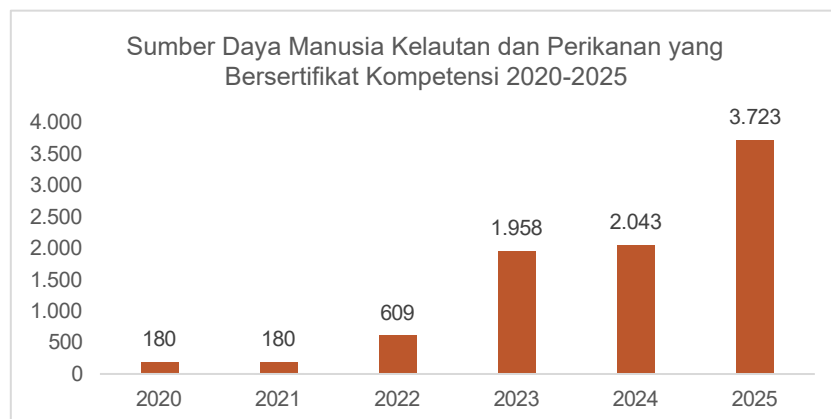
Data dukung capaian IKU ini telah disampaikan melalui memorandum Kepala Pusat Pelatihan KP kepada Kepala BPPSDMKP Nomor 42/BPPSDM.4/RC.610/I/2026 tanggal 15 Januari 2026, rekapitan data capaian indikator kinerja SDM KP yang bersertifikat kompetensi adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Capaian IKU 5 Tahun 2025

Realisasi TW 4	2025	Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029
----------------	------	-------------------------------------

2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
180	180	609	1.958	2.043	2.900	3.723	128,38%	82,23%	24.500	15,20

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 8. Grafik Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi Tahun 2020-2024

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir. Dimulai dengan angka yang stabil sebanyak 180 orang pada tahun 2020 dan 2021, realisasi mulai melonjak signifikan menjadi 609 orang pada tahun 2022. Tren peningkatan tajam ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan 1.958 orang dan mencapai 2.043 orang pada tahun 2024, yang mencerminkan akselerasi program sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di sektor ini.

Pada tahun berjalan 2025, performa indikator ini mencatatkan hasil yang sangat positif melampaui target tahunan. Dari target yang ditetapkan sebesar 2.900 orang, institusi berhasil merealisasikan sertifikasi bagi 3.723 orang, atau setara dengan tingkat capaian sebesar 128,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat kenaikan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 82,23%. Lonjakan ini menunjukkan adanya perluasan akses atau peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi dalam melayani kebutuhan masyarakat di tahun 2025.

Ditinjau dari rencana strategis jangka panjang (Renstra BPPSDMKP 2025-2029), target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak 24.500 orang. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 3.723 orang, maka persentase capaian terhadap target 2029 saat ini berada pada angka 15,20%. Meskipun perjalanan menuju target akhir masih cukup panjang, tren pertumbuhan yang eksponensial dalam beberapa tahun terakhir memberikan optimisme bahwa sasaran di tahun 2029 dapat tercapai melalui keberlanjutan program sertifikasi yang masif

Tabel 32. Rekap Sertifikasi Kompetensi per Satker

No	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1	BPPP Tegal	2.900	3.723	120

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP), tercatat jumlah peserta yang memperoleh sertifikasi kompetensi sebanyak 3.723 orang. Seluruh pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut dilaksanakan terpusat di BPPP Tegal, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada balai pelatihan lainnya, sehingga kegiatan sertifikasi difokuskan pada satuan kerja yang memiliki kesiapan sarana, prasarana, serta kapasitas layanan yang memadai.

Tabel 33. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi perbidang usaha

No	Satker	Mesin Perikanan	Budidaya	Penangkapan	Pengolahan & Pemasaran	Manajemen
1	BPPP Tegal	42	11	3.665	3	2

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Ditinjau berdasarkan bidang sertifikasi, capaian terbesar berasal dari bidang Penangkapan dengan jumlah peserta tersertifikasi sebanyak 3.665 orang, yang mencerminkan tingginya kebutuhan sertifikasi kompetensi pada subsektor tersebut. Selanjutnya, bidang Mesin Perikanan merealisasikan 42 orang, bidang Budidaya sebanyak 11 orang, bidang Pengolahan dan Pemasaran sebanyak 3 orang, serta bidang Manajemen sebanyak 2 orang.

Sebagai perbandingan, capaian SDM yang bersertifikasi kompetensi ini jika dibandingkan dengan K/L lain (Badan P2SM LHK Tahun 2024) adalah sebagai berikut;

Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU 5 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	Puslat – BPPSDM KKP (2025)	2.900	3.723	120%
2	Badan P2SM LHK (2024)		1.677	

Tabel ini menunjukkan data capaian SDM yang bersertifikasi kompetensi (untuk P2SM LHK, SDM bersertifikasi kompetensi ini masuk kedalam komponen “masyarakat yang meningkat kompetensinya” sehingga targetnya digabung dengan komponen lain dan perbandingan yang bisa dilakukan hanya pada capaian saja) target Tahun 2025 untuk Puslat dan 2024 untuk Badan P2SM.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 2.900 Orang dan capaian 3.723 Orang yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Badan P2SM LHK dengan capaian Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi 1.677 Orang.

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan persentase capaian yang signifikan.

Adapun faktor penyebab keberhasilan IKU SDM KP yang bersertifikasi kompetensi pada Tahun 2025 disebabkan oleh:

1. Pusat pelatihan KP melalui Balai telah memiliki LSP dibidang KP, Akuakultur serta Konservasi dan Jasa Kelautan dan telah tersertifikasi dan terpercaya;
2. Penerapan regulasi tentang sertifikasi awak kapal;
3. Pelatihan disusun berdasarkan SKKNI dan standar industri yang relevan.
4. Tenaga pengajar bersertifikat dari industri dan lembaga pelatihan meningkatkan mutu pelatihan.
5. Kemudahan dalam memperoleh informasi dan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan;
6. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pusat Pelatihan KP dengan UPT lingkup BPPSDM KP, UPT DJPT, serta lembaga mitra (LMTC) dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
7. Dukungan sistem digital melalui aplikasi Akapi dan E-LAUT yang mempermudah proses perencanaan, pendaftaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pelatihan. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi layanan, akurasi data, serta akuntabilitas kinerja Tim Kerja.

Kegiatan pendukung capaian IKU SDM KP yang bersertifikasi kompetensi pada Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan BNSP dalam kegiatan uji sertifikasi, Memperpanjang akreditasi balai pelatihan sebagai tempat TUK;
2. Telah terimplementasinya penerbitan sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan yang sesuai SOP oleh Pusat Pelatihan KP;
3. Melakukan pendampingan proses approval Program Diklat Awak Kapal Perikanan khususnya di Balai Pelatihan KKP.
4. Implementasi kerja sama dengan lembaga mitra pemerintah (JK, AP2HI, WWF, DFW, dan lembaga mitra lainnya dalam hal program capacity bulding peningkatan kualitas SDM KP

5. Implementasi dan optimalisasi aplikasi E-LAUT, yang mencakup digitalisasi siklus pelatihan, penerbitan e-sertifikat, database instruktur dan modul, serta sistem monitoring dan evaluasi.
6. Sosialisasi penggunaan E-LAUT kepada unit pelaksana.

Indikator Kinerja IKSK.01.06 - Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa)

SFV merupakan konsep pengembangan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village (SFV)

Sesuai dengan Keputusan Ka BPPSDM, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/ Smart Fisheries Village SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan. IKU ini memiliki data dukung berupa laporan kegiatan dukungan/fasilitasi sarana pada lokasi SFV BPPSDMKP, Adapun di Tahun 2025, Kegiatan fasilitasi ini dilakukan di Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Tabel 35. Capaian IKU 6 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					1,00	1,00	100,00%	-	1,00	100,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 9. Kegiatan Fasilitas SFV di Desa Ngablak

Program Smart Fisheries Village (SFV) dilaksanakan di Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebuah wilayah yang secara geografis memiliki karakteristik lahan kering dan kritis. Kegiatan utama dalam program ini adalah pembangunan infrastruktur modern berupa 20 unit Kolam Bundar Terpal (KBT) berdiameter 3 meter, yang disertai dengan implementasi teknologi budidaya intensif ikan lele mutiara menggunakan sistem probiotik. Fase pembangunan fisik dilakukan secara intensif pada Januari 2025, hingga seluruh fasilitas dinyatakan siap untuk uji coba layak fungsi pada tanggal 31 Januari 2025.

Output dari kegiatan ini mencakup tersedianya fasilitas budidaya yang fungsional serta pencapaian target produksi yang signifikan sebesar 4,25 ton per siklus pemeliharaan selama 50–60 hari. Program ini juga berhasil memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pembentukan kelompok usaha, seperti Pokdakan Mina Lemah Mendak Ngablak dan Poklahsar Mina Rahayu Ngablak, serta pelatihan diversifikasi produk olahan ikan. Dengan target efisiensi pakan (FCR) 1:1 dan tingkat kelangsungan hidup (SR) 85%, program ini memvalidasi model akuakultur yang efisien dan berkelanjutan untuk lahan marjinal.

Adapun faktor penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini yakni:

1. Komitmen Pemerintah dan Visi Strategis: Program ini didukung penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai perwujudan visi Ekonomi Biru untuk menciptakan ekosistem perikanan yang efisien dan berkelanjutan.

2. Adaptasi Teknologi di Lahan Marjinal: Penggunaan teknologi Kolam Bundar Terpal (KBT) yang memungkinkan budidaya dengan pertukaran air minimal sangat cocok untuk karakteristik lahan kering dan kritis di Desa Ngablak.
3. Kapabilitas SDM dan Pendampingan: Keterlibatan aktif Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dalam memberikan pendampingan teknis dan investasi pada peningkatan kapasitas SDM lokal menjadi komponen krusial.
4. Kelembagaan Lokal yang Kuat: Pembentukan kelompok usaha yang memiliki struktur organisasi dan aturan yang jelas membantu memastikan koordinasi dan keberlanjutan usaha.
5. Efisiensi Operasional yang Tinggi: Penerapan target kinerja yang ketat, seperti Rasio Konversi Pakan (FCR) 1:1 dan tingkat kelangsungan hidup (SR) 85%, untuk menjamin nilai ekonomi proyek.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya IKU ini yakni:

1. Pembangunan Infrastruktur (Konstruksi Cepat): Melaksanakan pengerjaan fisik secara intensif pada Januari 2025, meliputi pemasangan 20 unit kolam KBT, instalasi sistem pengairan dan aerasi, serta pengerasan area dengan paving blok untuk menjaga sanitasi.
2. Manajemen Budidaya Intensif: Menerapkan strategi pembesaran Ikan Lele Mutiara dengan sistem probiotik yang mencakup persiapan media air (sterilisasi dan penumbuhan fitoplankton) serta manajemen pakan yang presisi.
3. Peningkatan Kapasitas SDM: Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seperti pelatihan budidaya ikan hias dan pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Penguatan Kelembagaan: Membentuk kelompok usaha perikanan, yaitu Pokdakan Mina Lemah Mendak Ngablak dan Poklahsar Mina Rahayu Ngablak pada April 2025.
5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas air secara harian dan mingguan serta menguji coba kelayakan fungsi seluruh fasilitas sebelum operasional penuh

Indikator Kinerja IKS.01.07 - Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis Kaji Widya (paket)

Salah satu Penyelenggaraan fungsi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan upaya menjadikan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur sektor kelautan dan perikanan dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional. Untuk lebih

meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, salah satu strategi yang ditempuh adalah secara terus menerus meningkatkan profesionalisme para pelatih.

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan KP yang ditetapkan adalah diterapkannya kurikulum berdasarkan kompetensi kerja dimana pelaksanaan proses berlatih dan melatih dengan menggunakan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GGBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu hasil pelatihan yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta yang lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya pelatih yang profesional, yakni pelatih yang menguasai dan mampu melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna. Untuk meningkatkan serta mendorong tumbuhnya sikap lebih percaya diri para pelatih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap pelatih di Lembaga Pelatihan perlu melaksanakan kajiwidya sesuai dengan materi yang dilatihkan.

Kajiwidya adalah kegiatan pelatih untuk belajar atau berlatih sendiri, melakukan, mengamati dan menganalisis suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja pelatih sesuai dengan substansi mata diklat. Pelatih lembaga pelatihan terdiri dari widyaiswara, instruktur, dan widyaiswara/instruktur luar biasa.

Pada Tahun 2025, BPPP Bitung melaksanakan Kaji Terap dengan judul "Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Limbah Hasil Perikanan", yang dikategorikan dalam jenis materi Pengolahan & Pemasaran. Program ini dikembangkan dan disampaikan oleh empat orang WI/Instruktur, yaitu Trixa P. Rumajar, Ir. Treesje Supit, Ir. Janetie Waatung, dan Frine F. Tuiju, yang memiliki kompetensi di bidang ilmu perikanan. Sebagai output nyata, kaji terap ini telah menghasilkan 4 modul bahan ajar yang komprehensif, dimulai dari pengenalan konsep POC, panduan teknis pembuatannya, analisis kelayakan usahanya, hingga langkah-langkah aplikasinya pada tanaman.

BPPP Banyuwangi menyelenggarakan Kaji Terap dengan fokus pada Mesin Perikanan, berjudul "Merakit dan Mengoperasikan Alat Peniris Minyak (Spinner) Multispeed pada Produk Perikanan". Materi ini diampu oleh sebuah tim yang terdiri dari enam orang ahli dan praktisi, yakni Erika Arisetiana Dewi, Rita Yuliati, Pradita Puspasari, Ricky Aditya Saputra, Iman Setya Dwi Ardani, dan Emi Wati. Untuk mendukung pelatihan, kaji terap ini telah melahirkan 6 bahan ajar yang mencakup aspek mekanisasi, perakitan dan

pengoperasian alat spinner, pembuatan produk turunan seperti abon dan kerupuk ikan, serta analisis usaha dari penerapan alat tersebut.

Tabel 36. Capaian IKU 7 Tahun 2025

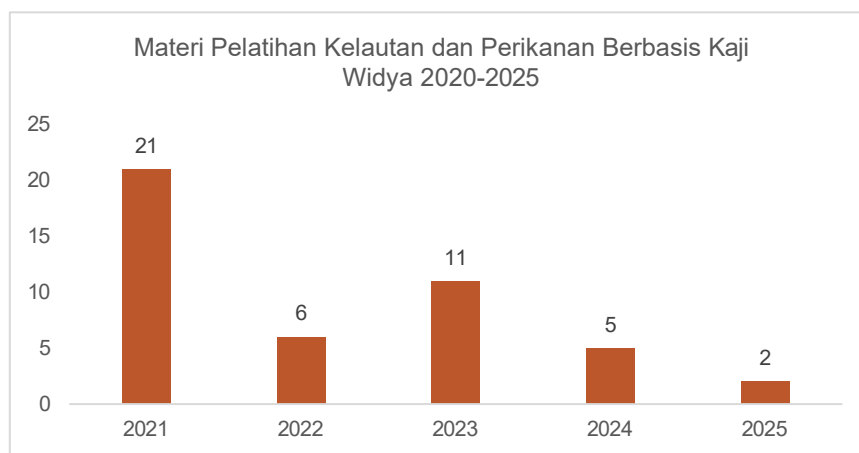
Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
	21	6	11	5	1	2	200,00%	-60,00%	12	16,67

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Tabel 33 menunjukkan Perkembangan realisasi capaian IKU pada triwulan keempat menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2021, tercatat capaian tertinggi sebesar 21 paket, namun angka ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi hanya 6 paket. Meskipun sempat menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2023 dengan kenaikan menjadi 11 paket, angka tersebut kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 5 paket. Dinamika ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi jumlah paket pelatihan yang dihasilkan setiap tahunnya.

Memasuki tahun 2025, performa realisasi menunjukkan hasil yang sangat positif jika dibandingkan dengan target tahunan yang ditetapkan. Dengan target hanya sebesar 1 paket, realisasi yang berhasil dicapai adalah 2 paket, yang berarti persentase capaian melampaui target hingga 200,00%. Namun, jika dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2024 yang berjumlah 5 paket, terdapat penurunan pertumbuhan (growth) sebesar -60,00%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target minimal tahun 2025 terpenuhi dengan sangat baik, volume output secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan sasaran jangka panjang yang tertuang dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak 12 paket. Dengan realisasi saat ini di tahun 2025 yang berjumlah 2 paket, maka persentase capaian terhadap target akhir 2029 baru menyentuh angka 16,67%. Angka ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat selisih (gap) sebesar 10 paket yang perlu dikejar dalam empat tahun ke depan guna memastikan target strategis di akhir periode rencana strategis dapat terpenuhi sepenuhnya.



Gambar 10. Grafik Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya Tahun 2020-2025

Tabel 37. Rekap Judul Kajian dan Modul yang dihasilkan Tahun 2025

No	Satker	Kaji Terap	Modul	Target	Realisasi
1	BPPP Bitung	Pupuk Organik Cair (POC)	Mengenal POC, Pembuatan POC dari Limbah, Menganalisa Usaha Produk POC, Melakukan Aplikasi POC pada Tanaman	1	2
2	BPPP Banyuwangi	Spinner	Analisa Usaha, Merakit Alat, Pengeproasian Alat, Mekanisme dalam Pengolahan Produk Perikanan, Pembuatan Produk Abon Ikan, Pembuatan Produk Kerupuk Ikan		

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Sebagai perbandingan, capaian IKU Kaji Widya beberapa satker lingkup BPPSDMKP di Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 38. Perbandingan Capaian IKU 9 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1	Puslat - BPPSDMKP	1	2	120%
2	Pusdik - BPPSDMKP	9	13	120%
3	Pusluh – BPPSDMKP	1	1	100%

Tabel ini menunjukkan data capaian target Tahun 2025 dari tiga satuan kerja di bawah BPPSDMKP Adapun untuk IKU nya memiliki penamaan yang berbeda namun substansinya serupa.

1. Satuan kerja Puslat (Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis Kaji Widya (paket) - BPPSDMKP dengan target 1 dan capaian 2 Paket yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Satuan kerja Pusluh (Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)) - BPPSDMKP dengan target 1 dan capaian 1 Paket, yang berarti persentase capaian sebesar 100%.

3. Satuan kerja Pusdik (Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)) - BPPSDMKP dengan target 9 dan capaian 13 Paket, yang berarti persentase capaian sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2025.

Keberhasilan capaian IKU kaji terap pada kedua balai didukung oleh beberapa faktor ini:

1. Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan balai, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Sumber daya manusia yang kompeten, dengan tim pelaksana yang terdiri dari widyaiswara dan instruktur berpendidikan tinggi serta berpengalaman di bidangnya.
3. Perencanaan yang sistematis dan berbasis kebutuhan nyata, seperti pengolahan limbah perikanan di Bitung dan peningkatan efisiensi produksi olahan di Banyuwangi.
4. Pemanfaatan anggaran yang efektif dan transparan, dengan sumber dana dari DIPA Pusat Pelatihan KP 2025 yang dipertanggungjawabkan secara rinci.
5. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti laboratorium pengujian, akademisi, praktisi, dan pelaku UMKM, yang memperkaya validasi dan aplikasi hasil kajian.
6. Diseminasi hasil yang komprehensif melalui seminar, pameran (seperti Sulut Riset dan Inovasi Expo 2025), serta penyusunan bahan ajar siap pakai.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan untuk mencapai IKU meliputi:

1. Seminar proposal dan hasil kaji terap yang melibatkan narasumber ahli, stakeholders, dan masyarakat untuk evaluasi dan masukan.
2. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar yang langsung dapat diimplementasikan dalam pelatihan berbasis kompetensi.
3. Uji laboratorium dan pengujian produk untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas teknologi yang dikembangkan.
4. Aplikasi lapangan dan uji coba produk, seperti pengujian POC pada tanaman pakcoy dan pengujian spinner pada abon dan kerupuk ikan.
5. Publikasi dan pameran inovasi, seperti partisipasi dalam Sulut Riset dan Inovasi Expo 2025, yang memperluas dampak sosial dan ekonomi hasil kaji terap.
6. Penyusunan laporan lengkap yang mendokumentasikan seluruh proses, hasil, analisis biaya, dan modul untuk adopsi lebih luas oleh Lembaga pelatihan.

Indikator Kinerja IKS.01.08 - Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)

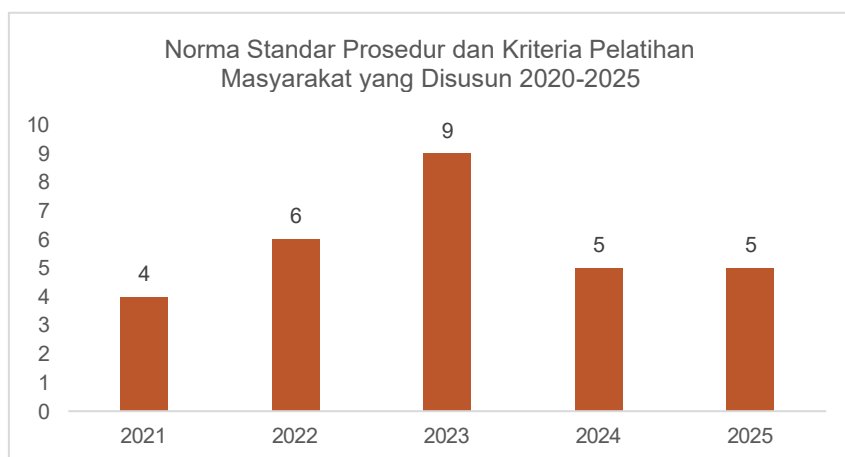
Ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten perlu diimbangi dengan tersedianya regulasi yang baik, sehingga dapat menjadi standar advokasi dalam mencermati kendala dan permasalahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan bahan yang komprehensif serta input yang terintegrasi melalui pentahapan proses pembahasan dan penyelesaiannya khususnya dalam memberikan dasar yang kuat untuk melakukan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan terhadap pengurangan pengentasan kemiskinan.

Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait standarisasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan yang akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian. Selain itu Sertifikasi kompetensi kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait Sertifikasi kompetensi atau tenaga kerja yang telah atau tenaga kerja yang berpengalaman. Selain itu aturan dan pedoman untuk penyusunan Modul dan kurikulum pelatihan aparatur dan pelatihan Masyarakat KP.

Tabel 39. Capaian IKU 8 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
	4	6	9	5	3	5	166,67%	0,00%	20	25,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 11. Grafik Capaian NSPK Tahun 2020-2025

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), jumlah NSPK yang disusun menunjukkan tren yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2021 dengan 4 dokumen, jumlah ini meningkat secara bertahap menjadi 6 dokumen pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya sebanyak 9 dokumen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah dokumen yang disusun mengalami penurunan kembali menjadi 5 dokumen, yang mengindikasikan adanya dinamika dalam kebutuhan penyusunan regulasi teknis pelatihan setiap tahunnya.

Pada tahun berjalan 2025, kinerja penyusunan NSPK mencatatkan hasil yang melampaui target tahunan. Dengan target yang ditetapkan sebanyak 3 dokumen, realisasi yang berhasil dicapai adalah 5 dokumen, sehingga persentase capaian kinerjanya menyentuh angka 166,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang juga berjumlah 5 dokumen, maka persentase kenaikan pertumbuhan berada pada angka 0,00%. Hal ini menunjukkan bahwa institusi mampu mempertahankan konsistensi output yang sama dengan tahun sebelumnya meskipun target yang dipatok lebih rendah.

Ditinjau dari rencana strategis jangka panjang (Renstra BPPSDMKP 2025-2029), target akhir yang harus dipenuhi pada tahun 2029 adalah sebanyak 20 dokumen NSPK. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 5 dokumen, maka persentase capaian terhadap target akhir 2029 adalah sebesar 25,00%. Angka ini memberikan gambaran bahwa organisasi telah memenuhi seperempat dari total kebutuhan NSPK untuk periode lima tahun ke depan, dengan sisa 15 dokumen lagi yang perlu disusun secara bertahap hingga akhir periode renstra.

Tabel 40. Rekap IKU 8 2025

Judul NSPK	Penanggung Jawab	Yang Mengesahkan	Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2024 tentang <i>Corporate University</i> Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Pelatihan	Menteri KP	NOMOR 49 TAHUN 2025	25 Agustus 2025
Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Fungsi <i>Corporate University</i> Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Pelatihan	Kepala BPPSDMKP	NOMOR 209 TAHUN 2025	16 Mei 2025
Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Skema Supervisi Pelatihan pada <i>Corporate University</i> Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pusat Pelatihan	Kepala BPPSDMKP	NOMOR 395 TAHUN 2025	10 November 2025
Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Pusat Pelatihan	Kepala BPPSDMKP	NOMOR 438/2025	23 Desember 2025

Judul NSPK	Penanggung Jawab	Yang Mengesahkan	Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Penanganan Ikan	Pusat Pelatihan	Kepala BPPSDMKP	NOMOR 437 TAHUN 2025	23 Desember 2025

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Pada tahun 2025, Pusat Pelatihan KP berhasil melampaui target IKU penyusunan NSPK pelatihan dan sertifikasi. Dari target 3 dokumen, terealisasi sebanyak 5 dokumen (166,67%) yang disahkan secara resmi oleh Kepala BPPSDM KP hingga Menteri Kelautan dan Perikanan. Kelima NSPK tersebut mencakup aspek strategis hingga teknis, seperti fungsi Corporate University, supervisi, kurikulum, serta standar mutu pelatihan. Capaian ini menjadi fondasi regulasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelatihan di lingkungan KKP.

Sebagai perbandingan, capaian IKU NSPK beberapa satker lingkup BPPSDMKP di Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 41. Perbandingan Capaian IKU 8 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1	Puslat - BPPSDMKP	3	5	120%
2	Pusluh - BPPSDMKP	4	6	120%
3	Pusdik – BPPSDMKP	1	3	120%

Tabel ini menunjukkan data capaian target Tahun 2025 dari tiga satuan kerja di bawah BPPSDMKP.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 3 dan capaian 5 NSPK yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Satuan kerja Pusluh - BPPSDMKP dengan target 4 dan capaian 6 NSPK, yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
3. Satuan kerja Pusdik - BPPSDMKP dengan target 1 dan capaian 3 NSPK, yang berarti persentase capaian sebesar 120%.

Tabel ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 dengan persentase capaian yang signifikan. Adapun keberhasilan melampaui target ini didukung oleh faktor-faktor kunci berikut:

1. Kepemimpinan dan Fokus Strategis: Adanya arahan dan prioritas yang jelas dari pimpinan Pusat Pelatihan KP untuk menyelesaikan dan memperkuat kerangka regulasi pelatihan sebagai bagian dari pengembangan Corporate University KKP.

2. Perencanaan yang Komprehensif dan Tepat Sasaran: Penyusunan NSPK dilakukan dengan memetakan kebutuhan regulasi dari tingkat kebijakan makro (perubahan keputusan menteri) hingga pedoman teknis operasional (seperti standar mutu penanganan ikan), sehingga menghasilkan paket regulasi yang utuh dan aplikatif.
3. Koordinasi dan Kolaborasi Internal yang Solid: Sebagai penanggung jawab, Pusat Pelatihan KP berhasil mengkoordinasikan berbagai sumber daya dan keahlian di dalam unitnya untuk menyusun draf NSPK yang berkualitas dan sesuai dengan dinamika kebutuhan pelatihan.
4. Sinergi dengan Pimpinan Tingkat Atas: Hubungan kerja yang baik dan proses komunikasi yang efektif dengan Kepala BPPSDMKP dan Menteri KP memfasilitasi percepatan proses pengkajian, persetujuan, dan pengesahan dokumen-dokumen penting tersebut.
5. Disiplin dalam Pelaksanaan dan Deadline: Kemampuan tim untuk mengelola waktu dan proses secara disiplin, terlihat dari terselesaikannya dokumen dalam tenggat waktu yang berjenjang sepanjang tahun.

Untuk mencapai dan melampaui target tersebut, Pusat Pelatihan KP telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendukung yang sistematis:

1. Identifikasi Kebutuhan Regulasi: Melakukan analisis gap dan kebutuhan untuk menentukan prioritas dokumen NSPK mana yang paling mendesak dan strategis untuk disusun.
2. Penyusunan Draft dan Kajian Substansi: Membentuk tim perumus untuk menyusun draft NSPK berdasarkan kajian literatur, best practice, dan kebutuhan lapangan, dengan fokus pada aspek legalitas dan implementasi.
3. Proses Pembahasan dan Revitalisasi Internal: Mengadakan forum diskusi, rapat teknis, dan kajian ulang internal di lingkungan Pusat Pelatihan KP untuk menyempurnakan draft sebelum diajukan.
4. Pengajuan dan Proses Administratif Pengesahan: Menyiapkan dokumen administratif lengkap dan mengajukan draft NSPK melalui jalur hierarki yang berlaku kepada pejabat berwenang (Kepala BPPSDMKP dan Menteri KP) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
5. Finalisasi dan Publikasi Dokumen Resmi: Memastikan dokumen yang telah disahkan dengan nomor dan tanggal resmi terdokumentasi dengan baik dan siap didiseminasikan kepada unit pelaksana teknis di bawahnya (seperti BPPP) dan pemangku kepentingan terkait.

Indikator Kinerja IKSK.01.09 -Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah jejaring dan/atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan KP maupun UPT Pelatihan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati terkait kegiatan pelatihan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati dalam bentuk Kepmen, SK, MOU, dan atau KAK yang sudah di tandatangani. IKU dari sasaran strategis terselenggaranya kegiatan pelatihan KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan ini menggambarkan inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Pusat Pelatihan KP yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sebagai upaya lanjutan dari *Output* yang telah dihasilkan untuk menjadi *input* pada proses selanjutnya.

Adapun capaian IKU Kerjasama di Tahun 2025 ini adalah :

Tabel 42. Capaian IKU 9 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
9	13	14	16	15	12	15	125,00%	0,00%	25	60,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 12. Grafik Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti Tahun 2020-2025

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), jumlah dokumen jejaring dan kerjasama menunjukkan tren perkembangan yang cukup stabil dengan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2020 dengan 9 dokumen, jumlah kerjasama tumbuh menjadi 13 dokumen pada 2021, lalu meningkat tipis menjadi 14

dokumen pada 2022, dan mencapai angka tertinggi sebanyak 16 dokumen pada tahun 2023. Meskipun sempat terkoreksi sedikit menjadi 15 dokumen pada tahun 2024, performa ini menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam membangun kemitraan strategis.

Pada tahun berjalan 2025 berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen pendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) telah melampaui target yang ditetapkan untuk Triwulan IV tahun 2025. Target awal yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebanyak 12 jejaring/kerja sama, dengan realisasi yang dicapai sebanyak 15 kerja sama. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 125%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui ekspektasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga berjumlah 15 dokumen, maka persentase kenaikan pertumbuhan berada pada angka 0,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa institusi berhasil mempertahankan volume kerjasama yang sama kuatnya dengan tahun sebelumnya meskipun menetapkan target yang lebih konservatif.

Ditinjau dari sasaran rencana strategis jangka panjang (Renstra BPPSDMKP 2025-2029), target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak 25 dokumen. Dengan realisasi saat ini di tahun 2025 sebesar 15 dokumen, maka persentase capaian terhadap target 2029 telah mencapai 60,00%. Posisi ini sangat menguntungkan bagi organisasi karena lebih dari separuh target lima tahunan telah terpenuhi di tahun pertama periode Renstra, memberikan ruang yang cukup luas untuk pengembangan kualitas kerjasama pada tahun-tahun mendatang.

Berikut detail dari kerjasama yang ditandatangani tahun di Tahun 2025:

Tabel 43. Rekap Perjanjian Kerjasama Tahun 2025

NO	Bentuk Kerjasama	Nomor Kerjasama	Penanggung Jawab	Mitra Kerjasama	Periode	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup
1	Perjanjian Kerja Sama	1/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	BPPP TEGAL	PT PALOMA SEJATI	21 Januari 2025 - 21 Januari 2027	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan Bagi Calon Awak Kapal	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi; dan b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan
2	Perjanjian Kerja Sama	18/BPPSDM/KKP/PII/2025	BPPP TEGAL	PT. ABYSATYA MINA ANJAYA	27 Februari 2025 - 27 Februari 2027	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan Bagi Calon Awak Kapal Perikanan	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi; dan b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan
3	Perjanjian Kerja Sama	20/BPPSDM/KKP/PKS/III/2025	BPPP TEGAL	CV. SAMUDRA HIDUP AGUNG	03 Maret 2025 - 03 Maret 2027	Pelatihan Kelautan Perikanan, Layanan Dokumen Pengawakan Kapal Ikan Bagi Calon Awak Kapal Perikanan	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi; b. Pengurusan dokumen awak kapal perikanan bagi awak kapal perikanan; dan c. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan
4	P0. erjanjian Kerja Sama	26/BPPSDM/KKP/PKS/III/2025	BPPSDMKP	Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	26 Maret 2025 - 26 Maret 2027	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia di Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Peningkatan promosi dan kerjasama dalam perluasan kesempatan kerja sektor perikanan dan kelautan; b. Pelaksanaan pemetaan potensi calon pekerja Migran Indonesia dari calon alumni dan alumni pendidikan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Para Pihak; c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia e. Penguatan kapasitas Kelembagaan vokasi kelautan dan perikanan;

NO	Bentuk Kerjasama	Nomor Kerjasama	Penanggung Jawab	Mitra Kerjasama	Periode	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup
							f. Pemetaan lembaga sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan
5	Perjanjian Kerja Sama	27/BPPSDM/KKP/ PKS/III/2025	BPPSDMKP	Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	26 Maret 2025 - 26 Maret 2027	Penyiapan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Pemetaan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan serta Sumber Daya Manusia Aparatur c. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan d. Berbagi pakai data dan informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan termasuk pengembangan sistem informasi penempatan; dan e. pemantauan dan evaluasi penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan
6	Perjanjian Kerja Sama	28/BPPSDM/KKP/ PKS/III/2025	BPPSDMKP	Direktorat Jenderal Perlindungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	26 Maret 2025 - 26 Maret 2027	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	a. Pengawasan, pencegahan, dan penindakan terkait penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan c. pemberian asistensi perlindungan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur PARA PIHAK; e. berbagi pakai data dan informasi sumber daya manusia termasuk instrumen perlindungan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan
7	Perjanjian Kerja Sama	29/BPPSDM/KKP/ PKS/III/2025	BPPSDMKP	Direktorat Jenderal Pemberdayaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	26 Maret 2025 - 26 Maret 2027	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	a. Pengembangan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan terkait literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi; b. Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif sektor kelautan dan perikanan bagi Pekerja Migran Indonesia c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur PARA PIHAK d. Pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi purna Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke Indonesia

NO	Bentuk Kerjasama	Nomor Kerjasama	Penanggung Jawab	Mitra Kerjasama	Periode	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup
							e. penyebarluasan informasi terkait program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di sektor kelautan dan perikanan f. Berbagi pakai data dan informasi terkait pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
8	Perjanjian Kerja Sama	52/BPPSDM/KKP/ PKS/VIII/2025	BPPP AMBON	Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat	25 Agustus 2025 – 25 Agustus 2028	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat
9	Perjanjian Kerja Sama	56/BPPSDM/KKP/ PKS/V/2025	BPPP BANYUWANGI	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Probolinggo	2 Mei 2025 – 2 Mei 2028	Peningkatan Kompetensi Bagi Siswa/Siswi SMKN 4 Probolinggo	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, serta sertifikasi; b. pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan
10	Perjanjian Kerja Sama	60/BPPSDM/KKP/ PKS/IX/2025	BPPP AMBON	PT. PELINDO TERMINAL PETIKEMAS DAN MUTIARA PELINDO	1 Oktober 2025 – 31 Desember 2025	Pemberdayaan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Pengembangan Usaha Budidaya Lobster dan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan di Kawasan Smart	a. Pelatihan dan Pendampingan penyuluhan bagi kelompok pembudidaya di kawasan Smart Fisheries Village Desa Poka terkait keterampilan, manajemen usaha, serta penerapan teknologi budaya lobster laut. b. Diversifikasi dan pengembangan produk olahan hasil perikanan bagi perempuan di kawasan Smart Fisheries Village Desa Poka untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar dan peningkatan pendapatan. c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung budidaya lobster laut maupun pengolahan hasil perikanan d. Pelaksanaan kegiatan pendederan dan penggolondongan benih bening lobster untuk kemudian dilanjutkan pembersaran oleh para pembudidaya di kawasan Smart Fisheries Village Desa Poka.

NO	Bentuk Kerjasama	Nomor Kerjasama	Penanggung Jawab	Mitra Kerjasama	Periode	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup
						Fisheries Village Desa Poka - Kota Ambon	e. Pendederan dan penggelondongan benih bening lobster untuk dilanjutkan pembesarnya oleh pembudidaya di kawasan Smart Fisheries Village Desa Poka. f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja sama. g. Branding.
11	Perjanjian Kerja Sama	46/BPPSDM/KKP/ PKS/VII/2025	BPPP TEGAL	KLINIK UTAMA PERMATA AS SYIFA	1 Agustus 2025 – 1 Agustus 2028	Pemberian Pelayanan Kesehatan Peserta Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan	a. Fasilitasi calon peserta pelatihan dalam pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pendaftaran pelatihan keahlian di bidang kepelautan b. penempatan tenaga medis di poliklinik pihak kesatu dan c. penyediaan layanan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan pelatihan keahlian di bidang kepelautan sesuai kebutuhan dan persetujuan para pihak.
12	Perjanjian Kerja Sama	53/BPPSDM/KKP/ PKS/VIII/2025	BPPP TEGAL	PT. BARUNA TRAINING CENTER	1 Agustus 2025 – 1 Agustus 2028	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan Bagi Calon Awak Kapal Perikanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi, serta; b. pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi bidang kepelautan.
13	Perjanjian Kerja Sama	16/BPPSDM/KKP/PK S/II/2025	BPPP Banyuwangi	Perkumpulan Nelayan dan Pengusaha Perikanan Samudra Bestari	14 Februari 2025- 14 Februari 2028	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan bagi Calon Awak Kapal	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, serta sertifikasi b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan
14	Perjanjian Kerja Sama	32/BPPSDM/KKP/PK S/IV/2025	BPPP TEGAL	PT. Anugerah Bahari Pasifik	24 April 2025-24 April 2028	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan bagi Calon Awak Kapal Perikanan	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan

NO	Bentuk Kerjasama	Nomor Kerjasama	Penanggung Jawab	Mitra Kerjasama	Periode	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup
15	Perjanjian Kerja Sama	32/BPPSDM/KKP/PK S/IV/2026	BPPP TEGAL	PT. Karunia Bahtera Samudra	25 April 2025-25 April 2028	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan bagi Calon Awak Kapal Perikanan	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Kerja sama yang telah disepakati dan ditindaklanjuti tersebut meliputi berbagai bentuk kolaborasi dengan mitra strategis, baik dari sektor swasta, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja sama berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam bidang kepelautan, pelatihan, sertifikasi, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penempatan dan perlindungan pekerja migran.

Sebagai perbandingan, capaian IKU Jejaring/Kerjasama beberapa satker lingkup BPPSDMKP di Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 44. Perbandingan Capaian IKU 9 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1	Puslat - BPPSDMKP	12	15	120%
2	Pusluh - BPPSDMKP	5	9	120%

Tabel ini menunjukkan data capaian target Tahun 2025 dari tiga satuan kerja di bawah BPPSDMKP.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 12 dan capaian 15 Dokumen Kerjasama yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Satuan kerja Pusluh - BPPSDMKP dengan target 5 dan capaian 9 Dokumen Kerjasama, yang berarti persentase capaian sebesar 120%.

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 dengan persentase capaian yang signifikan. Adapun faktor penyebab keberhasilan IK Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti di Tahun 2025 disebabkan oleh:

1. Koordinasi yang Efektif: Adanya koordinasi yang kuat antara Puslat KP dengan unit kerja terkait di lingkungan KKP serta mitra eksternal.
2. Kesesuaian dengan Prioritas Nasional: Program kerja sama selaras dengan prioritas pemerintah dalam hal pemberdayaan SDM kelautan dan perikanan, perlindungan pekerja migran, serta penguatan sektor maritim.
3. Dukungan Regulasi: Adanya payung hukum dan pedoman yang jelas dalam pembentukan kerja sama, mempermudah proses administratif dan legalitas.
4. Komitmen Mitra: Tingginya komitmen dari mitra kerja sama untuk turut serta dalam program peningkatan kompetensi dan pemberdayaan.
5. Fleksibilitas dalam Pelaksanaan: Kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan mitra dan kondisi lapangan, sehingga kerja sama dapat dirancang secara lebih relevan dan aplikatif.

Kegiatan pendukung capaian IK Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti adalah yakni:

1. Penyusunan Dokumen Kerja Sama: Penyiapan naskah perjanjian kerja sama (PKS) yang komprehensif dan sesuai dengan regulasi.
2. Konsultasi dan Negosiasi dengan Mitra: Proses komunikasi intensif untuk menyelaraskan kepentingan dan ruang lingkup kolaborasi.
3. Penandatanganan dan Sosialisasi PKS: Pelaksanaan penandatanganan dokumen kerja bersama pihak terkait.
4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama untuk memastikan tujuan tercapai dan sesuai dengan rencana.
5. Pelaporan dan Dokumentasi: Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kerja sama sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja.
6. Koordinasi Internal: Rapat koordinasi rutin antarunit di Puslat KP untuk memastikan sinergi program dan dukungan teknis.

Indikator Kinerja IKSK.01.10 - Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung. Lembaga pelatihan seperti akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan. Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asesment mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan dikeluarkan oleh Lembaga luar yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengeluarkan sertifikat Akreditasi.

Lembaga pelatihan yang terstandar merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan layanan pelatihan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan standardisasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, meliputi standardisasi: program, lulusan, evaluasi, biaya, proses, ketenagaan, serta standardisasi sarana dan prasarana pelatihan KP.

Dengan sistem manajemen mutu (QMS) yang efektif ini, maka Balai memiliki akan struktur yang lebih jelas, pendekatan sistematis untuk meningkatkan layanan kepada setiap peserta latih, serta membantu untuk pengendalian dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan akreditasi QMS ini juga akan memberikan manfaat kepada Balai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat kesalahan yang mengarah pada peningkatan produktivitas Balai.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan KP sejak tahun 2017 telah terakreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Dimana terdapat 7 karakteristik utama yaitu; pendekatan pro aktif, integrasi mutu ke dalam proses bisnis, performance, mengikuti siklus PDCA, penyesuaian lingkup dengan komitmen organisasi, bersifat sukarela, dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai. Dengan akreditasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada balai dalam peningkatan kepuasan layanan kepada peserta latih, seperti pembuatan Pelayanan Pelatihan Terpadu satu Pintu (PTSP) di beberapa balai, pengurangan biaya pelatihan tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan pelatihan dan mutu lulusan pelatihan, serta mampu mengurangi permasalahan atau sengketa antara bagian dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi.

Tabel 45. Capaian IKU 10 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
6	7	7	7	7,00	7,00	8,00	114,29%	14,29%	8,00	100,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 13. Grafik Capaian IKU Sertifikasi Kelembagaan 2020-2025

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), jumlah sertifikasi kelembagaan pelatihan menunjukkan tingkat stabilitas yang sangat tinggi selama lima tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2020 dengan 6 sertifikat, angka ini kemudian meningkat dan bertahan secara konsisten di angka 7 sertifikat dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Konsistensi jumlah sertifikat ini menunjukkan bahwa standar kelembagaan telah berhasil dipertahankan

dengan baik pada semua satuan kerja Lingkup Pusat Pelatihan yang ada selama periode tersebut.

Pada tahun berjalan 2025 data pendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk kelembagaan pelatihan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) beserta unit pelaksanaannya telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Target dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah 7 Sertifikat yang tersertifikasi sesuai standar, sementara realisasi capaian mencapai 8 Sertifikat. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 114%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan komitmen tinggi terhadap penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan.

Ditinjau dari rencana strategis jangka panjang (Renstra BPPSDMKP 2025-2029), target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak 8 sertifikat. Mengingat realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai angka 8 sertifikat, maka persentase capaian terhadap target 2029 telah mencapai 100,00%. Dengan tercapainya target lima tahunan lebih awal pada tahun pertama periode Renstra, institusi kini memiliki tugas utama untuk menjaga keberlanjutan standar tersebut agar seluruh lembaga pelatihan tetap tersertifikasi hingga akhir periode 2029.

Sertifikasi yang telah diperoleh mencakup dua standar utama:

1. SNI ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) untuk Puslat KP dan seluruh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, Ambon, serta Balai Diklat Akuakultur (BDA) Sukamandi.
2. SNI ISO 37001:2016 (Sistem Anti-Penyuapan) khusus untuk Puslat KP.

Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga penguji berwenang seperti PT. TUV Rheinland Indonesia dan PT. Mutu Agung Lestari, dengan masa berlaku selama 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelatihan dan penyuluhan di lingkungan KKP telah dikelola dengan sistem yang terstandarisasi, terukur, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan.

Faktor yang mendukung keberhasilan IKU ini antara lain:

1. Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dari pimpinan Puslat KP dan masing-masing satuan kerja dalam menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program: Adanya tim kerja yang solid dan koordinasi efektif antar satuan kerja dalam menyiapkan dokumentasi, audit internal, dan menghadapi audit eksternal.
3. Sumber Daya yang Memadai: Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung yang memungkinkan pelaksanaan sertifikasi berjalan lancar.

4. Pendampingan dan Konsultasi: Dukungan dari lembaga konsultan dan auditor eksternal yang membantu dalam penyiapan sistem dan pemenuhan standar.
5. Budaya Mutu yang Terinternalisasi: Pemahaman dan kesadaran yang tinggi di seluruh jajaran mengenai pentingnya penjaminan mutu dan integritas dalam penyelenggaraan pelatihan.

Adapun Kegiatan Pendukung Capaian IKU ini antara lain:

1. Penyusunan dan Pembaruan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu: Menyiapkan manual mutu, prosedur, instruksi kerja, dan dokumen pendukung sesuai persyaratan standar.
2. Pelatihan dan Sosialisasi Internal: Melaksanakan pelatihan bagi SDM terkait mengenai penerapan SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016.
3. Audit Internal Berkala: Melakukan audit internal untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.
4. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Eksternal: Menyiapkan bukti kepatuhan, menghadapi audit sertifikasi, dan menindaklanjuti temuan auditor.
5. Pemeliharaan Sertifikasi: Melakukan surveilan rutin dan pembaruan sistem untuk memastikan sertifikat tetap berlaku dan relevan.
6. Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi: Membangun komunikasi yang baik dengan lembaga sertifikasi dalam proses awal hingga perpanjangan sertifikat.

Indikator Kinerja IKSK.01.11 - Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)

IKU ini didefinisikan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan, adapun sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Approval Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMKP. Formula Perhitungan IKU ini yakni jumlah sertifikasi program diklat masyarakat bidang teknis kelautan dan perikanan. Bukti dukung dari IKU ini antara lain sertifikat approval Program Diklat Masyarakat Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah disahkan oleh pimpinan.

Pada Tahun 2025, untuk IKU ini sudah melakukan penerbitan pengesahan (approval) lembaga diklat keahlian dan keterampilan khusus pelaut kapal penangkap ikan sesuai Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 dan penerbitan sertifikasi Program diklat keahlian dan keterampilan khusus pelaut kapal penangkap ikan (ANKAPIN, ATKAPIN, BST, BSTF)

dan audit BIMTEK AKP untuk PPN & PPS untuk program diklat SKPI, SKN dan SOPI. Adapun untuk capaian IKU ini di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Capaian IKU 11 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					75	100	133,33%	-	78,00	128,21

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan data pendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) telah mencatat kinerja yang sangat baik dalam persetujuan usulan sertifikasi program diklat masyarakat. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah 75% dari total usulan, dengan memasukkan 15 usulan yang diajukan. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa seluruh 15 usulan telah disahkan sesuai peraturan berlaku, sehingga realisasi capaian mencapai 100% dan persentase capaian kinerja sebesar 133,33%. Semua sertifikasi yang telah diterbitkan mencakup program diklat di bidang kelautan dan perikanan yang strategis, seperti:

1. Ahli Nautika Kapal Perikanan (Tingkat I dan II)
2. Ahli Teknik Kapal Perikanan (Tingkat II)
3. Basic Safety Training Fisheries (BST-F) (Tingkat I dan II)

Tabel 47. Rekap Capaian IKU Persentase Usulan Sertifikasi Tahun 2025

N O	Nomor Sertifikat	Nama LEMDIKLAT	Tempat Lembaga DIKLAT	Program DIKLAT	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir
1	001.In/AN.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 4 BENGKULU	Bengkulu	AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
2	002.In/AT.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 4 BENGKULU	Bengkulu	AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
3	003.In/BSTF.II/KOMITE/VI/2025	SEAMANJAYA MARITIME TRAINING CENTER	Cirebon - Jawa Barat	BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES (BST-F) TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
4	004.In/AN.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 3 TEGAL	Tegal - Jawa Tengah	AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
5	005.In/AT.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 3 TEGAL	Tegal - Jawa Tengah	AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
6	006.In/AN.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 4 PURWOREJO	Purworejo - Jawa Tengah	AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030

N O	Nomor Sertifikat	Nama LEMDIKLAT	Tempat Lembaga DIKLAT	Program DIKLAT	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir
7	007.In/AT.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 4 PURWOREJO	Purworejo - Jawa Tengah	AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
8	008.In/AN.II/KOMITE/VI/2025	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN	Pangkep - Sulawesi Selatan	AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT I	2 Juni 2025	2 Juni 2030
9	009.In/AN.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 1 MUNDU	Cirebon - Jawa Barat	AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
10	010.In/AT.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 1 MUNDU	Cirebon - Jawa Barat	AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
11	011.In/AN.II/KOMITE/VI/2025	SMK NEGERI 1 BULAKAMBA	Brebes - Jawa Tengah	AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	2 Juni 2025	2 Juni 2030
12	012.In/BSTF.II/KOMITE/IX/2025	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Bitung - Sulawesi Utara	BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES (BST-F) TINGKAT I	25-Sep-25	25-Sep-30
13	013.In/BSTF.II/KOMITE/IX/2025	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN (BBPI) SEMARANG	Semarang - Jawa Tengah	BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES (BST-F) TINGKAT II	25-Sep-25	25-Sep-30
14	014.In/AN.II/KOMITE/XI/2025	SMK NEGERI 4 PROBOLINGGO	Probolinggo - Jawa Timur	AHLI NAUTIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	24-Nov-25	24-Nov-30
15	015.In/AT.II/KOMITE/XI/2025	SMK NEGERI 4 PROBOLINGGO	Probolinggo - Jawa Timur	AHLI TEKNIKA KAPAL PERIKANAN TINGKAT II	24-Nov-25	24-Nov-30

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Program-program ini diselenggarakan oleh lembaga diklat masyarakat yang tersebar di berbagai daerah, antara lain SMK Negeri (di Bengkulu, Tegal, Purworejo, Cirebon, Brebes, Probolinggo), Politeknik, Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI), dan pusat pelatihan maritim lainnya. Sertifikasi berlaku selama 5 tahun. Disamping itu ada 65 Sertifikat Bimtek untuk pelatihan BSTF, Bimbingan Teknis Operasional Penangkapan Ikan, Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan dan Bimbingan Teknis Keterampilan Penanganan Ikan yang sudah di approval di UPT DJPT.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan IKU ini antara lain:

1. Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang Efektif: Puslat KP memberikan pendampingan intensif kepada lembaga diklat dalam penyusunan dokumen usulan sertifikasi.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi: Seluruh usulan disiapkan dengan memperhatikan secara ketat peraturan dan standar yang berlaku, sehingga memudahkan proses evaluasi dan persetujuan.
3. Sinergi dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: Kolaborasi yang baik dengan SMK, politeknik, dan balai pelatihan dalam menyelaraskan kurikulum dan fasilitas dengan kebutuhan sertifikasi.
4. Proses Evaluasi yang Transparan dan Objektif: Mekanisme penilaian usulan dilakukan secara terbuka, berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur.
5. Komitmen Lembaga Pengusul: Tingginya motivasi dan kesiapan lembaga diklat dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Beberapa kegiatan pendukung untuk tercapainya IKU ini antara lain:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen Usulan: Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh lembaga diklat.
2. Audit atau Visitasi Lapangan: Melakukan kunjungan langsung untuk menilai kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia lembaga.
3. Rapat Komite Sertifikasi: Menggelar rapat komite untuk mengevaluasi dan menetapkan kelulusan usulan sertifikasi.
4. Penerbitan Sertifikat dan Pengumuman Resmi: Menerbitkan sertifikat resmi beserta nomor registrasi dan masa berlaku.
5. Pendokumentasian dan Pelaporan: Mencatat seluruh proses dan hasil sertifikasi sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja.
6. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi: Menyebarkan informasi mengenai program sertifikasi kepada lembaga diklat potensial lainnya.

Indikator Kinerja IKSK.01.12 - Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

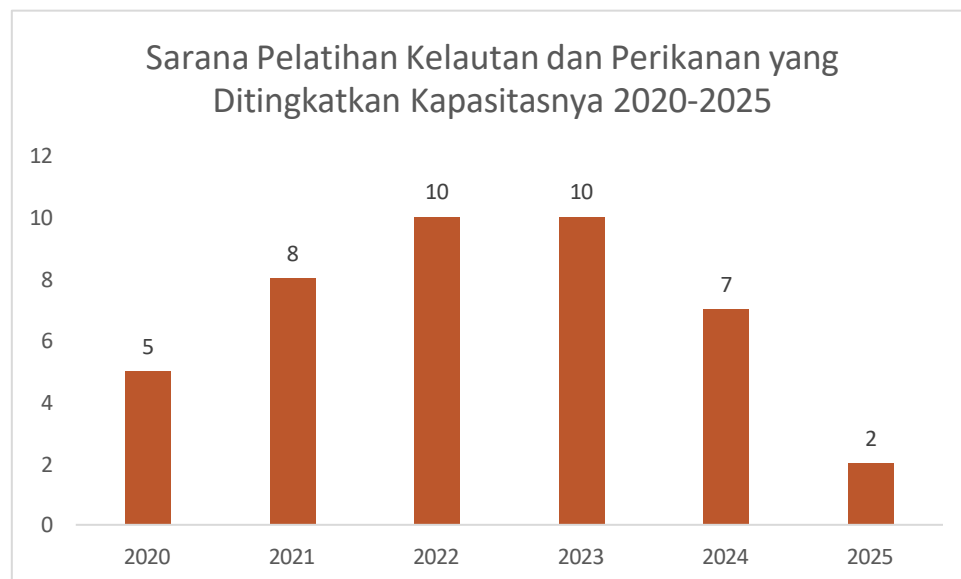
Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. Adapun untuk capaian tahun 2025 ini, pengadaan sarana pelatihan dilaksanakan oleh tegal dengan rincian capaian:

Tabel 48. Capaian IKU 12 Tahun 2025

Realisasi TW 4	2025	Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029
----------------	------	-------------------------------------

2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
5	8	10	10	7	2	2	100,00%	-71,43%	10	20,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 14. Grafik Capaian Saran Pelatihan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2020-2025

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), tren peningkatan kapasitas sarana pelatihan menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis selama lima tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2020 dengan 5 unit, jumlah sarana yang ditingkatkan kapasitasnya melonjak hingga mencapai puncaknya sebanyak 10 unit secara berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini mengalami penurunan menjadi 7 unit, yang mencerminkan adanya penyesuaian intensitas pembaruan infrastruktur fisik pelatihan di lingkup institusi.

Pada Tahun 2025, Target telah tercapai sepenuhnya dengan realisasi 2 unit sarana pelatihan yang telah ditingkatkan kapasitasnya, atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capain ini didukung oleh serangkaian kegiatan pengadaan dan peningkatan berbagai jenis sarana pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, meliputi:

1. Pengadaan interior Bahari Residence 3
2. Mesin Cold Storage
3. Sarana pembelajaran navigasi dan mesin
4. Perahu (kamar)
5. Sarana layanan pelatihan
6. Kendaraan operasional layanan pelatihan

7. Desktop PC
8. TV LED berbagai ukuran (55 inchi, 75 inchi, 98 inchi)
9. Laptop
10. Gazebo
11. Sarana penunjang asrama Bahari Residence 3

Meskipun target tahunan terpenuhi, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat penurunan pertumbuhan sebesar -71,43%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa fokus pada tahun 2025 lebih diarahkan pada pemeliharaan atau optimalisasi sarana yang sudah ada dibandingkan pembangunan unit baru secara masif.

Ditinjau dari rencana strategis jangka panjang (Renstra BPPSDMKP 2025-2029), target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak 10 unit. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 2 unit, maka persentase capaian terhadap target 2029 saat ini adalah 20,00%. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya institusi pernah mencapai angka 10 unit dalam satu tahun, target akhir Renstra 2029 ini sangat realistis untuk dicapai kembali pada periode mendatang guna mendukung standarisasi fasilitas pelatihan yang modern.

Tabel 49. Rekap Sarana Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya tahun 2025

N o.	Nama Satker	Jenis Sarana	Target			Realisasi			% Realisasi	Nomor BAST / Kuitansi	Tanggal BAST
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.000)			
A		Saldo Awal BLU	1	Unit		1	Unit				
1	BPPP Tegal	Pengadaan Interior Bahari Residence 3			390.000			389.876	99,97	B.5922/BPPP.TGL/PL.430/VIII/2025	08-Aug-25
2	BPPP Tegal	Mesin Cold Storage			59.820			59.720	99,83	B.5569/BPPP.TGL/PL.450/VII/2025	25-Jul-25
3	BPPP Tegal	Sarana Perlengkapan Navigasi dan Mesin			75.189			75.100	99,88		
4	BPPP Tegal	Kursi			66.000			65.859	99,79		
B		BLU	1	Unit		1	Unit				
5	BPPP Tegal	Sarana Layanan Pelatihan			161.000			160.812	85,36	B.6974/BPPP.TGL/PL.450/IX/2025	24-Sep-25
6	BPPP Tegal	Kendaraan Operasional Layanan Pelatihan			705.100			705.000	99,99	B.6309/BPPP.TGL/PL.450/VIII/2025	26-Aug-25
7	BPPP Tegal	Desktop PC			30.000			29.700	99,00	No Pesanan/Invoice S03165	13-Oct-25
8	BPPP Tegal	TV LED 55 Inchi			6.000			6.000	100,00	No Pesanan/Invoice SL/25/10/000514	17-Oct-25
9	BPPP Tegal	TV LED 85 Inchi			33.900			33.900	100,00	No Pesanan/Invoice SL/25/10/000514	17-Oct-25
10	BPPP Tegal	TV LED 98 Inchi			49.950			49.950	100,00	B.7894/BPPP.TGL/PL.450/XI/2025	05-Nov-25
11	BPPP Tegal	Laptop			19.000			18.930	99,63	No Pesanan/Invoice S03064	06-Oct-25
12	BPPP Tegal	Mold Kapal Fiber			30.000			29.380	97,93	001921/KW/Blu/2025	20-Oct-25
13	BPPP Tegal	Mebelair			19.400			19.399	92,78	001951/KW/Blu/2025	04-Nov-25

N o.	Nama Satker	Jenis Sarana	Target			Realisasi			% Realisasi	Nomor BAST / Kuitansi	Tanggal BAST
			Volu me	Satua n	Anggaran (Rp.000)	Volu me	Satua n	Anggaran (Rp.000)			
14	BPPP Tegal	Gazebo			31.400			31.400	100,00	002154/KW/BLU/2025	01-Dec-25
15	BPPP Tegal	TV LED 75 Inchi			12.276			12.000	97,75	No Pesanan/Invoice SL/12/25/000077	03-Dec-25
16	BPPP Tegal	Sarana Kelengkapan Asrama Bahari Residence 3			177.400			177.376	99,99	B.6974/BPPP.TGL/PL.450/IX/2 025	24-Sep-25

Sebagai perbandingan, capaian IKU Sarana beberapa satker lingkup BPPSDMKP di Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 50. Perbandingan Capaian IKU 12 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1	Puslat - BPPSDMKP	2	2	100%
2	Pusdik - BPPSDMKP	4	4	100%

Tabel ini menunjukkan data capaian target Tahun 2025 dari dua satuan kerja di bawah BPPSDMKP.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 2 dan capaian 2 Unit yang berarti persentase capaian sebesar 100%.
2. Satuan kerja Pusdik (Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya) - BPPSDMKP dengan target 4 dan capaian 4 Unit, yang berarti persentase capaian sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 dengan persentase capaian yang signifikan

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan IKU ini antara lain;

1. Perencanaan yang Matang dengan peningkatan sarana ditetapkan secara spesifik (2 unit), dengan rincian jenis sarana yang jelas dan anggaran yang terencana.
2. Pelaksanaan tepat waktu dilihat dari sebagian besar kegiatan telah diselesaikan dengan BAST yang ditandatangani dalam rentang Juli–Desember 2025, menunjukkan kedisiplinan dalam pelaksanaan.
3. Dokumentasi yang akuntabel ditunjukkan oleh realisasi yang dilengkapi dengan:
 - a. Nomor BAST/Kuitansi
 - b. Tanggal serah terima
 - c. Tautan data dukung digital

Beberapa kegiatan pendukung untuk tercapainya IKU ini antara lain:

1. Pengadaan dan Renovasi Fasilitas Pelatihan
 - a. Pengadaan interior dan sarana penunjang Bahari Residence 3.
 - b. Penyediaan gazebo dan sarana pendukung asrama untuk kenyamanan peserta.
2. Peningkatan Sarana Praktik dan Belajar
 - a. Pengadaan mesin cold storage untuk pelatihan penyimpanan hasil perikanan.
 - b. Penyediaan sarana pembelajaran navigasi dan mesin kapal.
 - c. Pengadaan perahu (kamar) untuk pelatihan praktik kelautan.

3. Modernisasi Sarana Teknologi Informasi
 - a. Pengadaan desktop PC, laptop, dan TV LED berbagai ukuran untuk mendukung metode pembelajaran digital dan presentasi.
4. Peningkatan Sarana Mobilitas dan Layanan
 - a. Pengadaan kendaraan operasional layanan pelatihan.
 - b. Penyediaan sarana layanan pelatihan lainnya untuk menunjang administrasi dan logistik.
5. Penguatan Kapasitas Asrama dan Ruang Publik
 - a. Penyempurnaan sarana penunjang asrama dan ruang bersama untuk meningkatkan kapasitas akomodasi peserta pelatihan.

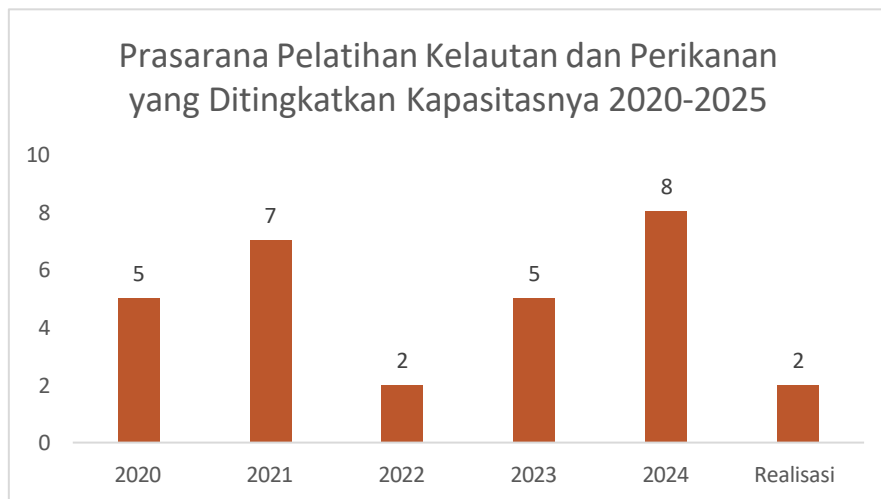
Indikator Kinerja IKS.01.13 -Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. Adapun untuk capaian tahun 2025 ini, pengadaan sarana pelatihan dilaksanakan oleh tegal dengan rincian capaian:

Tabel 51. Capaian IKU 13 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
5	7	2	5	8	2	2	100,00%	-75,00%	10	20,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 15. Grafik Capaian Prasarana Pelatihan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2020-2025

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), tren peningkatan kapasitas sarana pelatihan menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis selama lima tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2020 dengan 5 unit, jumlah sarana yang ditingkatkan kapasitasnya melonjak hingga mencapai puncaknya sebanyak 10 unit secara berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini mengalami penurunan menjadi 7 unit, yang mencerminkan adanya penyesuaian intensitas pembaruan infrastruktur fisik pelatihan di lingkup institusi.

Pada tahun berjalan 2025, kinerja institusi dalam hal infrastruktur pendukung menunjukkan kepatuhan penuh terhadap perencanaan tahunan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 2 unit, realisasi yang dicapai berada tepat pada angka 2 unit, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh BPPP Tegal melalui delapan jenis pekerjaan yang mendukung peningkatan kapasitas prasarana pelatihan, antara lain:

1. Jasa pengelola kegiatan rehabilitasi kelas.
2. Jasa konsultan perencanaan rehabilitasi mesin.
3. Pekerjaan instalasi rumah pompa, kolam penampungan air, dan sistem drainase.
4. Pemasangan penangkal petir elektrostatis.
5. Pekerjaan paving halaman.
6. Pemasangan kanopi, railing, list, dan tanaman.
7. Rehabilitasi bangunan aula.
8. Jasa konsultan perencanaan lingkungan dan pembangunan areal pelatihan.

Dari seluruh kegiatan tersebut, **enam di antaranya** telah diselesaikan dengan bukti serah terima (BAST) yang tercatat antara Mei hingga Desember 2025. Dua kegiatan lainnya masih dalam pelaksanaan atau perencanaan lebih lanjut. Meskipun target

tercapai secara presisi, angka ini menunjukkan penurunan pertumbuhan sebesar - 75,00% jika dibandingkan dengan performa tahun 2024 yang berhasil menyelesaikan 8 unit.

Ditinjau dari sasaran jangka panjang dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak **10 unit**. Realisasi tahun 2025 yang berjumlah 2 unit berarti persentase capaian terhadap target 2029 saat ini berada pada posisi **20,00%**. Mengingat institusi pernah mencapai angka realisasi hingga 8 unit dalam satu tahun anggaran, sisa target 8 unit menuju tahun 2029 sangat mungkin untuk dicapai melalui alokasi sumber daya yang lebih intensif pada sisa periode rencana strategis tersebut.

Tabel 52. Rekap Prasarana Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya tahun 2025

No	Nama Satker	Jenis Sarana	Target			Realisasi			% Realisasi	Nomor BAST	Tanggal BAST	Ket
			Volum e	Satua n	Anggaran (Rp000.)	Volum e	Satua n	Anggara n (Rp.)				
A		Saldo Awal BLU	1	Unit		1	Unit					
1	BPPP Tegal	Jasa Pengelola Kegiatan Rehab Kelas Eks SUPM Tegal			20.000							Diblokir tahun 2025, dijalankan di tahun 2026
2	BPPP Tegal	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Mess			50.000			39.616	79,23	B.9009/BPPP.TGL/PL.450/XII/2025	13 Desember 2025	
3	BPPP Tegal	Pekerjaan Instalasi Rumah Pompa, Kolam Penampungan Air Selokan, Pompa, Sistem Drainase Lingkungan Asrama Pelatihan Eks SUPM Tegal			199.000			197.048	99,02	B.5790/BPPP.TGL/PL.450/VIII/2025	2 Agustus 2025	
4	BPPP Tegal	Pekerjaan Pemasangan Penangkal Petir Elektrostatis			140.000			139.335	99,53	B.3738/BPPP.TGL/PL.450/V/2025	15 Mei 2025	
5	BPPP Tegal	Pekerjaan Paving Halaman Asrama Bahari Residen III			175.000			167.875	95,93	B.4203/BPPP.TGL/PL.450/VI/2025	3 Juni 2025	
B		BLU	1	Unit		1	Unit					
6	BPPP Tegal	Pemasangan Kanopi, Railing, List dan Plint Asrama Bahari Residence III			252.000			251.341	99,74	B.6309/BPPP.TGL/PL.450/VIII/2025	26 Agustus 2025	

No	Nama Satker	Jenis Sarana	Target			Realisasi			% Realisasi	Nomor BAST	Tanggal BAST	Ket
			Volum e	Satua n	Anggaran (Rp000.)	Volum e	Satua n	Anggaran (Rp.)				
7	BPPP Tegal	Rehab Bangunan Aula			96.000			94.641	98,58	B.9290/BPPP.TGL/PL.450/XII/2025	31 Desember 2025	
8	BPPP Tegal	Jasa Konsultan Perencanaan Lingkungan Asrama Pelatihan Eks SUPM Tegal dan Pembangunan Asrama Pelatihan Eks SUPM Tegal			50.000							Kegiatan tidak jalan krn adanya perubahan perencanaan menjadi masterplan balai

Sebagai perbandingan, capaian IKU Sarana beberapa satker lingkup BPPSDMKP di Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 53. Perbandingan Capaian IKU 12 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1	Puslat - BPPSDMKP	2	2	100%
2	Pusdik - BPPSDMKP	2	2	100%

Tabel ini menunjukkan data capaian target Tahun 2025 dari dua satuan kerja di bawah BPPSDMKP.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 2 dan capaian 2 unit yang berarti persentase capaian sebesar 100%.
2. Satuan kerja Pusdik (Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya) - BPPSDMKP dengan target 4 dan capaian 4 unit, yang berarti persentase capaian sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan IKU ini antara lain;

1. Perencanaan yang terukur dan realistis terlihat dari target hanya ditetapkan 2 unit, yang memungkinkan fokus dan alokasi sumber daya yang intensif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik dan setiap kegiatan memiliki volume, satuan, dan anggaran yang jelas, memudahkan pelaksanaan dan pengawasan.
2. Enam dari delapan kegiatan utama telah memiliki Bukti Administrasi Serah Terima (BAST) yang ditandatangani antara Mei hingga Desember 2025, membuktikan bahwa pekerjaan diselesaikan secara bertahap dan tepat waktu.
3. Kegiatan yang dilakukan bersifat komprehensif dan saling mendukung, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, perbaikan sistem drainase, pemasangan fasilitas pendukung (kanopi, paving, penangkal petir), hingga perencanaan lingkungan. Hal ini meningkatkan kapasitas dan kenyamanan prasarana secara menyeluruh.

Beberapa kegiatan pendukung untuk tercapainya IKU ini antara lain:

1. Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Mess
2. Pekerjaan Instalasi Sistem Air dan Drainase (Rumah Pompa, Kolam Penampungan, Saluran, Pompa, Drainase Lingkungan)
3. Pemasangan Penangkal Petir Elektrostatik
4. Pekerjaan Paving Halaman (Areal Bahari dan Residen II)

5. Pemasangan Kanopi, Railing, List, dan Tanaman (Areal Bahari Residen II)
6. Rehabilitasi Bangunan Aula

Sasaran Program SK.02 - Aparatur Yang Dididik dan Dilatih

Indikator Kinerja IKS.02.14 - Aparatur KP yang dilatih (orang)

Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan Jalur lain dari pengembangan kompetensi seperti pelatihan. Pelatihan (training) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti coaching, mentoring, e-learning. Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.

Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KP yang telah dilatih. Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Menggunakan dana APBN,
- 2) Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal), daring (non klasikal) atau Blended Training,
- 3) Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga/Otoritas yang kompeten.

Adapun untuk perhitungannya, IKU ini menghitung Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training maupun full online training dan dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat dan telah disampaikan melalui Memorandum Kepala Pusat Pelatihan KP Nomor 41/BPPSDM.4/RC.610/I/2025 perihal Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Aparatur KP yang Dilatih tahun 2025. Adapun capaian IKU Aparatur KP yang dilatih di Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 54. Capaian IKU 14 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029

8.676	4.986	5.530	5.716	6.204	4.300	5.423	126,12%	-12,59%	6.470	83,82
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 16. Grafik Capaian IKU Aparatur KP yang Dilatih 2020-2025

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), jumlah Aparatur Kelautan dan Perikanan yang dilatih menunjukkan tren pemulihan yang stabil setelah sempat mengalami penurunan di awal periode. Pada tahun 2020, realisasi tercatat cukup tinggi sebesar 8.676 orang, namun angka ini turun tajam menjadi 4.986 orang pada tahun 2021. Sejak saat itu, jumlah aparatur yang dilatih terus mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya, yaitu 5.530 orang pada 2022, 5.716 orang pada 2023, hingga mencapai 6.204 orang pada akhir tahun 2024.

Pada tahun berjalan 2025, performa realisasi menunjukkan capaian yang melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 4.300 orang, institusi berhasil merealisasikan pelatihan bagi 5.423 orang, atau setara dengan tingkat capaian sebesar 126,12%. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang berjumlah 6.204 orang, terdapat penurunan pertumbuhan sebesar -12,59%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target tahun 2025 tercapai dengan sangat baik, volume pelatihan secara keseluruhan masih berada di bawah angka capaian tahun sebelumnya.

Ditinjau dari rencana strategis jangka panjang (Renstra BPPSDMKP 2025-2029), target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebanyak 6.470 orang. Realisasi tahun 2025 yang sebesar 5.423 orang menunjukkan bahwa persentase capaian terhadap target 2029 sudah menyentuh angka 83,82%. Dengan sisa gap yang hanya sekitar 16%, institusi berada di jalur yang sangat tepat untuk memenuhi sasaran strategis lima tahunan tersebut, bahkan berpotensi melampauinya sebelum periode Renstra berakhir.

Adapun detail peserta per eselon 1 pelatihan Aparatur Tahun 2025 yakni:

Tabel 55. Rekap Capaian IKU Pelatihan Aparatur Tahun 2025

No	Eselon I	Total	%
1	BPPMHKP	358	6,59%
2	BPPSDMKP	1899	34,96%

No	Eselon I	Total	%
3	Ditjen. PDSPKP	154	2,84%
4	Ditjen. Perikanan Budidaya	828	15,24%
5	Ditjen. Perikanan Tangkap	371	6,83%
6	Ditjen. PK	372	6,85%
7	Ditjen. PRL	20	0,37%
8	Ditjen. PSDKP	814	14,99%
9	Inspektorat Jenderal	195	3,59%
10	Instansi Luar KKP	105	1,93%
11	Sekretariat Jenderal	316	5,82%
Total		5432	100,00%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Dari data tersebut, BPPSDMKP menjadi satuan kerja dengan jumlah peserta pelatihan terbanyak, yaitu 1.899 orang atau 34,96% dari total peserta. Ini menunjukkan bahwa BPPSDMKP memiliki kontribusi paling besar dalam pencapaian target pelatihan. Di posisi kedua, Ditjen. Perikanan Budidaya menyumbang 828 peserta (15,24%), disusul oleh Ditjen. PSDKP dengan 814 peserta (14,99%). Sementara itu, beberapa satuan kerja memiliki kontribusi lebih kecil, antara lain Ditjen. PRL dengan hanya 20 peserta (0,37%), Ditjen. PDSPKP dengan 154 peserta (2,84%), dan Instansi Luar KKP dengan 105 peserta (1,93%).

Adapun sebaran pelatihan berdasarkan gender yakni:

Tabel 56. Rekap IKU 14 Berdasarkan Jenis Pelatihan dan Gender

No	Jenis Pelatihan	L	P	Total	%L	%P
1	Blended Learning	583	377	960	60,73%	39,27%
2	Full Online	2968	1504	4472	66,37%	33,63%
	Total	3.551	1.881	5.432	65,37%	34,63%

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan gender pada tahun 2025, pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur Kelautan dan Perikanan (KP) telah menunjukkan capaian yang signifikan berdasarkan jenis pelatihan dan distribusi gender. Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui dua metode utama, yaitu Blended Learning dan Full Online. Capaian IKU Aparatur KP yang dilatih pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan jumlah peserta sebanyak 5.432 orang, dengan komposisi laki-laki 65,37% (3.551 orang) dan perempuan 34,63% (1.881 orang). Dominasi peserta laki-laki masih terlihat cukup kuat, namun partisipasi perempuan sudah mencapai lebih dari sepertiga total peserta, yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan inklusivitas gender dalam program pelatihan aparatur KP.

Ditinjau dari jenis moda pelatihan, pelatihan Full Online menjadi kontributor utama dengan 4.472 peserta (82,3% dari total), jauh melampaui Blended Learning yang

berjumlah 960 peserta (17,7%). Pada kedua moda tersebut, proporsi peserta laki-laki tetap lebih tinggi, terutama pada Full Online (66,37% laki-laki), yang mengindikasikan bahwa digitalisasi pelatihan belum sepenuhnya mengurangi kesenjangan gender, meskipun telah memperluas jangkauan peserta secara signifikan.

Pada tingkat nama pelatihan, pelatihan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan yang paling dominan dengan 3.005 peserta, menyumbang lebih dari separuh total peserta keseluruhan. Pelatihan ini juga menunjukkan pola gender yang konsisten dengan agregat, yaitu dominasi laki-laki (67,75%). Sementara itu, beberapa pelatihan tertentu justru menunjukkan partisipasi perempuan yang lebih tinggi atau relatif seimbang, seperti *Pengantar Pengarusutamaan Gender Sektor KP* (58,11% perempuan), *Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Angkatan I* (65,38% perempuan), serta beberapa pelatihan ToT (CPIB dan CPPIB) yang mendekati komposisi seimbang.

Tabel 57. Rekap Capaian IKU 14 Berdasarkan Judul Pelatihan

No	Nama Pelatihan	L	P	Total	%L	%P
1	Core Value Berakhlak Tahun 2025	430	197	627	68,58%	31,42%
2	Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik	17	19	36	47,22%	52,78%
3	Kampung Nelayan Merah Putih	66	29	95	69,47%	30,53%
4	Koperasi Merah Putih	140	83	223	62,78%	37,22%
5	Microlearning Cara Cerdas Penanganan Sampah	19	6	25	76,00%	24,00%
6	Microlearning Digital Leadership	75	48	123	60,98%	39,02%
7	Microlearning Kepemimpinan Tingkat 5	34	24	58	58,62%	41,38%
8	Microlearning Kewirausahaan	16	9	25	64,00%	36,00%
9	Microlearning Manajemen Konflik	16	10	26	61,54%	38,46%
10	Microlearning Manajemen Pengawasan	21	8	29	72,41%	27,59%
11	Microlearning Manajemen Stress	36	22	58	62,07%	37,93%
12	Microlearning Mengenal dan Menghindari Gratifikasi	13	10	23	56,52%	43,48%
13	Microlearning Mengenal HCDP dan TNA	8	9	17	47,06%	52,94%
14	Microlearning Menjadi ASN yang Responsif	51	35	86	59,30%	40,70%
15	Microlearning Pelayanan Prima	34	17	51	66,67%	33,33%
16	Pelatihan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Bagi ASN	94	51	145	64,83%	35,17%
17	Pelatihan Dasar - Dasar Implementasi Blue Economy di Sektor Kelautan dan Perikanan	20	17	37	54,05%	45,95%
18	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Angkatan I	9	17	26	34,62%	65,38%
19	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Angkatan II	15	14	29	51,72%	48,28%
20	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan I	29	11	40	72,50%	27,50%
21	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan II	29	10	39	74,36%	25,64%
22	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan III	12	11	23	52,17%	47,83%
23	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan IV	10	13	23	43,48%	56,52%
24	Pelatihan Fleksibel Skills untuk LPTK Wakatobi	13	4	17	76,47%	23,53%
25	Pelatihan Fleksibel Skills untuk Penyuluh Perikanan	28	28	56	50,00%	50,00%
26	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	27	10	37	72,97%	27,03%
27	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	30	10	40	75,00%	25,00%
28	Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor KP	23	3	26	88,46%	11,54%

29	Pelatihan Pengantar Penghitungan Valuasi Kerusakan Sumber Daya Kelautan	17	10	27	62,96%	37,04%
30	Pelatihan Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak Tahun 2025	21	2	23	91,30%	8,70%
31	Pengantar Pengarusutamaan Gender Sektor Kelautan dan Perikanan	31	43	74	41,89%	58,11%
32	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	2036	969	3005	67,75%	32,25%
33	ToT Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	52	46	98	53,06%	46,94%
34	ToT Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	43	48	91	47,25%	52,75%
35	ToT Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	36	38	74	48,65%	51,35%
Total		3551	1881	5432	65,37%	34,63%

Sebagai perbandingan, capaian SDM yang bersertifikasi kompetensi ini jika dibandingkan dengan K/L lain (Badan P2SM LHK Tahun 2024) adalah sebagai berikut;

Tabel 58. Perbandingan Capaian IKU 14 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	Puslat – BPPSDM KKP (2025)	4.300	5.432	120%
2	Badan P2SM LHK (2024)		3.683	

Tabel ini menunjukkan perbandingan data capaian Aparatur KP yang dilatih (untuk P2SM LHK, IK Aparatur Dilatih masuk kedalam komponen “masyarakat yang meningkat kompetensinya” dengan nama “Lulusan Diklat Aparatur LHK” sehingga targetnya digabung dengan komponen lain dan perbandingan yang bisa dilakukan hanya pada capaian saja) target Tahun 2025 untuk Puslat dan 2024 untuk Badan P2SM.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 4.300 Orang dan capaian 5.432 Orang yang berarti persentase capaian sebesar 120%.
2. Badan P2SM LHK dengan capaian Jumlah Lulusan Diklat Aparatur LHK 3.683 Orang.

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan persentase capaian yang signifikan. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Aparatur KP yang Dilatih pada Triwulan IV Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aplikasi e-Milea dalam penyelenggaraan pelatihan, yang secara signifikan memperluas akses peserta, meningkatkan efisiensi waktu, serta memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran.
2. Ketersediaan sarana pokok dan pendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, termasuk pemanfaatan Learning Management System (LMS) internal, yang mendukung pelaksanaan pelatihan daring dan microlearning secara efektif.

3. Ketersediaan widyaiswara yang kompeten dan bersertifikat Training of Trainers (ToT) sesuai bidang diklat, didukung oleh perangkat kurikulum dan modul pelatihan yang lengkap, serta telah terakreditasinya program Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV serta Diklat Prajabatan di BDA Sukamandi oleh LAN-RI.

4. Penetapan tema pelatihan yang relevan dan aktual, disesuaikan dengan tuntutan pelaksanaan tugas, arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan, serta dinamika transformasi kelembagaan.

Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi ASN KP meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Prajabatan serta pelatihan dalam jabatan, meliputi Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/Manajerial, melalui kerja sama dan sinkronisasi dengan Eselon I KKP dalam proses identifikasi kebutuhan diklat.
2. Koordinasi intensif dengan Eselon I teknis dan BDA Sukamandi, khususnya terkait perencanaan dan pelaksanaan Diklat Teknis sesuai kebutuhan organisasi.
3. Pelaksanaan pelatihan teknis, manajerial, dan sertifikasi, antara lain: Flexible Skills bagi Penyuluh Perikanan, Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak, ToT CPIB/CPPIB/CBIB, Kepemimpinan Teknis Sektor KP, SAKIP, Digital Leadership, Pelayanan Prima, serta pelatihan tematik terkait kebijakan dan isu strategis global, seperti Blue Economy, Pengarusutamaan Gender, dan Valuasi Kerusakan Sumber Daya Kelautan.

Indikator Kinerja IKSK.02.15 - Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya yang menjalani proses pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara lebih efektif, efisien, serta profesional. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah secara optimal. Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur yang dimaksud adalah sertifikasi profesional yang merupakan sertifikasi di bidang KP untuk memastikan standar kompetensinya. Adapun pelaksanaan sertifikasi bagi widyaiswara sesuai dengan Perka LAN Nomor 375/K.1/PDP.07/2022, semetarra untuk pelaksanaan sertifikasi bagi Instruktur sesuai dengan PermenKP Nomor 23 Tahun 2024. Adapun capaian IKU ini untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 59. Capaian IKU 15 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					5	23	460,00%	-	5	460,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan Data Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Triwulan IV Tahun 2025, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) telah melampaui target yang ditetapkan dalam peningkatan kompetensi tenaga pelatihan (instruktur). Target dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah 5 orang, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 23 orang. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 120%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan komitmen tinggi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelatih.

Sertifikasi kompetensi yang diperoleh mencakup dua jenis utama:

1. Sertifikasi Manajemen Trainee bagi tenaga pelatihan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
2. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagi instruktur dari berbagai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) seperti Banyuwangi, Tegal, dan Bitung.

Tabel 60. Rekap Capaian IKU Tenaga Pelatihan yang Kompeten Tahun 2025

N O.	Nama	Satuan Kerja	Jenis Sertifikasi	Lembaga Penyelenggara
1	Ahmad Jamil, S.Si.,M.B.A.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Manajemen Trainee	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2	Andri Trisna, S.AP.,M.Si.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Manajemen Trainee	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
3	Indah Effendi,S.Pi.,M.M.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Manajemen Trainee	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
4	Rina Martaulina, S.IK, M.M.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Manajemen Trainee	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
5	Cakra Putra Damadika, S.T, M.IP	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Manajemen Trainee	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
6	Dian Tugu Warsito Taufik, S.St.Pi., M.P.	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
7	Yanuar Rustrianti Buwono, S.St.Pi., M.Si.	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
8	Ridwan Syah, S.Pi.	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
9	Jemisra, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker

10	Heri Puryanto, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
11	Miftah Farid, S.St.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
12	Ahmad Harianto, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
13	Muhammad Fiqi Zulendra, S.St.Pi., M.Tr.Pi.	BPPP Bitung	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
14	Iman Setya Dwi Ardani, A.Md., S.TP.	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
15	Firman Pra Setia Nugraha, S>St.Pi., M.Tr.Pi.	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
16	Irwan Suneth, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
17	Karsinah, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
18	Susanti, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
19	Sri Winarsih, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
20	Lalu Asep Dwipayana S. S.St.Pi.M.Tr.Pi	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
21	Athanasius, S.S.T.Pi	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
22	Fariana Banyu Kartika, S.St. Pi.	BPPP Banyuwangi	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker
23	Hendriyansah Nuriman, S.Pi.	BPPP Tegal	Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur	Kemnaker

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa faktor utama yakni:

1. Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam mendorong percepatan pemenuhan kompetensi tenaga pelatihan, khususnya instruktur.
2. Tersedianya program sertifikasi yang relevan dan terstandar, baik melalui skema *Manajemen Trainee* maupun sertifikasi kompetensi jabatan fungsional instruktur yang diakui secara nasional oleh Kemnaker.
3. Koordinasi yang efektif antara satuan kerja, penyelenggara pelatihan, dan lembaga sertifikasi, sehingga proses seleksi, pelaksanaan, hingga sertifikasi dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Keempat, kesiapan SDM peserta yang secara kualifikasi dan pengalaman telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi.

Dalam rangka mencapai target IKU tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain:

1. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga pelatihan pada masing-masing satuan kerja
2. Penugasan aparatur potensial untuk mengikuti program Manajemen Trainee dan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional instruktur
3. Fasilitasi dan pendampingan proses pendaftaran, pelaksanaan uji kompetensi, serta penerbitan sertifikat oleh lembaga berwenang
4. Monitoring dan evaluasi capaian peserta guna memastikan kesesuaian antara output kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator Kinerja IKS.02.16 - Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Sebagai institusi strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pegawainya memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan global dan dinamika sektor kelautan. Dalam upaya ini, KKP mengadopsi konsep *Corporate University* sebagai pendekatan strategis untuk pengelolaan pembelajaran yang terintegrasi dan terarah.

Implementasi fungsi *Corporate University* di KKP diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 81 pada Permen KP Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan KKP. *Corporate University* dirancang untuk menjadi wadah yang tidak hanya memberikan pelatihan teknis tetapi juga mengembangkan budaya pembelajaran organisasi yang berbasis inovasi dan kolaborasi.

Corporate University memiliki tugas untuk mengoordinasikan pengembangan program, manajemen pengetahuan, serta penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi di seluruh lingkungan KKP. Tugas ini dijalankan melalui berbagai fungsi strategis, seperti koordinasi lintas unit kerja, penyusunan program pelatihan, pengembangan kurikulum, hingga pengelolaan data dan informasi kompetensi.

Selain itu, pelaksanaan fungsi *Corporate University* di KKP didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat

Sesuai dengan Keputusan Menteri KP RI Nomor 84 Tahun 2024, pelaksanaan *Corporate University* di KKP meliputi Sembilan bidang keahlian diantaranya: a. Bidang Kesekretariatan; b. Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; c. Bidang Perikanan

Tangkap; d. Bidang Perikanan Budi Daya; e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; g. Bidang Pengawasan Intern; h. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; i. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Capaian IKU ini dihitung dari Jumlah usulan program pelatihan yang dikelompokkan sesuai bidang keahlian. Adapun Capaian IKU ini di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Capaian IKU 16 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					9	10	111,11%	-	9	111,11

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan Data Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Triwulan IV Tahun 2025, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) telah melampaui target yang ditetapkan dalam Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok. Target dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah 9 usulan, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 10 Usulan. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 111,11%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan komitmen tinggi dalam pengembangan kompetensi untuk mendukung terimplementasinya corporate university.

Adapun bidang-bidang yang diusulkan antara lain:

Tabel 62. Rekap Usulan Corpu Tahun 2025

NO	Kelompok Keahlian	Daftar Pengusul
1	Bidang Kesekretariatan	Setjen: Biro Hukum, Biro Humas, Biro Keuangan dan BMN, Biro Pengadaan Barang-Jasa, Biro SDMAO, Biro Umum, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis
2	Bidang Penataan Ruang Laut	Ditjen PRL
3	Bidang Pengelolaan Kelautan	Ditjen PK
4	Bidang Perikanan Tangkap	Ditjen PT
5	Bidang Perikanan Budi Daya	Ditjen PB
6	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Ditjen PDSPKP
7	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Ditjen PSDKP
8	Bidang Pengawasan Intern	Inspektorat Jenderal

NO	Kelompok Keahlian	Daftar Pengusul
9	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	BPPSDM KP
10	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Aparatur KP yang Dilatih pada Triwulan IV Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen dan kerjasama pimpinan Eselon 1 dan Eselon 2 KKP dalam pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi organisasi yang bisa diimplementasikan dalam *Corporate University*.

beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Koordinasi perancangan desain *Corporate University* KKP
2. Koordinasi penyiapan data *Human Capital Development*
3. Penyusunan draft pedoman penyelenggaraan dan supervise *Corporate University* KKP
4. Penyampaian data *Human Capital Development Plan* (HDCP) oleh Biro SDMAO
5. Koordinasi pengelompokan data HDCP Bersama Biro SDMAO
6. Rapat penyiapan platform *Corporate University* KKP pada website kkp.go.id Bersama Pusdatin KKP
7. *Benchmarking* ke *Corporate University* K/L terkait (Kemenkeu, LAN, dan Telkom)
8. Rapat Koordinasi pembina kepegawaian seluruh eselon 1 KKP
9. Koordinasi persiapan launching *Corporate University* Bersama Biro SDMAO
10. Penyusunan Roadmap dan TOR launching *Corporate University*.
11. Penyusunan Katalog Kompetensi ASN KKP Bersama Biro SDMAO
12. Pelaksanaan Management trainee untuk CPNS KKP.

Indikator Kinerja IKSK.02.17 - Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)

IKU ini didefinisikan sebagai indikator untuk menunjukkan terkait Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan. Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga pemerintah/swasta diluar unit Kerja Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Formula perhitungan IKU ini yakni jumlah Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan. Bukti dukung IK ini berupa rekapitulasi data Lembaga/Instansi

yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan.

Adapun capaian IKU ini di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Capaian IKU 17 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
				6	6	7	116,67%	16,67%	6	116,67

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan data realisasi Triwulan 4 (TW 4), indikator mengenai jumlah lembaga atau instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan kompetensi ini merupakan IKU yang baru dimulai pada tahun 2024. Pada tahun 2024 tersebut, tercatat sebanyak 6 lembaga yang telah memanfaatkan layanan peningkatan kompetensi bagi ASN Kelautan dan Perikanan. Fokus pada indikator ini mencerminkan upaya institusi dalam memperluas jejaring layanan pengembangan aparatur di tingkat antar-lembaga atau instansi pemerintah.

Pada periode tahun berjalan 2025, performa indikator ini menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target tahunan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 6 lembaga, realisasi yang berhasil dicapai meningkat menjadi 7 lembaga, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 116,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, terdapat pertumbuhan positif sebesar 16,67%. Peningkatan ini menandakan adanya perluasan kepercayaan dan pemanfaatan fasilitas pengembangan kompetensi oleh instansi mitra di tahun 2025.

Ditinjau dari rencana kegiatan jangka panjang periode 2025-2029, target akhir yang ditetapkan untuk tahun 2029 adalah sebanyak 6 lembaga. Mengingat realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai 7 lembaga, maka persentase capaian terhadap target 2029 telah menyentuh angka 116,67%. Dengan tercapainya target akhir rencana lima tahunan lebih awal pada tahun pertama, institusi memiliki tantangan untuk terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan standar pelayanan agar jumlah instansi yang terlayani tetap stabil atau tumbuh melampaui sasaran minimal hingga tahun 2029.

Tabel 64. Rekap Capaian Lembaga/Instansi yang Menggunakan Fasilitas Peningkatan Kompetensi Tahun 2025

N O.	NAMA INSTANSI	BALAI DIKLAT PENYELENGGARA	DIKLAT YANG DIKUTI	JUMLAH PESERTA
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	6

N O.	NAMA INSTANSI	BALAI DIKLAT PENYELENGGARA	DIKLAT YANG DIKUTI	JUMLAH PESERTA
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	4
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan	3
4	Dinas Perikanan Kabupaten Berau	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pembina Mutu	6
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	3
6	Dinas Perikanan Kab. Malang	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur	5
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Cirebon	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur	4

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh beberapa faktor utama antara lain:

1. Kesesuaian kurikulum dan materi pelatihan dengan kebutuhan riil instansi daerah, khususnya dalam mendukung penguatan jabatan fungsional teknis di bidang kelautan dan perikanan.
2. Reputasi dan kapasitas Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai penyelenggara pelatihan yang kompeten, terstandar, dan berpengalaman.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara unit penyelenggara pelatihan dengan instansi pengguna layanan, sehingga proses perencanaan, pendaftaran, dan pelaksanaan pelatihan dapat berjalan dengan baik.
4. Meningkatnya kesadaran instansi daerah akan pentingnya peningkatan kompetensi ASN sebagai bagian dari penguatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Untuk mencapai target IKU tersebut, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung, antara lain:

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi program pelatihan kepada instansi pusat dan daerah;
2. identifikasi kebutuhan pelatihan jabatan fungsional sesuai dengan karakteristik dan kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan pelatihan dasar jabatan fungsional secara terencana dan terjadwal; serta
4. Fasilitasi administrasi dan dokumentasi data dukung pelaksanaan pelatihan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan pemanfaatan layanan pelatihan serta mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

Sasaran Program SK.03 - Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.03.18 - Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)

Indikator Kinerja ini merupakan Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Formula indikator kinerja ini A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di tandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. Presentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan. Adapun capaian IKU ini di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 65. Capaian IKU 18 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00%	0,00%	100	100,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Capaian layanan dukungan manajemen internal menunjukkan konsistensi performa yang sempurna dengan realisasi yang bertahan stabil pada angka 100% setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2024, mencerminkan tata kelola internal yang sangat mapan. Pada tahun berjalan 2025, institusi berhasil mempertahankan standar tersebut dengan realisasi 100,00% dari target 100%, yang berarti tidak terdapat perubahan pertumbuhan (0,00%)

dibandingkan tahun 2024 namun tetap menunjukkan efektivitas layanan yang maksimal. Keberhasilan ini membuat target jangka panjang dalam Rencana Kegiatan 2025-2029 sebesar 100% telah tercapai sepenuhnya (100,00%) di tahun pertama, sehingga fokus organisasi ke depan adalah menjaga keberlanjutan kualitas layanan tersebut hingga akhir periode..



Gambar 17. Grafik Capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP 2021-2025

Untuk bukti capaian IKU di Tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024 dimana tidak lagi memasukkan dokumen perencanaan yang akan diklaim di IKU SAKIP. Adapun dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker antara lain Dokumen SPIP, Realisasi Anggaran, laporan keuangan, laporan PIPK, laporan Arsiparis, dan laporan kepegawaian.

Tabel 66. Rekap Dokumen Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan KP Tahun 2025

No	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Dokumen (Tahunan)	Dokumen (2025)
1	Dokumen Laporan SPIP	Triwulan		
	1) Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024	Triwulan	1	1
	2) Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025	Triwulan	1	1
	3) Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025	Triwulan	1	1
	4) Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025	Triwulan	1	1
2	Dokumen Realisasi Anggaran	Bulanan		
	1) Realisasi Anggaran Bulan Januari	Bulanan	1	1
	2) Realisasi Anggaran Bulan Februari	Bulanan	1	1
	3) Realisasi Anggaran Bulan Maret	Bulanan	1	1
	4) Realisasi Anggaran Bulan April	Bulanan	1	1
	5) Realisasi Anggaran Bulan Mei	Bulanan	1	1
	6) Realisasi Anggaran Bulan Juni	Bulanan	1	1
	7) Realisasi Anggaran Bulan Juli	Bulanan	1	1
	8) Realisasi Anggaran Bulan Agustus	Bulanan	1	1
	9) Realisasi Anggaran Bulan September	Bulanan	1	1
	10) Realisasi Anggaran Bulan Oktober	Bulanan	1	1
	11) Realisasi Anggaran Bulan November	Bulanan	1	1

No	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Dokumen (Tahunan)	Dokumen (2025)
----	--------------	-------------------	--------------------------	----------------

	12)	Realisasi Anggaran Bulan Desember	Bulanan	1	1
3	Laporan Keuangan		Semester		
	1)	Semester II Tahun 2024	Semester	1	1
	2)	Semester I Tahun 2025	Semester	1	1
4	Laporan PIPK Tahun 2024		Tahunan	1	1
5	Laporan Arsiparis		Triwulan		
	1)	Arsiparis TW 4 2024	Triwulan	1	1
	2)	Arsiparis TW 1 2025	Triwulan	1	1
	3)	Arsiparis TW 2 2025	Triwulan	1	1
	4)	Arsiparis TW 3 2025	Triwulan	1	1
6	Laporan Kepegawaian		Bulanan		
	1)	Rekap Presensi Januari 2025	Bulanan	1	1
	2)	Rekap Presensi Februari 2025	Bulanan	1	1
	3)	Rekap Presensi Maret 2025	Bulanan	1	1
	4)	Rekap Presensi April 2025	Bulanan	1	1
	5)	Rekap Presensi Mei 2025	Bulanan	1	1
	6)	Rekap Presensi Juni 2025	Bulanan	1	1
	7)	Rekap Presensi Juli 2025	Bulanan	1	1
	8)	Rekap Presensi Agustus 2025	Bulanan	1	1
	9)	Rekap Presensi September 2025	Bulanan	1	1
	10)	Rekap Presensi Oktober 2025	Bulanan	1	1
	11)	Rekap Presensi November 2025	Bulanan	1	1
	12)	Rekap Presensi Desember 2025	Bulanan	1	1
Total			Jumlah	35	35
			%	100	100

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Sebagai perbandingan, capaian IKU Persentase Layanan Dukman ini jika dibandingkan dengan satker lain di BPPSDM adalah sebagai berikut;

Tabel 67. Perbandingan Capaian IKU 18 dengan satker sejenis

No.	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	Puslat	100	100	100
2	Pusdik	100	100	100

Tabel ini menunjukkan perbandingan data capaian Persentase Layanan Dukman target Tahun 2025 untuk Puslat dan Pusdik.

1. Satuan kerja Puslat - BPPSDMKP dengan target 100% dan capaian 100% yang berarti persentase capaian sebesar 100%.
2. Satuan kerja Pusdik - BPPSDMKP dengan target 100% dan capaian 100% yang berarti persentase capaian sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan kerja telah mencapai target yang ditetapkan persentase capaian yang signifikan. Faktor Keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya komitmen pegawai dan pimpinan beserta staf dalam koordinasi internal antar tim kerja

Pusat Pelatihan KP terutama dalam penyediaan dokumen-dokumen dukungan manajemen instansi yang tepat waktu.

Kegiatan pendukung capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP pada tahun 2025 ini adalah sebagai berikut

- 1) Implementasi SPIP Terintegrasi: Pemenuhan komponen pengendalian intern sesuai pedoman BPKP.
- 2) Penguatan Tata Kelola Keuangan: Melalui pelatihan pengelolaan keuangan DIPA, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan.
- 3) Pelaksanaan PIPK (Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Kegiatan): Penyusunan laporan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit internal.
- 4) Pembinaan dan Pelatihan Kepegawaian: Termasuk updating data ASN, penilaian kinerja, dan pengelolaan dokumen kepegawaian.
- 5) Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi: Digitalisasi arsip dan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis.
- 6) Koordinasi Rutin antar Unit Internal: Forum internal penguatan peran manajemen dukungan secara berkala.
- 7) Monitoring pemenuhan dokumen bulanan, triwulanan dan semesteran.
- 8) Penyusunan dokumen *Output* kegiatan yang diperlukan dalam pemenuhan IKU Layanan Dukungan Manajemen.

Indikator Kinerja IKSK.03.19 - Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan

Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran. Satker yang menjadi target usulan WBK tahun 2025 adalah satker Pusat Pelatihan KP.

Adapun untuk mencapai usulan WBK ini satker perlu mencapai syarat-syarat antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit,.
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU Usulan WBK yang telah dilakukan antara lain:

1. Penunjukkan dan penetapan tim komponen WBK
2. Penilaian mandiri dan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal
3. Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal.
4. Pemenuhan dokumen untuk setiap komponen.
5. Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. Rekonsiliasi pengisian LKE Zona Integritas Menuju WBK Puslat KP

Adapun capaian untuk IKU ini yakni:

Tabel 68. Capaian IKU 19 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
		1	1	1	1	1	100,00%	0,00%	1	100,00

Realisasi pembangunan unit kerja menuju WBK menunjukkan konsistensi yang sangat stabil dengan capaian rutin **1 satker** per tahun sejak 2022 hingga 2024, yang secara berturut-turut mencakup BDA Sukamandi, BPPP Ambon, dan BPPP Bitung. Pada tahun berjalan 2025, Pusat Pelatihan KP menjadi satker yang diusulkan untuk memenuhi target tahunan sebesar **1 satker**, di mana realisasinya telah mencapai **100,00%** dengan pertumbuhan yang tetap terjaga stabil (**0,00%**) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dengan keberhasilan realisasi di tahun 2025 ini, target akhir pada Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029 yang sebesar **1 satker** telah berhasil dipenuhi sepenuhnya (**100,00%**) pada tahun pertama periode perencanaan.

Berdasarkan Data Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini yakni Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM KP ke Kepala Pusat Pelatihan KP Nomor 36/BPPSDM.1/TU.210/I/2026 perihal Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPPSDM Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 77 tahun 2025 tentang Penetapan Unit Organisasi yang dibangun Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPPSDM Tahun 2025, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) telah mencapai target yang ditetapkan untuk IKU ini. Target dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah 1 Satker yang diusulkan, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 1 Satker (100%). Adapun berdasarkan nota dinas tersebut, tim Internal BPPSDM telah

memberikan nilai hasil evaluasi sebesar **82,12** terhadap Pusat Pelatihan KP sehingga sudah memenuhi syarat untuk diusulkan menuju WBK.

Jika dibandingkan dengan satker lain, di tahun 2025 ini satker lingkup BPPSDM yang mengusulkan unit organisasi untuk dibangun menuju WBK yakni antara lain:

Tabel 69. Perbandingan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 2025 Lingkup BPPSDMKP

No	Unit Pelaksana Teknis	Tim Penilai Internal BPPSDM	Keterangan
1	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	82,12	Memenuhi Syarat Minimal
2	Politeknik KP Dumai	93,02	Memenuhi Syarat Minimal
3	Politeknik KP Kupang	43,88	Belum Memenuhi Syarat Minimal
4	Politeknik KP Bone	54,10	Belum Memenuhi Syarat Minimal
5	Politeknik KP Sorong	48,49	Belum Memenuhi Syarat Minimal

Dari 5 UPT yang dinilai, hanya 2 yang sudah memenuhi syarat minimal (Pusat KP dan Politeknik KP Dumai), sementara 3 lainnya belum memenuhi (Kupang, Bone, dan Sorong).

Faktor penyebab keberhasilan Pusat Pelatihan KP dalam memenuhi target WBK didorong oleh beberapa faktor kunci:

1. Komitmen pimpinan: Keterlibatan langsung pimpinan sebagai *role model* dalam menegakkan integritas dan budaya antikorupsi.
2. Kualitas pelayanan publik: Adanya standar pelayanan yang transparan, cepat, dan bebas dari pungutan liar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3. Sistem pengawasan yang efektif: Berjalannya mekanisme kontrol internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau gratifikasi di lingkungan kerja.
4. Budaya kerja organisasi: Transformasi mentalitas pegawai yang berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
5. Komitmen bersama : Seluruh staf berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan transformasi WBK di tiap-tiap area perubahan sepanjang tahunnya.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya IKU ini yakni:

1. Area Manajemen Perubahan: Pembentukan tim kerja, penyusunan rencana aksi pembangunan ZI, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, dan perubahan pola pikir serta budaya kerja.
2. Area Penataan Tata Laksana: Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, penerapan sistem berbasis teknologi informasi (SPBE), dan keterbukaan informasi publik.
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM: Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, melakukan mutasi internal secara transparan, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin pegawai, dan sistem informasi kepegawaian.

4. Area Penguatan Akuntabilitas: Pelibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
5. Area Penguatan Pengawasan: Penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, implementasi *Whistle Blowing System* (WBS), penanganan benturan kepentingan, dan pengendalian gratifikasi.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Peningkatan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator Kinerja IKS.03.20 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN secara definisi adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, Akan ada penyesuaian formula perhitungan untuk IP ASN BKN tahun 2023, untuk itu perhitungan IP ASN Mandiri tahun 2024 dan seterusnya juga akan menyesuaikan formula sesuai dengan surat tersebut. Perubahan formula akan dilaksanakan setelah perubahan formula pada aplikasi SIASN juga telah dilaksanakan. Saat ini perhitungan formula masih menggunakan peraturan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tentang pengukuran IP-ASN. Terdapat perubahan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada **dimensi kualifikasi** mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki. (Tabel bisa dilihat dibawah)
2. **Diklat 20JP** dihitung secara proposional
3. Perhitungan bobot **dimensi kinerja** mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (Tabel bisa dilihat dibawah)
4. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran IP-ASN. Pengukuran dimensi kualifikasi dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 70. Bobot Komponen Kualifikasi Perhitungan IP ASN

Jabatan	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatab	Pendidikan yang diperoleh					
			S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional(keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		DIII	25	25	25	20	10	10
	Jabatan Fungsional(keahlian)	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
		S2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksana	S2	25	25	25	25	20	10

Sumber: Surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Pengembangan Kompetensi 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Tabel 71. Bobot Komponen Kompetensi Perhitungan IP ASN

Jenis Jabatan	Instrumen												
	Bobot Dasar					Diklat Kepemimpi nan		Diklat Fungsional		Diklat Teknis		Pengemb an Kompetensi	
	Hasil Penilaian Kinerja												
	Sang at Baik	Bai k	Butuh Perbai kan	Kurang/ Miscond uct	Sangat Kurang	Sud ah	Belu m	Sud ah	Belu m	Sud ah	Belu m	> = 2 0 JP	<20 JP
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsi onal
Jabatan Administr ator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsi onal
Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsi onal
Jabatan Fungsion al	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsi onal
Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsi onal

Sumber: Surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 72. Bobot Komponen Kinerja Perhitungan IP ASN

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	30
2	Baik	25
3	Butuh Perbaikan	20
4	Kurang	15
5	Buruk	10

Sumber: Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 73. Bobot Komponen Disiplin Perhitungan IP ASN

Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber: Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Tabel 74. Perhitungan IP ASN

Dimensi	Bobot	Rumus IP ASN
Kompetensi	25%	$\text{IP ASN} = \text{Nilai Kompetensi} \times \text{Bobot (25\%)} + \text{Nilai Kualifikasi} \times \text{Bobot (40\%)} + \text{Nilai Kinerja} \times \text{Bobot (30\%)} + \text{Nilai Disiplin} \times \text{Bobot (5\%)}$
Kualifikasi	40%	
Kinerja	30%	
Disiplin	5%	

Berikut adalah tabel pengkategorian nilai IP ASN Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019:

Tabel 75. Kategori Nilai IP ASN

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi

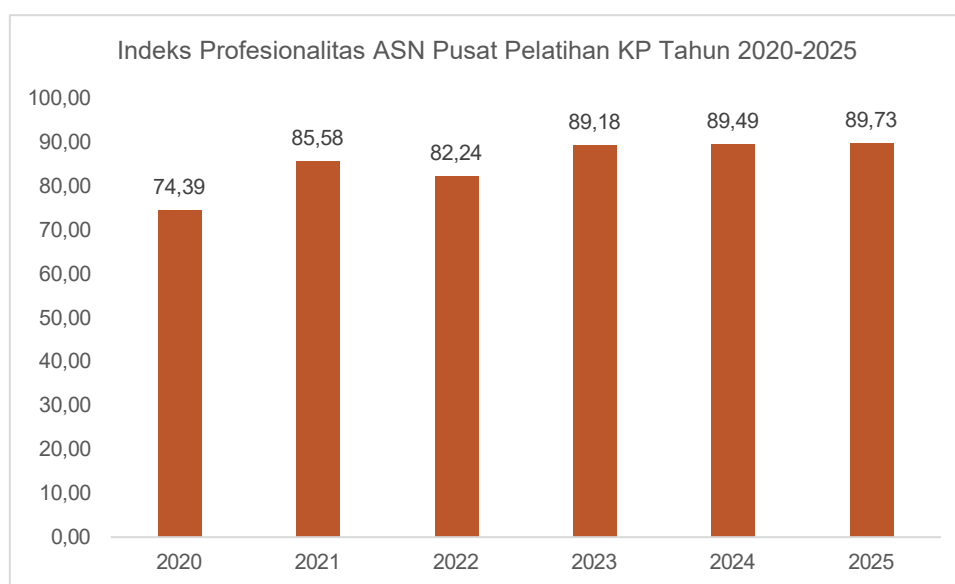
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
≤60	Sangat Rendah

Sumber: Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Capaian IKU ini di tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas Plt. BPPSDM KP Nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2025 Lingkup BPPSDM Tanggal 6 Januari 2026. Adapun capaian Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 yakni:

Tabel 76. Capaian IKU 20 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
74,39	85,58	82,24	89,18	89,49	83	89,73	108,11%	0,27%	83	108,11



Gambar 18. Grafik Capaian IKU IP ASN Pusat Pelatihan Tahun 2020-2025

Capaian Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan tren perkembangan yang positif dan cenderung meningkat secara stabil dalam lima tahun terakhir, dimulai dari angka 74,39 pada tahun 2020 hingga mencapai 89,49 pada tahun 2024. Memasuki tahun berjalan 2025, performa indeks ini mencatatkan hasil yang melampaui ekspektasi dengan realisasi sebesar 89,73 dari target yang ditetapkan sebesar 83, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja tahunan mencapai 108,11%. Meskipun kenaikan dibandingkan tahun 2024 terlihat tipis yaitu sebesar 0,27%, capaian tahun 2025 ini telah berhasil melampaui target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Tahun 2025-

2029 sebesar 83, yang berarti institusi telah memenuhi target strategis jangka panjangnya secara lebih awal dengan tingkat capaian terhadap target 2029 sebesar 108,11%.

Jika dibandingkan dengan satker lain, capaian untuk IP ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 77. Perbandingan Capaian IP ASN Lingkup BPPSDM KP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target IP ASN	Nilai IP ASN	Persentase Capaian
1	BPPSDM KP	81	85,61	105,69%
2	Pusat Penyuluhan KP	82	87,03	106,13%
3	Pusat Pendidikan KP	87	88,96	102,25%
4	Pusat Pelatihan KP	83	89,73	108,11%
5	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP	80	90	112,50%

Sumber: Nota Dinas Plt. BPPSDM KP Nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/II/2026

Dari 5 Unit Kerja yang dibandingkan, semua berhasil melampaui target IPASN tahun 2025, dengan persentase capaian antara 102,25% hingga 112,50%. Unit dengan capaian tertinggi adalah Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP (112,50%), diikuti oleh Pusat Pelatihan KP (108,11%). Adapun Faktor pendukung tercapainya IKU ini antara lain:

1. Adanya dukungan struktural terhadap program pelatihan dan pengembangan aparatur.
2. Tema pelatihan mencakup aspek teknis, kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik.
3. Penilaian dilakukan secara transparan dan terdokumentasi melalui aplikasi monitoring.
4. Perangkat perencanaan karier mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
5. ASN difasilitasi untuk memenuhi standar kompetensi profesional masing-masing.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini antara lain:

1. Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi:
 - a. ToT CPIB, CPPIB, CBIB
 - b. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
 - c. Fleksibel Skills untuk Penyuluh Perikanan
2. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial:
 - a. Kepemimpinan Teknis Sektor KP
 - b. Microlearning Kepemimpinan Tingkat 5 & Digital Leadership
3. Penguatan Tata Kelola ASN:
 - a. Pengantar Pengarusutamaan Gender

- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Pelatihan Anti-Narkotika dan Gratifikasi
- d. Pelatihan Menjadi ASN yang Responsif
- e. Microlearning tentang Pengawasan, Stress, Sampah, dan Pengembangan Diri
- f. Pelatihan Manajemen Anti Penyuaan

Indikator Kinerja IKSK.03.21 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)

IKU ini secara definisi adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP. IKU ini yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP Pada Tahun 2025 mengacu kepada Nota dinas Inspektorat Jenderal Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025 dan Surat Nomor B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” periode Tahun 2025”. Disampaikan bahwa Pusat Pelatihan KP memiliki terdapat temuan awal (saran) sebanyak 4 dan telah diselesaikan semua, sehingga capaian IKUnya 100,00% dan jika dibandingkan dengan target 2029 yakni sudah tercapai 117,65%.

Tabel 78. Capaian IKU 21 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
100	100,00	100,00	80,00	82,00	85	100,00	117,65%	21,95%	85	117,65

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP



Gambar 19. Grafik Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun 2021-2025

Indikator ini menilai efektivitas tindak lanjut atas temuan pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen), di mana pada tahun 2023 dan 2024 instansi tidak memiliki temuan pengawasan sehingga masing-masing memperoleh nilai standar sebesar 80,00% dan 82,00%. Nilai sempurna 100,00% hanya dapat diperoleh apabila instansi memiliki temuan dan berhasil menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut, sebagaimana dibuktikan pada tahun berjalan 2025 di mana Pusat Pelatihan KP memiliki 4 temuan dari Itjen dan telah menyelesaikan keempatnya secara tuntas. Realisasi tahun 2025 yang mencapai 100,00% ini melampaui target tahunan sebesar 85% dengan tingkat capaian kinerja 117,65%, serta menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 21,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan hasil ini, target akhir pada Rencana Kegiatan Tahun 2025- 2029 sebesar 85% telah terlampaui lebih awal dengan persentase capaian terhadap target 2029 mencapai 117,65%, yang menegaskan komitmen institusi dalam menjaga akuntabilitas melalui penyelesaian temuan pengawasan secara responsif.

Adapun perbandingan dengan satker lain antara lain:

Tabel 79. Perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi dengan satker lain

No.	Satker Pusat	Temuan	Temuan Selesai	Target 2025	Capaian 2025	%
1	Pusat Pendidikan KP	26	24	85	92,31%	108,6
2	Pusat Pelatihan	4	4	85	100	117,65
3	Pusat Penyuluhan	25	25	85	100	117,65

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusat Pendidikan KP menyelesaikan 24 dari 26 temuan, dengan capaian 92,31% dari target 85%, untuk Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, capaiannya menggunakan nilai persentase

rekomendasi yang ditindaklanjuti sehingga untuk Pusat Pelatihan yang telah menyelesaikan 4 dari 4 rekomendasi memperoleh 100% dari target 85% sehingga memperoleh capaian 117,65% dan Pusat Penyuluhan yang menyelesaikan 25 dari 25 rekomendasi memperoleh 100% atau 117,65% dari target 2025 nya.

Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Tahun 2025 antara lain:

- 1) Komitmen Kepala Pusat dan pegawai untuk meminimalisir temuan dan percepatan penyelesaian temuan dan inisiasi kegiatan tindak lanjut ke satker secara internal atau bersama Inspektorat Jenderal.
- 2) Terlaksananya administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik. Serta antisipasi permasalahan atau adanya kesalahan dalam administrasi. terselesaikannya dokumen tindaklanjut yang baik dengan koordinasi yang baik.
- 3) Sistem pengawasan internal yang efektif sehingga temuan dan rekomendasi dapat memberikan masukan yang relevan bagi peningkatan kinerja.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan yang dikerjakan, komitmen pimpinan bersama tim keuangan maupun perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam proses administrasi keuangan serta kolaborasi dengan auditor

Indikator Kinerja IKSK.03.22 – Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)

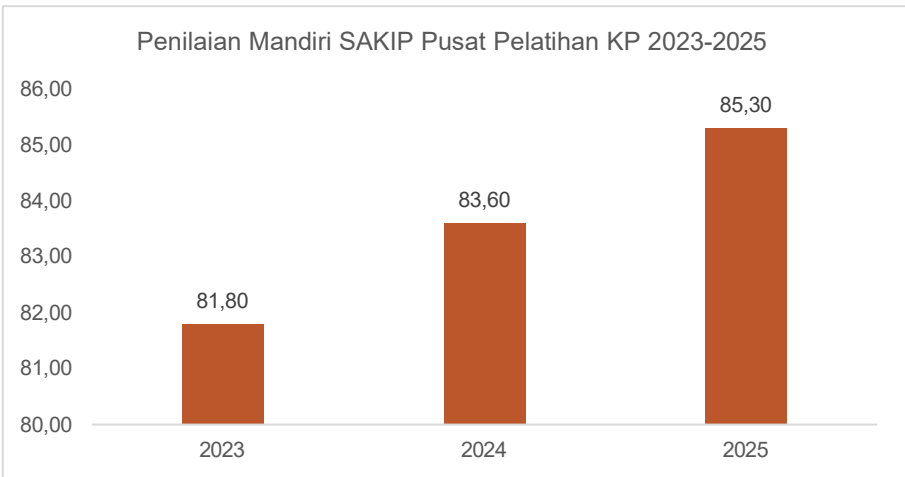
Berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP, tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan. (apakah berhasil ataukah gagal). Dasar pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2025 mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan MenPAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari Evaluasi Penilaian SAKIP Mandiri Tahun 2025 ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara

konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, salah satu pengendalian dan fasilitasi dalam pengelolaan kinerja dalam adalah dalam bentuk Advisory Services (pendampingan dalam rangka perbaikan kinerja). Salah satu bentuk implelementasi di BPPSDM berupa inisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekon kinerja pada seluruh satker secara berjenjang yang dilakukan BPPSDM, mulai diadopsi untuk lingkup KKP. Begitupula evaluasi berbasis aplikasi menjadi nilai inovasi bagi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP, menjadikan BPPSDM mendapatkan nilai lebih dalam pengelolaan kinerja. Capaian SAKIP Puslat KP di tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 80.Capaian IKU 22 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
			81,80	83,60	81	85,30	105,31%	2,03%	81	105,31



Gambar 20. Grafik Capaian IKU PM SAKIP 2023-2025

Berdasarkan Data Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 berupa surat Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 4485/BPPSDM.1/RC.510/VII/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 Lingkup BPPSDM capaian nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, dimulai dari skor 81,80 pada tahun 2022 menjadi 83,60 pada tahun 2024. Pada tahun berjalan 2025, instansi berhasil mencatatkan performa melampaui target dengan

realisasi nilai sebesar 85,30 dari target yang ditetapkan sebesar 81, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 105,31%. Peningkatan ini juga mencerminkan pertumbuhan positif sebesar 2,03% dibandingkan tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja dan tata kelola organisasi. Dengan hasil realisasi 2025 ini, target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029 sebesar 81 telah berhasil dilampaui sepenuhnya di tahun pertama dengan persentase capaian terhadap target 2029 mencapai 105,31%.

Acuan dokumen yang berisi rincian dokumen dan format dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian mandiri SAKIP diantaranya: 1) Renja 2025, 2) Renstra 2020-2024 dan rencana kegiatan 5 tahun, 3) Reviu renstra 2024, 4) RKAKL 2024 dan 2025, 5). RKAKL 2024/2025, 6) RKT 2024 dan 2025, 7) Revisi RKT 2024 dan 2025, 8) PK level 1 2024/2025 (untuk BPPSDM), 9) PK level 3 2024-2025 (Ka UPT), 10) Revisi PK 2024, 11) PK jabfung tertentu**/SKP, 12) Rencana aksi (Renaksi) tahun 2024, 13) Revisi rencana aksi 2024, 14) Informasi cascading 2024 dan 2025, 15) SK IKU tahun 2024 dan 2025, 16) Manual IKU 2024 dan 2025 (pada alur proses dilengkapi dengan feedback perbaikan data kinerja), 17) Pohon kinerja 2024 dan 2025, 18) Kerangka logis IKU, 19) Laporan kinerja triwulanan dan tahunan 2020-2025, 20) Data dukung capaian kinerja triwulanan dan tahunan 2020-2025, 21) SK tim pengelola kinerja tahun 2025, 22) Laporan evaluasi program/kegiatan tahun 2024, 23) Evaluasi renaksi triwulanan 2024-2025, 24) Penghargaan dari luar di tahun 2024, 25) Laporan penyelenggaraan sakiP 2024, 26) Verifikasi perencanaan kinerja 2024 dan 2025, 27) Verifikasi pengukuran kinerja 2024 dan 2025, 28) Verifikasi pelaporan dan evaluasi kinerja 2024 dan 2025, 29) Rekap pengisian SKP tahun 2024 (januari-desember) dan januari-maret 2025, 30) Rincian target IKU, 31) Implementasi reward and punishmen sop, 32) Pelaporan kinerja, 33) rekap rekomendasi pelaporan, dan 34) Bukti tindak lanjut rekomendasi pelaporan.

Adapun Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan menggunakan kriteria penilaian SAKIP, adalah sebagai berikut:

Tabel 81. Hasil Evaluasi Mandiri Implementasi SAKIP Pusat Pelatihan KP TA. 2025

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4.	Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,90

Nilai Hasil Evaluasi Komponen	100	85,30
Predikat Penilaian		A (Memuaskan)

Catatan Atas Verifikasi Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 adalah:

Tabel 82. BA Catatan Atas Verifikasi PM SAKIP Pusat Pelatihan KP Tahun 2025

No.	Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	25,20	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja setidaknya 5 tahun terakhir 2. Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan.	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dan diimplementasikan dalam perencanaan kinerja secara berkala
2.	Pengukuran Kinerja	26,70	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen pengukuran kinerja setidaknya 5 tahun terakhir. 2. Apresiasi atas upaya baru terhadap penyesuaian strategi dalam pengukuran capaian kinerja untuk kinerja yang lebih efisien dan efektif (Aplikasi E SIKAP)	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dan diimplementasikan dalam pengukuran kinerja secara berkala dan tepat waktu. 2. Mempertahankan upaya baru dan terus melakukan peningkatan pengukuran kinerja dalam mencapai target yang telah ditentukan
3.	Pelaporan Kinerja	12,90	1. Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan tapi belum tersedia lengkap selama 5 tahun terakhir 2. Apresiasi atas upaya baru terhadap penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja berikutnya (Aplikasi E-Laut) 3. Laporan Kinerja belum seluruh IKU menginformasikan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kementerian/ nasional/internasional (benchmark kinerja)	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dan diimplementasikan dalam pelaporan kinerja secara berkala, tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Mempertahankan upaya baru dan terus melakukan peningkatan pelaporan kinerja. 3. Laporan kinerja agar dapat menyajikan perbandingan seluruh IKU terkait realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan level kementerian/nasional /internasional (benchmark kinerja)
4.	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	20,50	1. Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan dan tersedia setidaknya 4 tahun terakhir 2. Mengoptimalkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam penyediaan dokumen dan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
Total Nilai		85,30		

No.	Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	Predikat	A (Memuaskan)		

Nilai capaian PM SAKIP Tahun 2025 untuk satker level 2 lingkup BPPSDM adalah sebagai berikut:

Tabel 83. Perbandingan Capaian IKU PM SAKIP dengan satker lain

No	Satker	Target	Realisasi	Predikat	Persentase (%)
1	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	82	83,55	A	101,89%
2	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	81	85,30	A	105,31%
3	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	82	82,75	A	100,91%
4	BBRSEKP	82	84,00	A	102,44%
5	BBRP2BKP	82	84,00	A	102,44%

1. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mencapai realisasi 83,55 dari target 82, dengan persentase 101,89%.
2. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mencatat realisasi tertinggi yaitu 85,30 dari target 81, dengan persentase pencapaian 105,31%.
3. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mencapai realisasi 82,75 dari target 82, dengan persentase 100,91%.
4. BBRSEKP dan BBRP2BKP masing-masing mencapai realisasi 84,00 dari target 82, dengan persentase yang sama yaitu 102,44%.

Secara keseluruhan, kinerja kelima satuan kerja tersebut sangat baik, dengan rata-rata persentase realisasi terhadap target mencapai 102,60%, menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana melebihi rencana yang ditetapkan. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian IKU PM SAKIP Tahun 2025 antara lain:

1. Komitmen Kepala Pusat dan Tim Kinerja Satker dalam mempersiapkan dokumen SAKIP yang diperlukan
2. Tim Kinerja Satker yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan SAKIP sehingga lebih profesional dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja.
3. Koordinasi yang kuat dari setiap level di organisasi dalam mempersiapkan penilaian mandiri SAKIP.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan Kinerja yakni penyusunan dokumen perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, renja dll.
2. Kegiatan Pengukuran Kinerja, seperti verifikasi dan validasi kinerja, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan pengukuran kinerja triwulanan dan tahunan.

3. Kegiatan Pelaporan Kinerja, seperti penyiapan Laporan Kinerja yang sesuai kaidah.
4. Kegiatan Evaluasi Kinerja, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan pada pelaporan kinerja instansi.
5. Kegiatan kickoff meeting SAKIP dan pendampingan penilaian SAKIP secara berjenjang dari level 3 ke level 1.

Indikator Kinerja IKS.03.23 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN satker Pusat Pelatihan Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;
 - a. Laporan RKBMN Tahun 2025 dan Revisi (jika terdapat revisi);
 - b. RKAKL Tahun 2025 revisi terakhir;
2. Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN TA. 2025 sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang.
3. Dokumen usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN TA. 2025 untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;
4. Penggunaan BMN Hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima atau surat keputusan penggunaan BMN (BAST/Berita Acara Pemakaian)
5. Laporan BMN Tahunan 2024 dan Semester 1 TA. 2025 beserta surat penyampaian kepada eselon 1;
6. Surat Usulan RKBMN 2027.

Pada Tahun 2025 berdasarkan nota dinas Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025, untuk capaian IKU BMN Puslat ini yakni:

Tabel 84. Capaian IKU 23 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					80	80,00	100,00%	-	80	100,00

Indikator tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan IKU baru yang mulai diukur pada tahun 2025, sehingga belum memiliki data realisasi maupun persentase pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun pertama implementasinya, instansi menunjukkan performa yang sangat disiplin dengan mencapai realisasi sebesar 80,00%, tepat memenuhi target tahunan yang ditetapkan sebesar 80. Keberhasilan mencapai target 100,00% pada tahun berjalan ini menunjukkan kesiapan sistem tata kelola aset internal yang baik sejak awal program dicanangkan. Dengan realisasi tersebut, target akhir dalam Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029 yang dipatok pada angka 80 telah berhasil dipenuhi sepenuhnya (100,00%) di tahun 2025, memberikan fondasi kuat bagi kepatuhan pengelolaan aset negara pada sisa periode perencanaan hingga tahun 2029. Berikut adalah LKE penilaian IKU BMN Pusat Pelatihan KP tahun 2025:

Tabel 85. LKE IKU Kepatuhan BMN Pusat Pelatihan KP Tahun 2025

N O	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawab an	Bob ot	Nil ai	Pilihan Jawaban	Petunjuk Penilaian	Dokumen/Dat a pendukung	Kondisi/Penye bab Pencapaian Tdk Optimal
I	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN		100	80				
1	Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025		12,5	12,5				
a	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025	Y	5	5	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN	Penilaian dilakukan terhadap ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2025	"Dokumen RKBMN Tahun 2025 revisi KBMN tahun 2025 Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP	Mengikuti nilai SETBA
b	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025	A	7,5	7,5	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. < 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10%	Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase pengadaan dan pemeliharaan BMN dalam dokumen RKBMN Tahun 2025 yang dialokasikan anggarannya dalam RKAKL Tahun 2025	"- Dokumen RKBMN Tahun 2025 Satuan kerja lingkup BPPSDMKP - Dokumen RKAKL Tahun 2025 Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP	Mengikuti nilai SETBA

N O	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawab an	Bob ot	Nil ai	Pilihan Jawaban	Petunjuk Penilaian	Dokumen/Dat a pendukung	Kondisi/Penye bab Pencapaian Tdk Optimal
					s.d. < 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL <10%			
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang	A	25	25	a. apabila prosentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila prosentase usulan PSP BMN > 50% s.d. <80% c. apabila prosentase usulan PSP BMN > 10% s.d. <50% d. apabila prosentase usulan PSPBMN < 10%	Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah usulan dan capaian PSP BMN terhadap Nilai total BMN triwulan III Tahun 2025.	Data NUP yang belum di PSP - Data usulan PSP BMN - Data capaian PSP BMN - Total Nilai BMN	
3	Tersedianya usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025	D	25	5	a. apabila tingkat penyelesaian pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset > 80% b. apabila tingkat penyelesaian pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset > 50% s.d. < 80% c. apabila tingkat penyelesaian pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset > 10% s.d. < 50% d. apabila tingkat penyelesaian pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset < 10%	Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN terhadap NUP BMN dengan Kondisi Rusak Berat sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.	-Data NUP BMN dengan kondisi Rusak Berat - Data usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN	-

N O	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawab an	Bob ot	Nil ai	Pilihan Jawaban	Petunjuk Penilaian	Dokumen/Dat a pendukung	Kondisi/Penye bab Pencapaian Tdk Optimal
4	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian	A	20	20	a. apabila pemanfaatan BMN didukung BAST/BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BAST/BA Pemakaian > 50% s.d. < 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BAST/BA Pemakaian > 10% s.d. < 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BAST/BA Pemakaian <10%	Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah BMN hasil pengadaan Tahun 2024 yang telah dilengkapi BAST/Berita Acara Pemakaian BMN	- Data belanja modal Tahun 2024 Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP - BAST/Berita Acara Pemakaian BMN perolehan Tahun 2024 Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP - Surat Keterangan dari kepala satker yang menyatakan tidak ada belanja modal pada tahun 2024	
5	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	A	12,5	12,5	a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu	- Penilaian dilakukan terhadap ketepatan waktu penyusunan/pengiriman laporan BMN Unaudited tahun 2024, audited tahun 2024 dan Semester 1 tahun 2025 - Jadwal penyampaian LBMN UAKPB mengacu pada PMK 232 /PMK.05/2022 dan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor B.55/SJ/KU.510/I/2025	Penyampaian LBMN disertai dengan surat pengantar kepada Sekretaris BPPSDM	Mengikuti nilai SETBA
6	Penyusunan/Penyampaian RKBMN tahun 2027	Y	5	5	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN Tahun 2027	Penilaian dilakukan terhadap ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2027	Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 disertai dengan surat pengantar kepada Sekretaris BPPSDM	Mengikuti nilai SETBA

Kontribusi terbesar terhadap capaian IKU berasal dari pemenuhan sebagian besar komponen penilaian, antara lain pemanfaatan RKBMN Tahun 2025 dalam penyusunan RKAKL, ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN hingga Triwulan III, penggunaan BMN hasil belanja modal yang telah didukung BAST, ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan BMN semesteran dan tahunan, serta penyusunan RKBMN Tahun 2027. Seluruh komponen tersebut memperoleh nilai maksimal sesuai bobot yang ditetapkan. Adapun satu komponen yang belum optimal

adalah usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat, yang masih berada pada kategori rendah dan hanya memberikan kontribusi nilai terbatas terhadap total skor IKU.

Adapun berikut perbandingan nilai capaian IKU BMN Pusat Pelatihan KP dengan satker lain di lingkup BPPSDM KP.

Tabel 86. Perbandingan Capaian IKU Kepatuhan BMN Puslat KP dengan Satker sejenis

No	Satker	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Pusluh KP	80%	85%	106,25%
2	Puslat KP	80%	80%	100,00%
3	Pusdik KP	80%	80%	100,00%

1. Pusat Peruvuluhan Kelautan dan Perikanan dengan realisasi 85% dari target 80%, dengan persentase 106,25%.
2. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan realisasi 80% dari target 80%, dengan persentase pencapaian 100%.
3. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan realisasi 80% dari target 80%, dengan persentase pencapaian 100%

Secara keseluruhan, kinerja ketiga satuan kerja tersebut sudah baik, menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana melebihi rencana yang ditetapkan. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian IKU Kepatuhan BMN Tahun 2025 antara lain:

1. Adanya kedisiplinan administrasi dan kepatuhan terhadap siklus perencanaan BMN, yang tercermin dari tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 dan RKBMN Tahun 2027 serta konsistensi pemanfaatannya dalam penyusunan RKAKL.
2. Koordinasi yang baik dengan Sekretariat BPPSDM memungkinkan penyampaian laporan BMN dan usulan-usulan BMN dilakukan secara tepat waktu dan sesuai format yang dipersyaratkan.
3. Dukungan dokumentasi yang memadai, khususnya BAST dan Berita Acara Pemakaian atas BMN hasil belanja modal, memastikan bahwa pemanfaatan aset dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
4. Penerapan pedoman penilaian yang mengacu pada standar Sekretariat Badan turut membantu satker dalam menjaga keseragaman kualitas pengelolaan BMN.

Kegiatan pendukung IKU ini antara lain:

1. Penyusunan dan revidi berkala RKBMN, baik untuk kebutuhan tahun berjalan maupun perencanaan jangka menengah, guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan BMN dan alokasi anggaran.
2. Inventarisasi dan pembaruan data BMN secara rutin, termasuk pencatatan NUP dan pemantauan status penggunaan aset.

3. Penyusunan dan penyampaian laporan BMN semesteran dan tahunan secara tepat waktu, sesuai jadwal yang ditetapkan dalam PMK dan surat edaran terkait.
4. Penguatan administrasi belanja modal, khususnya melalui kelengkapan dokumen BAST dan Berita Acara Pemakaian sebagai dasar legal pemanfaatan BMN.
5. Koordinasi internal dan lintas unit dalam proses pengusulan penetapan status penggunaan BMN serta penyampaian dokumen kepada pengguna dan pengelola barang.

Indikator Kinerja IKSK.03.24 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Pusat Pelatihan KP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\text{Persentase RU PBJ yang diumumkan} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Gambar 21. Formula Perhitungan RU PBJ

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%) Pada Tahun 2025 mengacu kepada Nota Dinas a.n. Sekretariat Jenderal Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 tahun anggaran 2025 tanggal 13 Januari 2026.

Tabel 87. Capaian IKU 24 Tahun 2025

Realisasi TW 4					2025				Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					80	100,00	125,00%	-	80	125,00

Sumber: Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Indikator mengenai persentase pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP merupakan IKU baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data perbandingan realisasi untuk periode tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun pertama implementasinya, Puslat KP mencatatkan performa yang sangat baik dengan mencapai realisasi sebesar 100,00%, yang jauh melampaui target awal tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian ini menghasilkan persentase kinerja tahunan sebesar 125,00%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan transparansi yang sangat tinggi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa sejak awal periode. Sejalan dengan hasil tersebut, target akhir dalam Rencana Kegiatan Tahun 2025-2029 yang dipatok pada angka 80% telah berhasil dilampaui sepenuhnya di tahun pertama dengan tingkat capaian terhadap target 2029 mencapai 125,00%.

Jika dibandingkan dengan satker lain, maka perbandingan capaian Puslat (dihitung bersama Sekretariat BPPSDMKP) dengan satker lain adalah sebagai berikut:

Tabel 88. Perbedaan Capaian IKU SIRUP PBJ dengan satker sejenis

No	Satker	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase(%)
1	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (+Puslat)	80%	100%	125,00%
2	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP	80%	100%	125,00%
3	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	80%	100%	125,00%

1. Sekretariat BPPSDMKP (+Puslat) dengan realisasi 100% dari target 80%, dengan persentase 125%.
2. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan realisasi 100% dari target 80%, dengan persentase 125%.
3. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan realisasi 100% dari target 80%, dengan persentase 125%.

Secara keseluruhan, kinerja ketiga satuan kerja tersebut sudah baik, menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana melebihi rencana yang ditetapkan. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase RUP PBJ Tahun 2025 antara lain:

1. Komitmen pimpinan pusat dan balai dalam melakukan tindak lanjut identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
2. Identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).
3. Koordinasi dengan sekretariat badan yang baik, karena pemenuhan IKU ini untuk Pusat Pelatihan KP dihitung Bersama Sekretariat Badan BPPSDM KP.

Kegiatan Pendukung IKU ini antara lain:

1. Penyusunan dan reviu berkala RKBMN, baik untuk kebutuhan tahun berjalan maupun perencanaan jangka menengah, guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan BMN dan alokasi anggaran.
2. Inventarisasi dan pembaruan data BMN secara rutin, termasuk pencatatan NUP dan pemantauan status penggunaan aset.
3. Penyusunan dan penyampaian laporan BMN semesteran dan tahunan secara tepat waktu, sesuai jadwal yang ditetapkan dalam PMK dan surat edaran terkait.
4. Penguatan administrasi belanja modal, khususnya melalui kelengkapan dokumen BAST dan Berita Acara Pemakaian sebagai dasar legal pemanfaatan BMN.
5. Koordinasi internal dan lintas unit dalam proses pengusulan penetapan status penggunaan BMN serta penyampaian dokumen kepada pengguna dan pengelola barang.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Desember 2025, Total Anggaran Pusat Pelatihan KP dan UPT Lingkup Puslat KP Tahun 2025 sebesar Rp. 122.944.290.000, dengan Pusat Pelatihan KP sendiri memiliki pagu sebesar Rp.

12.383.060.000, berdasarkan data, sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi keuangan Pusat Pelatihan KP Rp. 12.277.481.000 atau sebesar 99,15% dari Pagu Aktif.

Tabel 89. Realisasi Keuangan Lingkup Pusat Pelatihan KP

Unit Kerja	Pagu Awal	Blokir Anggaran	Pagu Aktif	Realisasi	%-ase
	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(dari pagu aktif)
Pusat Pelatihan KP	12.383.060	-	12.383.060	12.277.481	99,15%
BDA Sukamandi	9.738.104	639.360	9.098.744	9.002.573	98,94%
BPPP Medan	9.808.311	332.995	9.475.316	9.421.687	99,43%
BPPP Tegal	44.963.223	7.021.064	37.942.159	35.593.725	93,81%
BPPP Banyuwangi	15.800.255	579.549	15.220.706	15.170.334	99,67%
BPPP Bitung	9.465.362	125.874	9.339.488	9.197.690	98,48%
BPPP Ambon	10.785.975	535.384	10.250.591	10.051.184	98,05%

Sumber: SAKTI

Secara umum kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
2. Perencanaan yang cermat terkait jadwal kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi deviasi yang tinggi antara rencana penggunaan anggaran dan realisasinya;
3. Untuk penghematan anggaran, memantau dan memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan dalam renja tetap sejalan.

Tabel 90. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Awal	Target Triwulanan				Kegiatan Pendukung				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Kode RO	Nama RO	Anggaran	Blokir	Realisasi
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP	75	0	0	0	81,67	SCC.831	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	21.673.914	3.166.148	17.320.935
			Kompeten yang Tersekap di Dunia										
			Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia										
			Kerja (DUDIKA) (%)										
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	25.324	3.772	8.890	12.984	19.045					
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	10,85	4,51	7,05	15,01	27,36					
		4	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang tersekap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	70	0	0	0	70	DCC.431	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	1.274.283	63.600	1.124.006
		5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	740	500	510	1.300	3.723					
		6	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) Lingkup Pusat Pelatihan KP yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	0	0	0	0	1	QDB.641	Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV)	83.809	-	83.765

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Triwulanan				Kegiatan Pendukung				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Kode RO	Nama RO	Anggaran	Blokir	Realisasi
		7 Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	1	0	0	0	2	ABW.122	Inovasi yang Diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	77.320	0	77.320
		8 Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	3	0	0	0	5	AFA.161	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	82.500	0	82.418
		9 Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12	2	5	8	15	ADF.141	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan	446.000	0	445.797
		10 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	7	0	0	0	8					
		11 Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75	0	0	0	75					

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Awal	Target Triwulanan				Kegiatan Pendukung				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Kode RO	Nama RO	Anggaran	Blokir	Realisasi
		12	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	0	0	0	2	RAL.711	Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	2.702.432	0	1.864.403
		13	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2	0	0	0	2	RBQ.721	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5.454.121	4.472.121	889.856
2	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.360	835	2.920	3.600	5.432	EBC.996.103	Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten	1.277.544	639.360	638.088
		15	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5	0	0	0	23					
		16	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	9	0	0	0	10					
		17	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6	0	0	0	7					
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100	25	50	75	100	EBA.994	Layanan Perkantoran	79.150.788	0	77.471.317

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Awal	Target Triwulanan				Kegiatan Pendukung				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Kode RO	Nama RO	Anggaran	Blokir	Realisasi
	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	19	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	0	0	0	1					
		20	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83	0	74	0	89,73	EBA.962	Layanan Umum	379.348	0	377.310
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80	0	0	0	80					
		22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80	80	80	80	80					
		23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP (%)	85	85	85	85	100	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	74.484	0	74.309
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81	0	0	0	85,3	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	182.374	0	180.439
									EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	85.373	0	84.747

Sumber: Aplikasi OMSPAN kemenkeu dan Aplikasi Kinerjaaku

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pelatihan KP

Pusat Pelatihan KP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Pusat Pelatihan KP merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi maka dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimum nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimum adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin efisiensinya mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula sebaliknya. Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai **efisiensi anggaran** pada Pusat Pelatihan KP yaitu;

1. Perencanaan (Anggaran)

Efisiensi anggaran dilakukan Pusat Pelatihan KP dalam beberapa dimensi, yaitu: **Dimensi efisiensi pertama** mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator *Outcome* dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2025 Pusat Pelatihan KP telah menetapkan kegiatan prioritas, yang pengawalannya dilakukan secara rutin laporan bulanan untuk mendapatkan rekomendasi memadai serta melaksanakan kegiatan yg menggunakan blended dilaksanakan dengan online sehingga menghemat anggaran.

Dimensi efisiensi ketiga berupa melakukan Kerjasama dengan Instansi lain K/L, NGO, Pihak Swasta dalam menghemat penggunaan anggaran kegiatan pelatihan KP dan memaksimalkan kegiatan pelatihan dengan sistem kemitraan..

Dimensi efisiensi keempat berupa kondisi blokir anggaran pada pemangkasan alokasi anggaran belanja modal, perjalanan dinas dan pertemuan. Sehingga memaksimalkan penggunaan anggaran kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Dukungan Pusat Pelatihan KP dalam pencapaian upaya dimaksud dengan melakukan rewiu penganggaran secara berjenjang yang melibatkan *stakeholder* meliputi rewiu anggaran tingkat Pusat Pelatihan KP, rewiu anggaran tingkat KKP (Itjen dan Setjen), dan rewiu K/L (DJA dan Bappenas).

2. Pelaksanaan Kegiatan

Strategi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan serapan anggaran terutama untuk perjalanan dinas

- a. Sinergitas pelaksanaan kegiatan antar satker dan pusat dalam satu rangkaian
- b. Mengutamakan pertemuan di ruang rapat internal atau satker-satker Pusat Pelatihan KP
- c. Mengutamakan kegiatan pelatihan dengan metode online
- d. Sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui *video conference* dan *live streaming*
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan atasan berbasis *Balance Score Card* dan SKP.
- f. Mengadakan Pelatihan masyarakat dan aparatur dengan via Daring/online sehingga menghemat anggaran.
- g. Penguatan SDM Pusat Pelatihan KP dan UPT dalam meningkatkan kompetensi dan skill nya

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- a. Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran satker lingkup Pusat Pelatihan KP agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang-undangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA, Monev Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, Kinerjaku KKP.
- b. Melaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan Pusat Pelatihan KP dengan virtual. Hal tersebut memangkas perjalanan dinas dan pertemuan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan
- c. Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian Ketenagakerjaan dalam mencapai target dengan memanfaatkan alokasi anggaran. Data yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya yaitu; 1. Data Capaian Sasaran Strategis; 2. Data Pagu Anggaran; dan 3. Data Realisasi Anggaran. cara perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = Capaian Output \% - Capaian Realisasi Anggaran \%$$

Tabel 91. Perhitungan Efisiensi Anggaran Pusat Pelatihan KP TA 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET AWAL 2025	CAPAIAN 2025	%	% Avg	DATA ANGGARAN					EFISIENSI (Capaian - Realisasi) Sebelum Blokir	EFISIENSI (Capaian - Realisasi) Setelah Blokir
						ANGGARAN	BLOKIR	REALISASI	% (sebelum blokir)	%(setelah blokir)		
1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	81,67	108,89%	137,69%	21.673.914	3.166.148	17.320.935	79,92%	93,59%	57,77%	44,10%
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	14.800	19.045	128,68%								
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	15,59	27,36	175,50%								
4	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)	70	70,03	100,04%	114,21%	1.274.283	63.600	1.124.006	88,21%	92,84%	26,00%	21,37%
5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	2900	3.723	128,38%								
6	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) Lingkup Pusat Pelatihan KP yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1	1	100,00%	100,00%	83.809	0	83.765	99,95%	99,95%	0,05%	0,05%
7	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	1	2	200,00%	200,00%	77.320	0	77.320	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	3	5	166,67%	166,67%	82.500	0	82.418	99,90%	99,90%	66,77%	66,77%
9	Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12	15	125,00%	124,21%	446.000	0	445.797	99,95%	99,95%	24,25%	24,25%
10	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	7	8	114,29%								
11	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75	100	133,33%								

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET AWAL 2025	CAPAIAN 2025	%	% Avg	DATA ANGGARAN					EFISIENSI (Capaian - Realisasi) Sebelum Blokir	EFISIENSI (Capaian - Realisasi) Setelah Blokir
						ANGGARAN	BLOKIR	REALISASI	% (sebelum blokir)	% (setelah blokir)		
12	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2	100,00%	100,00%	2.702.432	0	1.864.403	68,99%	68,99%	31,01%	68,99%
13	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2	2	100,00%	100,00%	5.454.121	4.472.121	889.856	16,32%	90,62%	83,68%	16,32%
14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.360	5.432	124,59%	203,09%	1.277.544	639.360	638.088	49,95%	99,98%	153,14%	103,11%
15	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5	23	460,00%								
16	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	9	10	111,11%								
17	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6	7	116,67%								
18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100	100	100,00%	100,00%	79.150.788	0	77.471.317	97,88%	97,88%	2,12%	2,12%
19	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	100,00%								
20	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83	89,73	108,11%	111,04%	379.348	0	377.310	99,46%	99,46%	11,57%	11,57%
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80	80	100,00%								
22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80	100	125,00%								
23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP (%)	85	100	117,65%	117,65%	74.484	0	74.309	99,77%	99,77%	17,88%	17,88%
24		81	85,3	105,31%		182.374	0	180.439	98,94%	98,94%	6,37%	6,37%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET AWAL 2025	CAPAIAN 2025	%	% Avg	DATA ANGGARAN					EFISIENSI (Capaian - Realisasi) Sebelum Blokir	EFISIENSI (Capaian - Realisasi) Setelah Blokir
						ANGGARAN	BLOKIR	REALISASI	% (sebelum blokir)	% (setelah blokir)		
	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)		85,3	105,31%		85.373	0	84.747	99,27%	99,27%	6,04%	6,04%
											41,91%	34,92%

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan untuk Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Pusat Pelatihan KP tahun 2025 dihitung menggunakan formula yang diberikan dengan hasil efisiensi 41,91% jika menggunakan anggaran pra Blokir, dan 34,92% setelah blokir. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Pusat Pelatihan KP pada tahun 2025 sudah mampu mengefisiensikan sumberdaya anggaran yang diberikan secara baik dengan bisa mencapai output yang relatif lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang digunakan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

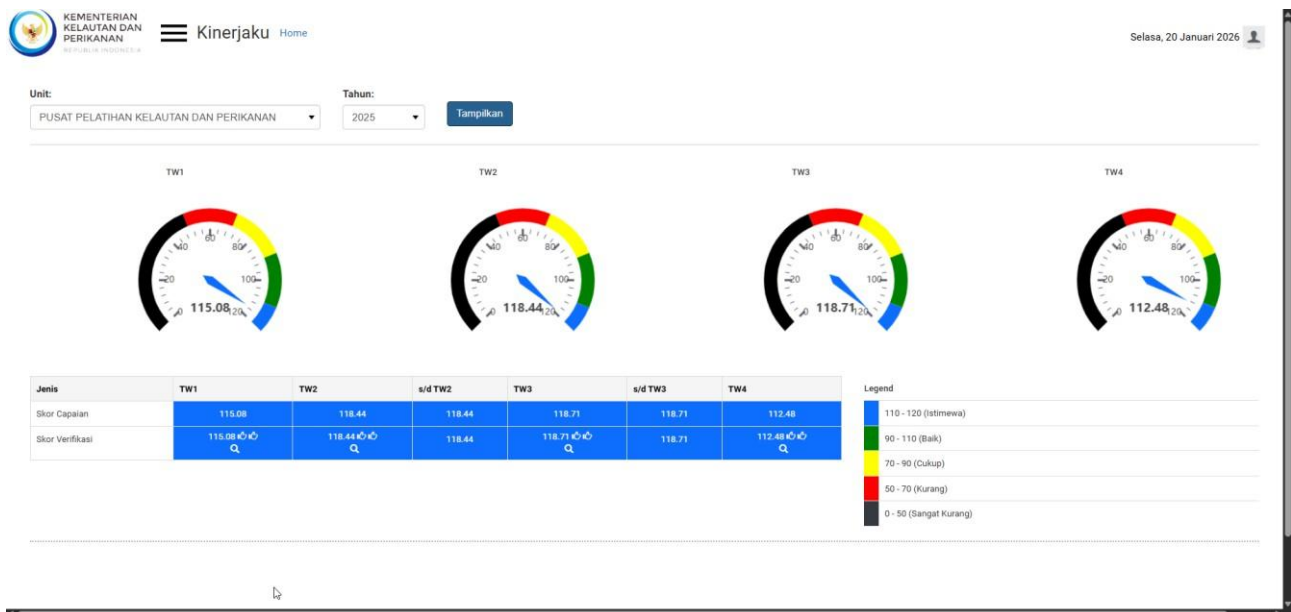


penutup

BAB IV - PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja organisasi Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2025 adalah **112,48% - ISTIMEWA** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini:



Gambar 22. Tampilan Dashboard Kinerjaku (Sumber: Kinerjaku.kkp.go.id)

Berikut rangkuman capaian IKU Pusat Pelatihan KP Tahun 2025

1. IKS.01.01 – Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Industri, dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) dengan Target 2025 sebesar 75% dan Capaian 2025 sebesar 81,67% (108,89%).
2. IKS.01.02 – Persentase SDM Kelautan dan Perikanan Tertsertifikasi Kompetensi yang Terserap di DUDIKA dengan Target 2025 sebesar 70% dan Capaian 2025 sebesar 70,03% (100,04%).

3. IKS.01.03 – Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) dengan Target 2025 sebesar 14.800 orang dan Capaian 2025 sebesar 19.045 orang (120%).
4. IKS.01.04 – Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar) dengan Target 2025 sebesar 15,59 dan Capaian 2025 sebesar 27,36 (120%).
5. IKS.01.05 – SDM Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang) dengan Target 2025 sebesar 2.900 orang dan Capaian 2025 sebesar 3.723 orang (120%).
6. IKS.01.06 – Fasilitas Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang menerapkan IPTEK KP (desa) dengan Target 2025 sebesar 1 desa dan Capaian 2025 sebesar 1 desa (100%).
7. IKS.01.07 – Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (paket) dengan Target 2025 sebesar 1 paket dan Capaian 2025 sebesar 2 paket (120%).
8. IKS.01.08 – Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pelatihan Masyarakat yang disusun dengan Target 2025 sebesar 3 NSPK dan Capaian 2025 sebesar 5 NSPK (120%).
9. IKS.01.09 – Jejaring dan/atau kerja sama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (dokumen) dengan Target 2025 sebesar 12 dokumen dan Capaian 2025 sebesar 15 dokumen (120%).
10. IKS.01.10 – Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (sertifikat) dengan Target 2025 sebesar 7 sertifikat dan Capaian 2025 sebesar 8 sertifikat (114,29%).
11. IKS.01.11 – Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang KP yang disahkan sesuai peraturan dengan Target 2025 sebesar 75% dan Capaian 2025 sebesar 100% (120%).
12. IKS.01.12 – Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) dengan Target 2025 sebesar 2 unit dan Capaian 2025 sebesar 2 unit (100%).
13. IKS.01.13 – Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) dengan Target 2025 sebesar 2 unit dan Capaian 2025 sebesar 2 unit (100%).
14. IKS.02.14 – Aparatur KP yang dilatih (orang) dengan Target 2025 sebesar 4.360 orang dan Capaian 2025 sebesar 5.432 orang (120%).

15. IKS.02.15 – Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang) dengan Target 2025 sebesar 5 orang dan Capaian 2025 sebesar 23 orang (120%).
16. IKS.02.16 – Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berbasis kelompok keahlian untuk mendukung corpu (usulan) dengan Target 2025 sebesar 9 usulan dan Capaian 2025 sebesar 10 usulan (111,11%).
17. IKS.02.17 – Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN KP (lembaga) dengan Target 2025 sebesar 6 lembaga dan Capaian 2025 sebesar 7 lembaga (116,67%).
18. IKS.03.18 – Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP dengan Target 2025 sebesar 100% dan Capaian 2025 sebesar 100% (100%).
19. IKS.03.19 – Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (satker) dengan Target 2025 sebesar 1 satker dan Capaian 2025 sebesar 1 satker (100%).
20. IKS.03.20 – Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP dengan Target 2025 sebesar 83 dan Capaian 2025 sebesar 89,73 (108,11%).
21. IKS.03.21 – Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan Target 2025 sebesar 85% dan Capaian 2025 sebesar 100% (117,65%).
22. IKS.03.22 – Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP dengan Target 2025 sebesar 81 dan Capaian 2025 sebesar 85,30 (105,31%).
23. IKS.03.23 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP dengan Target 2025 sebesar 80% dan Capaian 2025 sebesar 80% (100%).
24. IKS.03.24 – Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP dengan Target 2025 sebesar 80% dan Capaian 2025 sebesar 100% (120%).

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun secara umum kinerja untuk tahun 2025 ini Puslat KP telah mampu merealisasikan target kinerjanya, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dengan rekomendasi sebagai alternatif solusi demi tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan sampai dengan tahun 2025 terdapat beberapa catatan yaitu:

1. Kegiatan Prasarana seperti rehab kelas eks SUPM yang diblokir di 2025 akan dijalankan di tahun 2026

2. Kegiatan jasa konsultan perencanaan lingkungan lingkungan asrama pelatihan eks SUPM yang tidak jadi jalan karena perubahan masterplan.
3. Nilai Kepatuhan BMN masih bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang. Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada tahun mendatang, yaitu:
 1. Monitoring data berkala terkait capaian IKU Prioritas.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



lampiran

LAMPIRAN

PK Pusat Pelatihan KP Januari 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 **PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	17.804
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	25.324
		3	Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	10,85
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	740
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pelatihan Sumber Daya Manusia	5	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	6	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	3
		7	Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	10
		9	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75
		10	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5
		11	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2
4	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	12	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.525
		13	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	9
		15	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	16	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100
		17	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		18	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83
		19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP (%)	85
		20	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80
		22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 40.225.423.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.639.360.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	Rp 89.137.756.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan KP Tahun 2025		Rp 133.002.539.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiawati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiawati

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris BPPSDM	
2.	Katimja PE Puslat	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	17.804
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	29.944
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	17,34
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	1.510
		5	Laporan Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) Lingkup Pusat Pelatihan KP yang menerapkan IPTEK KP (Laporan)	1
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pelatihan Sumber Daya Manusia	6	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	7	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	3
		8	Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
		9	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	10
		10	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75
		11	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	6
		12	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	3
4	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	13	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.525
		14	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		15	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	9
		16	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100
		18	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		19	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP (%)	85
		21	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80
		23	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 51.844.621.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.639.360.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	Rp 88.981.782.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan KP Tahun 2025		Rp 144.465.763.000

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris BPPSDM	
2.	Katimja PE Puslat	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75
		2	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersertifikasi kompetensi yang terserap Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	70
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	14.800
		4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)	15,59
		5	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)	2.900
		6	Fasilitasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1
		7	Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	1
		8	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)	3
		9	Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
		10	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Sertifikat)	7
		11	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75
		12	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2
		13	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.360
		15	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5
		16	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	9
		17	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100
		19	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		20	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	83
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP (%)	85
		22	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)	80
		24	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Rp 31.794.379.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 1.277.544.000
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	Rp 79.872.367.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan KP Tahun 2025		Rp 112.944.290.000

Jakarta, 4 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Tabel 92. Link Data Dukung Capaian IKU

No.	Kode	Link Data Dukung
1	IKSK.01.01	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768484713.pdf
2	IKSK.01.02	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768486239.pdf
3	IKSK.01.03	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768486419.pdf
4	IKSK.01.04	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768486457.pdf
5	IKSK.01.05	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768486501.pdf
6	IKSK.01.06	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768447795.pdf
7	IKSK.01.07	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768487207.pdf
8	IKSK.01.08	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768487207.pdf
9	IKSK.01.09	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768447814.pdf
10	IKSK.01.10	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768463448.pdf
11	IKSK.01.11	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768467404.pdf
12	IKSK.01.12	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768487758.pdf
13	IKSK.01.13	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768487788.pdf
14	IKSK.02.14	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768487319.pdf
15	IKSK.02.15	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768448999.pdf
16	IKSK.02.16	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768460688.pdf
17	IKSK.02.17	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768461023.pdf
18	IKSK.03.18	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768447686.pdf
19	IKSK.03.19	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768462348.pdf
20	IKSK.03.20	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768445355.pdf
21	IKSK.03.21	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768445395.pdf
22	IKSK.03.22	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768446640.pdf
23	IKSK.03.23	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768445464.pdf
24	IKSK.03.24	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2025/12202524831768445711.pdf



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PELATIHAN**

Gedung Mina Bahari II Lt. 5

Jl Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110

Telp: (021) 3519070 (Lacak) - FAX: (021) 3513287

Laman www.kkp.go.id Surel brsdm@kkp.go.id